M. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

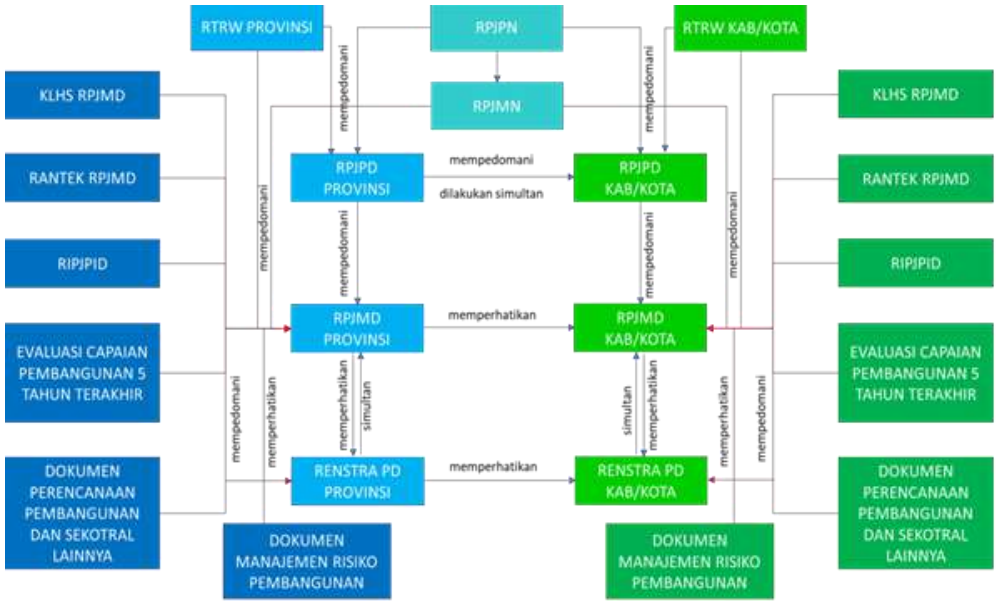
Sebagai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Daerah wajib Menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 agar kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahunan dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah ini berfungsi sebagai :

a. Dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
b. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah; dan
c. Kontrak kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah

Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



RPJMD Kota Bogor yang diterbitkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor No. 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor, yang memuat Visi : Bogor Beres, Bogor Maju, dengan Misi : Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Sejahtera dan Bogor Lancar. RPJMD Kota Bogor ini merupakan periode 5 (lima) tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor sebagaimana tertuang dalam Perda No. 10 Tahun 2024 tentang RPJPD Kota Bogor 2025-2045 yang mempunyai Visi: Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan.

Dengan demikian dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus mengacu dan mempedomani :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
b. Rencana Tata Ruang Wilayah
c. Evaluasi Capaian Pembangunan 5 (lima) tahun terakhir
d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
e. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
f. Dokumen Perencanaan Sektoral lainnya

Sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2025-2029 telah melalui proses koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dengan tahapan sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan penetapan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Selanjutnya, cakupan layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor pada Renstra Perangkat Daerah ini berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor memegang urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

f. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
h. Undang-Undang Republik Indonesta Nomor I7 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor I90);
i. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
j. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
k. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
n. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2018 Nomor 2);

p. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
q. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2024 Nomor 680);
s. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
t. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
u. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
v. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1419 Tahun 2021);
w. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
x. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
y. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
z. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 7);
aa. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 121);

bb. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);

cc. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 4 Seri E);

dd. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 151);

ee. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 163);

ff. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 108);

gg. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bogor Nomor 168 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 168);

hh. Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2025 Nomor 21);

ii. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Nomor 57 Tahun 2023) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit

Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Nomor 2 Tahun 2025);

jj. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2029;

kk. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan A Samida dan Wilayah Perencanaan D Purwa Tahun 2024-2044(Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 5)

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kota Bogor 2025-2029, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait dengan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor adalah sebagai pedoman dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor adalah:

1) Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2025-2029 dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025-2029;
2) Memberikan pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2025-2029);
3) Menetapkan tolok ukur dan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor 2025-2029 disusun sesuai ketentuan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD

1.2. Landasan Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan

Memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut :

a. Tugas, fungsi dan struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor;
b. Sumber daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor;
c. Kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor;
d. Kelompok sasaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor;
e. Mitra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dalam pemberian pelayanan (jikalau ada);
f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor [jikalau ada);
g. Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor (jikalau ada).

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal

RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

b. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertangungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun basil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Renstra PD

a. Menguraikan Visi, Misi, Tujuan Sasaran RPJMD terkait dengan cakupan layanan perangkat daerah dan keterkaitan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor
b. Merumuskan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran Perangkat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor
c. Mempertimbangkan kondisi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor cukup memiliki 1 (satu) tujuan.
d. Jika PD mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan kedua

urusan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan masing-masing urusan yang diampu.

e. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor disusun dengan kalimat kondisi, dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, disusun dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami, bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*

f. Strategi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.

3.2 Pentahapan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Menguraikan pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1 Penjenjangan Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor. Menguraikan penjenjangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor merupakan cascading dari tujuan dan sasaran perangkat daerah sampai dengan sub kegiatan terkait beserta indicator kinerjanya

4.2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Penganggaran Perangkat Daerah

Menguraikan program, kegiatan dan subkegiatan beserta kinerja dan pagu indikatif yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

4.3 Target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Kunci/Daerah Perangkat Daerah

Menguraikan target IKU, IKK, SPM serta Prioritas Pembangunan Daerah terkait dengan layanan Perangkat Daerah

4.4 Rencana Pemenuhan SPM (Hanya Untuk PD Yang Mengampu 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar)

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. GAMBARAN PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor merupakan Perangkat Daerah Kota Bogor yang dibebani tugas melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan daerah Kota Bogor di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang idealnya terdiri dari lima kelompok struktur, yaitu Sektor Sumber Daya Air, Sektor Cipta Karya, Sektor Bina Marga, Sektor Bina Konstruksi, dan Sektor Tata Ruang.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas PUPR yang saat ini berada pada tipologi dinas tipe B dengan aspek Cipta Karya dan Tata Ruang belum menjadi sektor/bidang tersendiri, sehingga hal tersebut mempengaruhi terhadap capaian kinerja dinas. Salah satu strategi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Dinas PUPR dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Dinas yaitu Peningkatan tipe kelembagaan DPUPR Kota Bogor menjadi tipe A sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

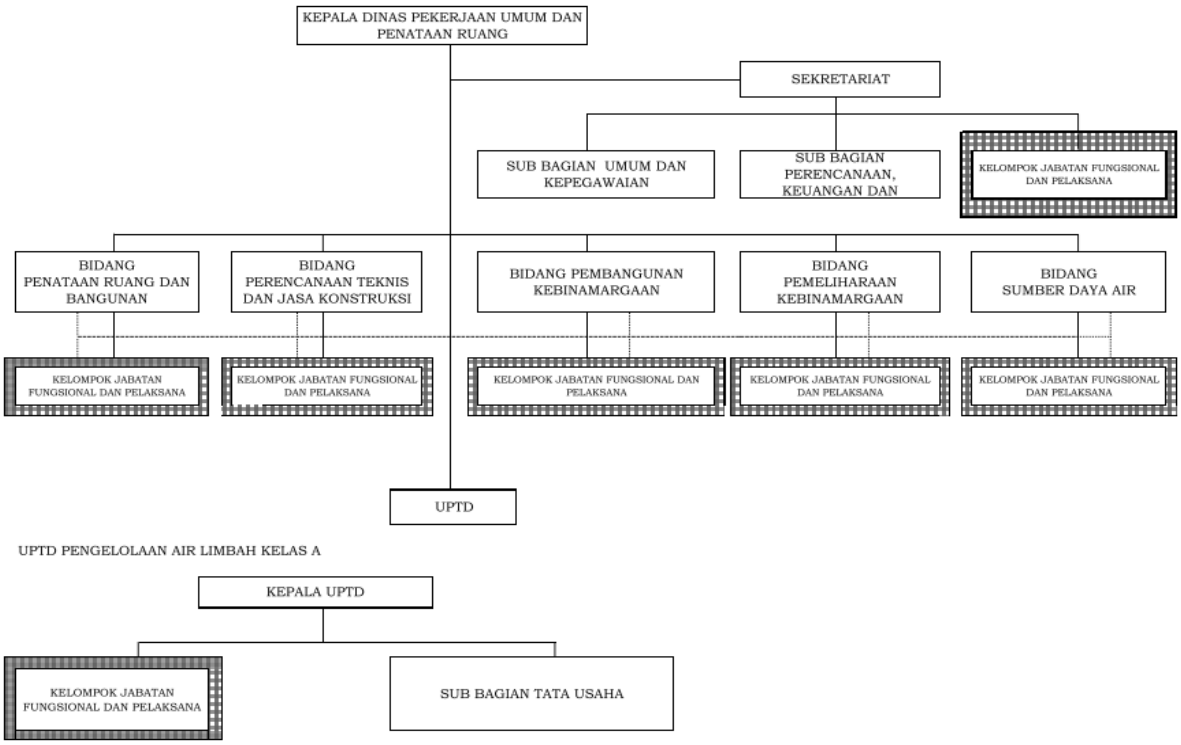
Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
    3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
c. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
d. Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
e. Bidang Pembangunan Kebinamargaan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
f. Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
g. Bidang Sumber Daya Air membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
h. UPTD Pengelolaan Air Limbah Kelas A terdiri dari:
    1. Kepala UPTD;
    2. Sub Bagian Tata Usaha.

Berikut gambar sruktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

Gambar 2.1-1.
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Sumber: Perwali Kota Nomor 119 Tahun 2022

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, monitoring, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan fungsi urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dann penataan ruang.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
3. Pelaksanaan teknis operasional di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, sarana, dan prasarana Dinas;

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

Sekretaris bertugas melaksanakan sebagian fungsi dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja di lingkup Dinas;
2. Pelaksanaan tugas administrasi keuangan di lingkup Dinas;
3. Pelaksanaan tugas administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah di lingkup Dinas; dan
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Dinas.

C. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan

Bidang Penataan Ruang dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Penataan Ruang dan Bangunan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bangunan mempunyai fungsi:

1. perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Penataan Ruang dan Bangunan;
2. Penyusunan rencana kerja di bidang penataan ruang dan bangunan;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Penataan Ruang dan Bangunan;
4. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Penataan Ruang dan Bangunan;
5. Pemantauan dan evaluasi evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penataan Ruang dan Bangunan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Penataan Ruang dan Bangunan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

D. Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi

Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi melaksanakan fungsi:

1. perumusan konsep kebijakan daerah di di Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi;
2. Penyusunan rencana kerja di Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan teknis dan jasa konstruksi;
4. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

E. Bidang Pembangunan Kebinamargaan

Bidang Pembangunan Kebinamargaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Pembangunan Kebinamargaan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pembangunan Kebinamargaan melaksanakan fungsi:

1. Perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Pembangunan Kebinamargaan;
2. Penyusunan rencana kerja di Bidang Pembangunan Kebinamargaan;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Pembangunan Kebinamargaan;
4. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Pembangunan Kebinamargaan;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pembangunan Kebinamargaan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pembangunan Kebinamargaan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

F. Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan

Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan melaksanakan fungsi:

1. Perumusan konsep kebijakan Daerah di Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan;
2. Penyusunan rencana kerja di Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan;

3. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan;
4. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

G. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Sumber Daya Air.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Sumber Daya Air melaksanakan fungsi:

1. Perumusan konsep kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Air;
2. Penyusunan rencana kerja di Bidang Sumber Daya Air;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Sumber Daya Air;
4. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Sumber Daya Air;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Sumber Daya Air;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Sumber Daya Air; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

H. UPTD Pengelolaan Air Limbah Kelas A

UPTD Pengelolaan Air Limbah Kelas A dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Pengelolaan Air Limbah.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala UPTD melaksanakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja UPTD Pengelolaan Air Limbah Kelas A;
2. Pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum di lingkungan UPTD Pengelolaan Air Limbah Kelas A;
3. Pelaksanaan koordinasi pengendalian, pengawasan kegiatan dalam penggunaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
4. Pelaksanaan pengelolaan instalasi pengolahan air limbah dan instalasi pengolahan lumpur tinja;
5. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sistem komunal; dan
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

Reformulasi Organisasi

Dalam Penyampaian Penilaian Kinerja dan Rekomendasi Hasil Pengawasan Penataan Ruang Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, diketahui bahwa Kota Bogor berada di peringkat ke 23 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, termasuk kedalam lima terendah.

Gambar 2.1-2.
Surat Penyampaian Penilaian Kinerja dan Rekomendasi Hasil Pengawasan Penataan Ruang kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

PERIODE TAHUN 2022 - 2023

PROVINSI: JAWA BARAT
KABUPATEN/KOTA: KOTA BOGOR

A. Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang

No.	Aspek	Nilai	Predikat Kinerja
1	Pengaturan Penataan Ruang	73.33	Sedang
2	Pembinaan Penataan Ruang	76.11	Sedang
3	Perencanaan Tata Ruang	83.75	Baik
4	Pemanfaatan Ruang	25.00	Buruk
5	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	33.33	Buruk
Nilai Kinerja Pengaturan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Pelaksanaan Penataan Ruang		**58.31**	**Sedang**
Peringkat ke		**23**	dari 27 Kabupaten/Kota

Keterangan: Baik ≥ 80; Sedang 50 ≥ x < 80; Buruk < 50

Hal tersebut melihat berdasarkan 5 aspek dalam Penataan Ruang, diantaranya adalah Pengaturan Penataan Ruang dengan predikat Sedang, Pembinaan Penataan Ruang dengan predikat Sedang, Perencanaan Tata Ruang dengan predikat Baik, Pemanfaatan Ruang dengan predikat Buruk, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan predikat Buruk.

Gambar 2.1-3.

Sumber 2 Surat Penyampaian Penilaian Kinerja dan Rekomendasi Hasil Pengawasan Penataan Ruang kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

B. Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang

No	Kinerja	Aspek	Predikat	Keterangan
1	Kinerja Fungsi Perencanaan Tata Ruang	Aspek Perencanaan	Baik	Tidak Efektif
		Aspek Pengaturan bagian Perencanaan	Sedang	
		Aspek Pembinaan	Sedang	
2	Kinerja Fungsi Pemanfaatan Ruang	Aspek Pemanfaatan	Buruk	Tidak Efektif
		Aspek Pengaturan bagian Pemanfaatan	Sedang	
		Aspek Pembinaan	Sedang	
3	Kinerja Fungsi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Aspek Pengendalian	Buruk	Tidak Efektif
		Aspek Pengaturan bagian Pengendalian	Sedang	
		Aspek Pembinaan	Sedang	
Nilai Kinerja Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Penataan Ruang				**Tidak Efektif dan Tidak Efisien**

Berdasarkan dari hasil Kajian Penguatan Kelembagaan Dinas PUPR Kota Bogor, dapat dikatakan bahwa belum ada fungsi penataan ruang yang sudah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut dikarenakan pada Sub Bagian Penataan Ruang DPUPR Kota Bogor dengan keterbatasan SDM dan anggaran yang ada, tidak dapat melaksanakan keseluruhan fungsi penataan ruang, hanya sebagian fungsi yang dapat dilaksanakan.

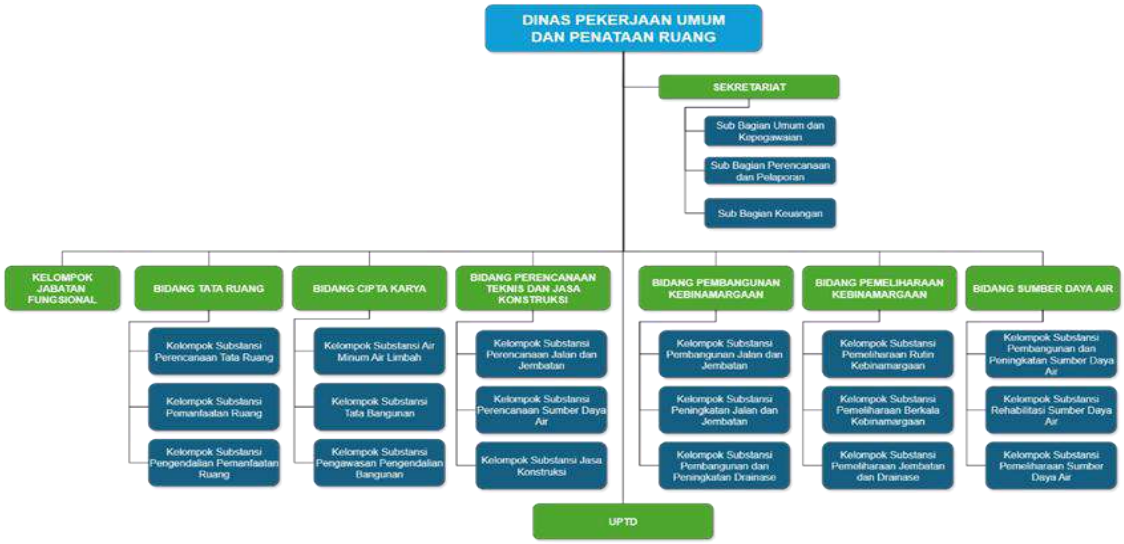
Rencana yang dilakukan adalah berupa peningkatan tipologi kelembagaan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bentuk dari Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bogor Struktur Organisasi Dinas berubah menjadi:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahi:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
   c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Tata Ruang membawahkan:
   a. Kelompok Substansi Perencanaan Tata Ruang;
   b. Kelompok Substansi Pemanfaatan Ruang;
   c. Kelompok Substansi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
4. Bidang Cipta Karya membawahkan:

a. Kelompok Substansi Air Minum Air Limbah;
b. Kelompok Substansi Tata Bangunan;
c. Kelompok Substansi Pengawasan Pengendalian Bangunan;

5. Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi membawahkan:
   a. Kelompok Substansi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
   b. Kelompok Substansi Perencanaan Sumber Daya Air;
   c. Kelompok Substansi Jasa Konstruksi;
6. Bidang Pembangunan Kebinamargaan membawahkan:
   a. Kelompok Substansi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
   b. Kelompok Substansi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
   c. Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Drainase;
7. Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan membawahkan:
   a. Kelompok Substansi Pemeliharaan Rutin Kebinamargaan;
   b. Kelompok Substansi Pemeliharaan Berkala Kebinamargaan;
   c. Kelompok Substansi Pemeliharaan Jembatan dan Drainase;
8. Bidang Sumber Daya Air membawahkan:
   a. Kelompok Substansi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air;
   b. Kelompok Substansi Rehabilitasi Sumber Daya Air;
   c. Kelompok Substansi Pemeliharaan Sumber Daya Air;
9. UPTD Pengelolaan Air Limbah Kelas A, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1-4.
Rencana Reformulasi Kelembagaan Dinas PUPR Kota Bogor



Kinerja DPUPR Kota Bogor masih lemah akibat struktur organisasi yang belum memadai, keterbatasan SDM, dan rendahnya efektivitas fungsi penataan ruang. Hal ini tercermin dari peringkat Kota Bogor yang berada di lima terbawah dalam penilaian kinerja penataan ruang Jawa Barat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor membutuhkan adanya reformulasi organisasi, peningkatan tipologi kelembagaan menjadi tipe A, serta penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan, sertifikasi, dan penempatan jabatan fungsional.

Langkah-langkah tersebut diperlukan DPUPR Kota Bogor dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang, memperkuat pelayanan publik, serta mendukung pembangunan Kota Bogor yang lebih terarah dan berkelanjutan

I.4.1. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsive, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan 5 (lima) tahun kedepan.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan

kebijakan publik kedalam langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas dan didukung dengan sarana dan prasarana yang berkondisi baik.

I.4.1.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 108 (seratus delapan orang) terdiri dari Pejabat struktural 11 (sebelas) orang, Jabatan Fungsional Tertentu 21 (dua puluh satu) orang dan Pelaksana 76 (tujuh puluh enam) orang.

Table 2.1.1.

Tabel Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia ASN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor

No.	Nama Jabatan	Kondisi ASN sampai Semester II 2025 (orang)			Kebutuhan SDM (orang)	Selisih Kebutuhan ASN (orang)		
		PNS	P3K	Total ASN	Total ASN	PNS	P3K	Total ASN
A	**Jabatan Struktural**							
1	Kepala Dinas	1	0	1	1	0	0	0
2	Sekretaris Dinas	1	0	1	1	0	0	0
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	0	1	1	0	0	0
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	0	1	1	0	0	0
5	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bangunan	1	0	1	1	0	0	0
6	Kepala Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi	1	0	1	1	0	0	0
7	Kepala Bidang Pembangunan Kebinamargaan	1	0	1	1	0	0	0
8	Kepala Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan	1	0	1	1	0	0	0
9	Kepala Bidang Sumber Daya Air	1	0	1	1	0	0	0
10	Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah	1	0	1	1	0	0	0
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	0	1	1	0	0	0
	Total	11	0	11	11	0	0	0
B	Jabatan Fungsional							

No.	Nama Jabatan	Kondisi ASN sampai Semester II 2025 (orang)			Kebutuhan SDM (orang)	Selisih Kebutuhan ASN (orang)		
		PNS	P3K	Total ASN	Total ASN	PNS	P3K	Total ASN
1	Perencana Ahli Muda	1	0	1	1	0	0	0
2	Perencana Ahli Pertama	0	0	0	1	1	0	1
3	Arsiparis Pertama	0	0	0	1	1	0	1
4	Arsiparis Terampil	0	0	0	1	1	0	1
5	Penata Ruang Ahli Pertama	1	2	3	3	0	0	0
6	Penata Ruang Ahli Muda	1	0	1	3	2	0	2
7	Penata Ruang Ahli Madya	0	0	0	1	1	0	1
8	Teknik Tata Bangunan Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	0	1	1	2	1	0	1
9	Teknik Tata Bangunan Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	2	0	2	4	2	0	2
10	Teknik Tata Bangunan Bangunan dan Perumahan Ahli Madya	0	0	0	2	2	0	2
11	Teknik Tata Bangunan Bangunan dan Perumahan Terampil	0	0	0	6	6	0	6
12	Teknik Tata Bangunan Bangunan dan Perumahan Mahir	0	0	0	6	6	0	6
13	Teknik Tata Bangunan Bangunan dan Perumahan Penyelia	0	0	0	6	6	0	6
14	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	0	0	0	2	2	0	2
15	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	1	0	1	2	1	0	1
16	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	0	0	0	1	1	0	1
17	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	0	3	3	10	7	0	7
18	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	5	0	5	10	5	0	5
19	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Madya	0	0	0	3	3	0	3
20	Teknik Pengairan Pertama	0	0	0	2	2	0	2
21	Teknik Pengairan Ahli Muda	3	0	3	3	0	0	0
22	Teknik Pengairan Terampil	0	0	0	3	3	0	3
23	Teknik Pengairan Mahir	0	0	0	3	3	0	3
24	Teknik Pengairan Penyelia	0	0	0	3	3	0	3
25	Teknik Jalan dan Jembatan Terampil	0	0	0	1	1	0	1
26	Teknik Jalan dan Jembatan Mahir	0	0	0	2	2	0	2

No.	Nama Jabatan	Kondisi ASN sampai Semester II 2025 (orang)			Kebutuhan SDM (orang)	Selisih Kebutuhan ASN (orang)		
		PNS	P3K	Total ASN	Total ASN	PNS	P3K	Total ASN
27	Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia	0	0	0	1	1	0	1
28	Teknik Pengairan Madya	0	0	0	1	1	0	1
29	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	0	0	0	4	4	0	4
30	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1	0	1	3	2	0	2
31	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	0	0	0	1	1	0	1
32	Teknik Penyehatan Lingkungan Terampil	0	0	0	3	3	0	3
33	Teknik Penyehatan Lingkungan Mahir	0	0	0	3	3	0	3
34	Teknik Penyehatan Lingkungan Penyelia	0	0	0	3	3	0	3
	Total	15	6	21	101	80	0	80
C	Jabatan Pelaksana							
1	Penelaah Teknis Kebijakan	12	0	12	23	11	0	11
2	Pengolah Data dan Informasi	1	0	1	4	3	0	3
3	Operator Alat Berat	0	0	0	3	3	0	3
4	Pengadministrasi Perkantoran	4	0	4	8	4	0	4
5	Operator Layanan Operasional	22	4	26	39	14	-1	13
6	Penata Layanan Operasional	6	4	10	17	7	0	7
7	Pengelola Layanan Operasional	4	1	5	23	19	-1	18
8	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan SDA	1	0	1	2	1	0	1
9	Penilik Jalan	14	0	14	23	9	0	9
10	Juru Operasi dan Pemeliharaan SDA	1	0	1	2	1	0	1
11	Operator Laboratorium	1	0	1	1	0	0	0
12	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	1	0	1	1	0	0	0
	Total	67	9	76	146	72	-2	70

Sumber: Hasil Analisis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, 2025

Dari data pada tabel di atas dapat kita lihat jika jumlah kekurangan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor masih banyak yaitu 150 orang (80 orang untuk jabatan fungsional, 70 orang untuk jabatan pelaksana), dimana jumlah kebutuhan seharusnya sebanyak 258 orang (11 orang untuk jabatan struktural, 101 orang untuk jabatan fungsional, dan 146 orang untuk

jabatan pelaksana), yang baru dapat di penuhi sebanyak 108 orang (11 orang untuk jabatan struktural, 21 orang untuk jabatan fungsional, dan 76 orang untuk jabatan pelaksana), kekurangan pegawai tersebut untuk saat ini masih di isi dengan tenaga Non ASN sebanyak 76 orang yang tersebar di berbagai bidang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum terdapat perbedaan antara kondisi eksisting jumlah ASN sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dengan kebutuhan ideal ASN yang telah ditetapkan pada jabatan-jabatan tertentu. Oleh karena itu, strategi pengadaan, redistribusi, dan pengembangan pegawai perlu diarahkan untuk menutup kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor 2025–2029, khususnya dalam konteks perencanaan manajemen ASN yang lebih efektif dan efisien"

Jika dilihat dari tingkat pendidikannya pegawai ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor terdiri dari, 2 orang berpendidikan Sekolah Dasar, 1 orang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), 39 orang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), 8 orang berpendidikan Diploma III (D-III), 1 orang berpendidikan Diploma IV (D-IV), 39 orang berpendidikan Sarjana (S-1), dan 15 orang berpendidikan Pasca Sarjana (Strata-2). Dengan beban kerja yang cukup berat, secara kuantitas dan kualitas belum dapat memadai. Maka dari itu demi terwujudnya pegawai atau aparatur yang kompeten dan berkualitas agar tujuan, visi, misi dapat terwujud atau tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas aparatur pegawai yang kreatif, profesional, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya yang kompeten, maka perlu disusunnya rencana kebutuhan pengembangan kompetensi yang selanjutnya dapat dilihat pada table di bawah:

Table 2.1.2.
Rencana Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Melalui Jalur Pendidikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor

No.	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Syarat Minimal Pendidikan	Jumlah Pegawai Eksisting	Jumlah Pegawai Eksisting yang Memenuhi Syarat Minimal Pendidikan	Jumlah Pegawai Eksisting Berdasarkan Pendidikan		Rekomendasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	S-1/D-IV	1	1	S-2/Pascasarjana	1	
2	Administrator	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	S-1/D-IV	1	1	S-2/Pascasarjana	1	
		Kepala Bidang Pembangunan Kebinamargaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	S-1/D-IV	1	1	S-1/Sarjana	1	
		Kepala Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	S-1/D-IV	1	1	S-1/Sarjana	1	
		Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	S-1/D-IV	1	1	S-2/Pascasarjana	1	
		Kepala Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	S-1/D-IV	1	1	S-1/Sarjana	1	
		Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	S-1/D-IV	1	1	S-1/Sarjana	1	
3	Pengawas	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	D-III/Sarjana Muda	1	1	S-2/Pascasarjana	1	

No.	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Syarat Minimal Pendidikan	Jumlah Pegawai Eksisting	Jumlah Pegawai Eksisting yang Memenuhi Syarat Minimal Pendidikan	Jumlah Pegawai Eksisting Berdasarkan Pendidikan		Rekomendasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*
		Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	D-III/Sarjana Muda	1	1	S-1/Sarjana	1	
		Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	D-III/Sarjana Muda	1	1	S-2/Pascasarjana	1	
		Kasubag Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	D-III/Sarjana Muda	1	1	S-1/Sarjana	1	
4	Fungsional	Perencana Ahli Muda	S-1/D-IV	1	1	S-1/Sarjana	1	
		Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	S-1/D-IV	5	5	S-1/Sarjana	2	
						S-2/Pascasarjana	3	
		Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	S-1/D-IV	3	3	S-1/Sarjana	3	
		Teknik Pengairan Ahli Muda	S-1/D-IV	3	3	S-1/Sarjana	1	
						S-2/Pascasarjana	2	
		Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	S-1/D-IV	1	1	S-1/Sarjana	1	
		Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	S-1/D-IV	2	2	S-1/Sarjana	1	
						S-2/Pascasarjana	1	
		Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	S-1/D-IV	1	1	S-1/Sarjana	1	
		Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	S-1/D-IV	1	1	S-1/Sarjana	1	
		Penata Ruang Ahli Muda	S-1/D-IV	1	1	S-1/Sarjana	1	
		Penata Ruang Ahli Pertama	S-1/D-IV	3	3	S-1/Sarjana	3	
5	Pelaksana	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	SMA/Sederajat	1	1	SMA/Sederajat	1	

No.	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Syarat Minimal Pendidikan	Jumlah Pegawai Eksisting	Jumlah Pegawai Eksisting yang Memenuhi Syarat Minimal Pendidikan	Jumlah Pegawai Eksisting Berdasarkan Pendidikan		Rekomendasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*
		PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	SMA/Sederajat	1	1	D-III/Diploma-III	1	
		Penata Layanan Operasional	SMA/Sederajat	10	10	SMA/Sederajat	1	
						S-1/Sarjana	8	
						S-2/Pascasarjana	1	
		Penelaah Teknis Kebijakan	SMA/Sederajat	12	12	D-IV/Diploma-IV	1	
						S-1/Sarjana	8	
						S-2/Pascasarjana	3	
		Pengadministrasi Perkantoran	SMA/Sederajat	4	4	SMA/Sederajat	4	
		Pengelola Layanan Operasional	SMA/Sederajat	6	6	D-III/Sarjana Muda	4	
						S-1/Sarjana	2	
		PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SMA/Sederajat	1	0	SD/Sederajat	1	Meningkatkan pendidikan ke jenjang SMA/Sederajat
		Pengolah Data dan Informasi	SMA/Sederajat	1	1	D-III/Sarjana Muda	1	
		Penilik Jalan	SMA/Sederajat	14	13	SMP/Sederajat	1	Meningkatkan pendidikan ke jenjang SMA/Sederajat
						SMA/Sederajat	13	
		Operator Laboratorium	SMA/Sederajat	1	1	D-III/Sarjana Muda	1	
		Operator Layanan Operasional	SMA/Sederajat	24	23	SD/Sederajat	1	Meningkatkan pendidikan ke jenjang SMA/Sederajat
						SMA/Sederajat	23	
		Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	SMA/Sederajat	1	1	D-III/Sarjana Muda	1	
Jumlah				108	105		108	

Sumber: Hasil Analisis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, 2025

Pada tabel di atas, terkait rencana pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan formal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, menggambarkan data yang mencakup jenis jabatan, nama jabatan, syarat minimal pendidikan, jumlah pegawai yang ada, kesesuaian pendidikan dengan persyaratan, serta rekomendasi pengembangan pendidikan lebih lanjut. Dengan demikian, pada tabel tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi aktual kualifikasi pendidikan pegawai sekaligus arah perbaikan yang diperlukan kedepannya. Syarat minimal Pendidikan sesuai dengan ketentuan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi Pedidikan berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4190/8-BM.02.01/SO/K/2024, tanggal 20 juni 2024, Hal: Pengukuran lndeks Profesionalitas ASN.

Pada tabel tersebut di atas, terlihat bahwa untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Adminstrator memiliki syarat minimal pendidikannya adalah S-1/D-IV. Untuk Jabatan Pengawas memiliki syarat minimal pendidikannya adalah D-III/Sarjana Muda. Untuk Jabatan Fungsional memiliki syarat minimal pendidikannya adalah S-1/D-IV atau D-III/Sarjana Muda. Dan untuk Jabatan Pelaksana syarat minimal pendidikannya adalah SMA/Sederajat.

Table 2.1.3.
Rencana Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Manusia Melalui Jalur Pelatihan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor

No.	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai Eksisting	Rencana Pelatihan Tahun 2025-2029	Jumlah Pegawai yang akan Mengikuti Pelatihan Tahun 2025-2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	1		
2	Administrator	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	1
				Pelatihan Teknis Penguatan Tugas-Tugas Sekretaris Perangkat Daerah	1
		Kepala Bidang Pembangunan Kebinamargaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	1	Pelatihan Teknis PPK Tipe B	1
		Kepala Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	1	Pelatihan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan	1
				Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan	1
		Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	1
				Pelatihan Teknis Penataan Ruang dan Bangunan	1
				Pelatihan Teknis PPK Tipe C	1
		Kepala Bidang Perencanaan Teknis dan Jasa Konstruksi pada	1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	1

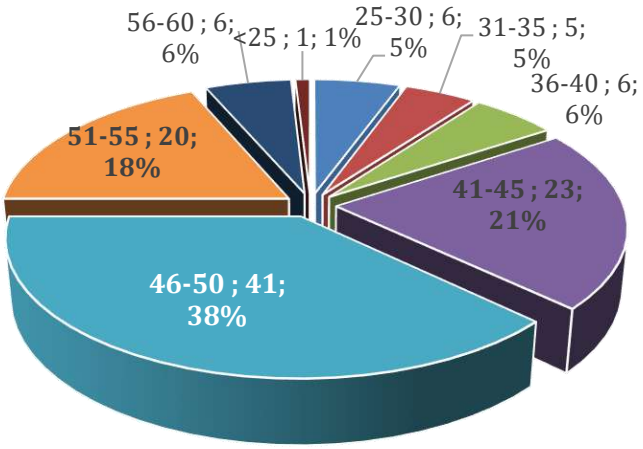
No.	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai Eksisting	Rencana Pelatihan Tahun 2025-2029	Jumlah Pegawai yang akan Mengikuti Pelatihan Tahun 2025-2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor			
				Pelatihan Teknis Bidang Konstruksi	1
				Pelatihan Teknis PPK Tipe C	1
		Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	1	Pelatihan Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air	1
				Pelatihan Teknis PPK Tipe B	1
3	Pengawas	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	1	Pelatihan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	1
		Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	1	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	1
				Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	1
		Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	1	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	1
				Pelatihan Teknis Konvensi Hak Anak	1
				Pelatihan Teknis PBJ Dasar	1
				Pelatihan Teknis Pengelolaan dan Pengolahan Air Limbah	1
				Pelatihan Teknis Pengolahan Lumpur Tinja	1
		Kasubag Tata Usaha UPTD Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	1	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	1
				Pelatihan Teknis Ketatausahaan	1

No.	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai Eksisting	Rencana Pelatihan Tahun 2025-2029	Jumlah Pegawai yang akan Mengikuti Pelatihan Tahun 2025-2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Pelatihan Teknis PBJ Dasar	1
4	Fungsional	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	1	Pelatihan Fungsional Pembina Jasa Kontruksi Ahli Muda	1
				Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Pembina Jasa Kontruksi	1
		Penata Ruang Ahli Muda	1	Pelatihan Fungsional Penata Ruang	1
		Penata Ruang Ahli Pertama	3	Pelatihan Fungsional Penata Ruang	1
				Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Penata Ruang	1
		Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	5	Pelatihan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan	5
				Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan	3
		Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	3	Pelatihan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan	3
				Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan	2
		Teknik Pengairan Ahli Muda	3	Pelatihan Fungsional Teknik Pengairan	3
				Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Teknik Pengairan	2
		Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	1	Pelatihan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan	1
				Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan	1
				Pelatihan Teknis Konvensi Hak Anak	1
		Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	2	Pelatihan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	2
				Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	2
		Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	1	Pelatihan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	1

No.	Jenis Jabatan	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai Eksisting	Rencana Pelatihan Tahun 2025-2029	Jumlah Pegawai yang akan Mengikuti Pelatihan Tahun 2025-2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	1
5	Pelaksana	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	1	Pelatihan Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air	1
		Operator Layanan Operasional	24	Pelatihan Teknis Administrasi Perkantoran	2
				Pelatihan Teknis Pemeliharaan Sarpras	16
		Penelaah Teknis Kebijakan	12	Pelatihan Teknis Jalan dan Jembatan	3
				Pelatihan Teknis Manajemen Alat Berat	2
				Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	2
				Pelatihan Teknis Pengembangan Infrastruktur	2
		Penata Layanan Operasional	10	Pelatihan Teknis Bangunan dan Gedung	2
				Pelatihan Teknis Perumahan dan Permukiman	1
				Pelatihan Teknis Tata Bangunan dan Permukiman	1
		Pengadministrasi Perkantoran	4	Pelatihan Teknis Administrasi Perkantoran	3
				Pelatihan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	1
		Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	1	Pelatihan Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air	1
		Pengelola Layanan Operasional	6	Pelatihan Teknis Jalan dan Jembatan	2
				Pelatihan Teknis Lingkungan Hidup	1
				Pelatihan Teknis Pengelolaan Tata Bangunan Pemerintahan	1
				Pelatihan Teknis Survey Infrastruktur	1
		Penilik Jalan	14	Pelatihan Teknis Perawatan dan Pemeliharaan Jalan	14
Jumlah			103		112

Sumber: Hasil Analisis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, 2025

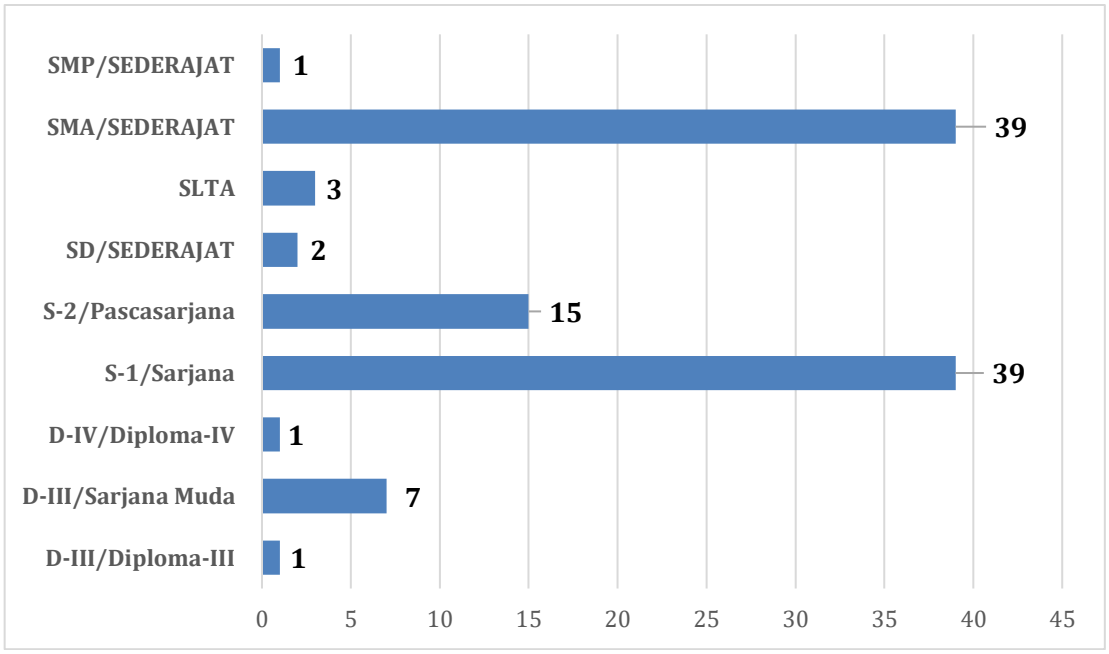
Gambar 2.1-5.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia



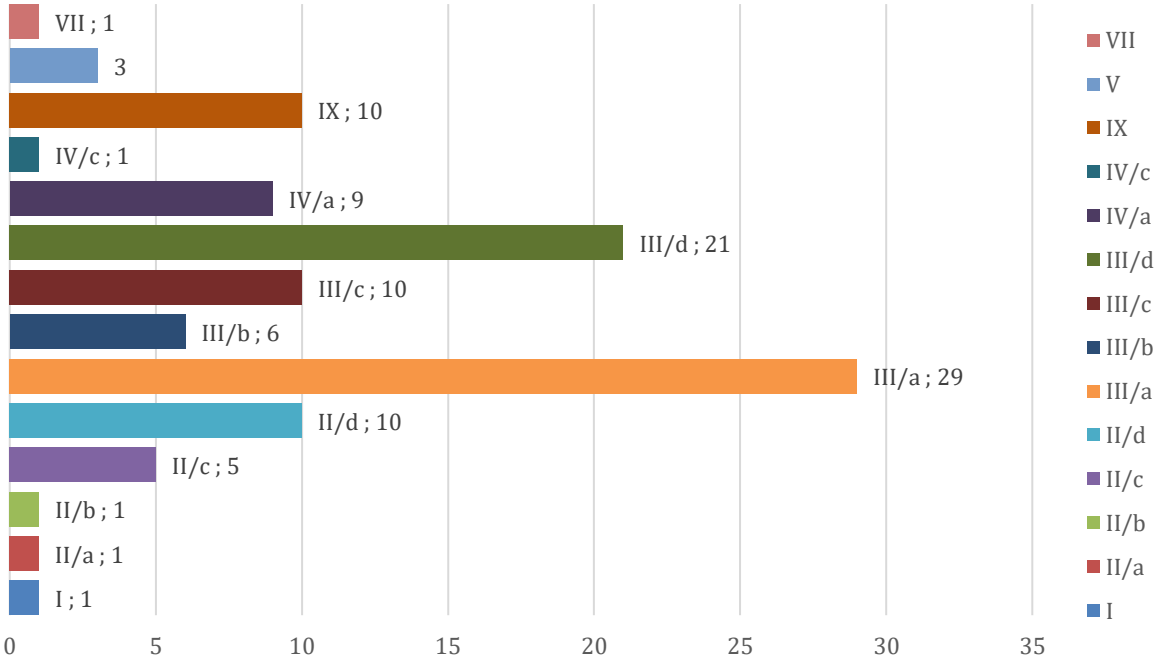
USIA	Jumlah
25-30	6
31-35	5
36-40	6
41-45	23
46-50	41
51-55	20
56-60	6
<25	1
Jumlah	**108**

Berdasarkan data pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor yang bersumber dari Simpeg (Sistem Informasi Pegawai) Kota Bogor, perlu menjadi perhatian bahwa untuk pegawai dengan usia mendekati pensiun sebanyak 6 orang (6%). Jumlah pegawai yang aktif pada tahun 2025 masih belum merata dan kurang, dibandingkan dengan beban kerja.

Gambar 2.1-6.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Gambar 2.1-7.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kerja



I.4.1.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, setiap perangkat daerah membutuhkan dukungan sarana dan prasarana agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, memastikan kelancaran dan kualitas pelayanan publik, mempermudah koordinasi antar unit, meningkatkan kenyamanan dan kepuasan kerja pegawai, serta memperpanjang umur pakai aset melalui pemeliharaan yang baik, adapun rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat dalam kelengkapan sarana dan prasarana dan rencana kebutuhan barang dan inventaris kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan Tahun 2029 dapat di lihat pada tabel berikut:

Table 2.1.4.
Tabel Rencana Pemenuhan Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor

No.	Jenis Sarana prasarana	Nama Barang Merk / Type	Kondisi sampai dengan 2025 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tandam Roller / Stoom Wales	Terrex - V2203-EU4 (2011)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
2	Tandam Roller / Stoom Wales	Terrex - V2313-EU7 (2011)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
3	Tandam Roller / Stoom Wales	Sakai - D1703-MDI-EF03 (2018)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
4	Tandam Roller / Stoom Wales	HAMM-H1396460 (2009)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
5	Tandam Roller / Stoom Wales	HAMM-7JJ2734 (2010)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
6	Tandam Roller / Stoom Wales	HAMM 3410 SmoothDrum (2013)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
7	Tandam Roller / Stoom Wales	Sakai SW5025-1 DOUBLE(2018)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2
8	Tyre Rolller	Sakai 1SW43-25375 (2018)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
9	Whell Excavator (Roda Ban)	Volvo EW 45 B Prime (2010)	1	0	0	0	0	1	0	1	0	2
10	Beckho Loader	Terrex 820 (2010)	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
11	Beckho Loader	New Holland B90B (2017)	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3
12	Skid Loader	Case 430 S (2010)	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
13	Excavator Amphibius	Komatsu Gtrax PV 130F (2014)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
14	Mini Excavator (Trex Besi)	Hyundai 35z-7A (2014)	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3

No.	Jenis Sarana prasarana	Nama Barang Merk / Type	Kondisi sampai dengan 2025 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15	Finisher	VOGELE Super 800-3 (2024)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
16	Cold Milling	Wirtgen W 55 HR (2024)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
17	Mesin Sikat Trotoar	MMG CYLINDRICAL(2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
18	Mesin Sikat Trotoar	MMG CYLINDRICAL (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
19	Dumptruck	Toyota Dyna HT 130 DS (2010)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
20	Dumptruck	Toyota Dyna HT 130 DS (2010)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
21	Dumptruck	Toyota Dyna HT 130 DS (2010)	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
22	Dumptruck	HINO Dumptruck (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
23	Dumptruck	HINO Dumptruck (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
24	Dumptruck	HINO Dumptruck (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
25	Pick Up	Hilux Standar Single Cabin (2010)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
26	Pick Up	Carry Mini Dump (2018)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
27	Pick Up	Carry Mini Dump (2018)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
28	Pick Up	ISUZU TRAGA/PHR54U-CAAIN1 4X2 MT	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2

No.	Jenis Sarana prasarana	Nama Barang Merk / Type	Kondisi sampai dengan 2025 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
29	Pick Up	ISUZU TRAGA/PHR54U-CAAIN1 4X2 MT	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
30	Pick Up	ISUZU TRAGA/PHR54U-CAAIN1 4X2 MT	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
31	Pick Up	ISUZU TRAGA/PHR54U-CAAIN1 4X2 MT	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
32	Pick Up	ISUZU TRAGA/PHR54U-CAAIN1 4X2 MT	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
33	Pick Up	ISUZU TRAGA/PHR54U-CAAIN1 4X2 MT	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
34	Pick Up	ISUZU TRAGA/PHR54U-CAAIN1 4X2 MT	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
35	Pick Up	Toyota Dyna Lightruck (2010)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
36	Pick Up	Toyota Hillux Double Cabin (2010)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
37	Pick Up	TBR 54 PICKUP TURBO (2006)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
38	Pick Up	ISUZU ELF NLR (2022)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
39	Mobil/Tangki Tinja	Dyno Rino LT (2003)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2

No.	Jenis Sarana prasarana	Nama Barang Merk / Type	Kondisi sampai dengan 2025 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
40	Mobil/Tangki Tinja	Mobil Tinja L 300 Pick Up Flat Deck (4x2) M/T 1-1,5 M3 Modifikasi (2018)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
41	Mobil/Tangki Tinja	Mobil Tinja L 300 Pick Up Flat Deck (4x2) M/T 1-1,5 M3 Modifikasi (2018)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
42	Mobil/Tangki Tinja	Hino (2021)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
43	Mobil/Tangki Tinja	HINO/XZU349R-HKMTB03 (LIGHT TRUCK TANGKI) (2023)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
44	Mobil/Tangki Tinja	Hino (2021)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
45	Mobil/Tangki Tinja	Truk Jetter Combi Kecil (2015)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
46	Bis Toilet	Bis Toilet (2014)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
47	Self Loader / Theiler Truck	Hino Self Loader (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
48	Isuzu Box	Isuzu Panther Box (2006)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
49	cren truck	Toyota Dyna (2018)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2
50	Minibus	Toyota Kijang KF.70 STANDAR (2003)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
51	Minibus	Toyota Kijang KF.70 STANDAR (2003)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

No.	Jenis Sarana prasarana	Nama Barang Merk / Type	Kondisi sampai dengan 2025 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
52	Minibus	Suzuki Ertiga 1,4 RAC DX MT (2015)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
53	Minibus	Toyota Rush (2016)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
54	Minibus	Toyota Rush (2016)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
55	Minibus	Toyota Rush (2016)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
56	Minibus	Toyota Rush (2016)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
57	Minibus	Mitshubishi Expander (2018)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
58	Minibus	Toyota Avanza (2009)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
59	Multi Purpose Vehicle (MPV	Innova Zenix 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
60	Sepeda motor	Yamaha LEXI (2018)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
61	Sepeda motor	Yamaha LEXI (2018)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
62	Sepeda motor	Yamaha LEXI (2018)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
63	Sepeda motor	Yamaha LEXI (2018)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
64	Sepeda motor	Yamaha LEXI (2018)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
65	Sepeda motor	Yamaha LEXI (2018)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
66	Sepeda motor	Yamaha EROX (2016)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
67	Sepeda motor	Yamaha YUPITER (2016)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
68	Sepeda motor	SUZUKI NEW SMASH (2007)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
69	Sepeda motor	SUZUKI NEW SMASH (2007)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
70	Sepeda motor	YAMAHA MIO (2014)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

No.	Jenis Sarana prasarana	Nama Barang Merk / Type	Kondisi sampai dengan 2025 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
71	Sepeda motor	Honda BLADE (2014)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
72	Sepeda motor	Honda BLADE (2014)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
73	Sepeda motor	HONDA Vario (2015)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
74	Sepeda motor	HONDA Vario (2015)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
75	Sepeda motor	HONDA Vario (2015)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
76	Sepeda motor	Yamaha EROX (2016)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
77	Sepeda motor	Yamaha YUPITER (2016)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
78	Sepeda motor	Yamaha YUPITER (2016)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
79	Sepeda motor	Yamaha YUPITER (2016)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
80	Sepeda motor	Yamaha EXRIDE (2016)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
81	Sepeda motor	Yamaha EXRIDE (2016)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
82	Sepeda motor	Yamaha EXRIDE (2016)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
83	Sepeda motor	Yamaha EXRIDE (2016)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
84	Sepeda motor	Honda SUPRA X (2014)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
85	Sepeda motor	Yamaha EROX (2016)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
86	Sepeda motor	Yamaha EROX (2016)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
87	Sepeda motor	Yamaha YUPITER (2016)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
88	Sepeda motor	Yamaha YUPITER (2016)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

No.	Jenis Sarana prasarana	Nama Barang Merk / Type	Kondisi sampai dengan 2025 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
89	Sepeda motor	Yamaha YUPITER (2016)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
90	Sepeda motor	Honda BLADE (2014)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
91	Sepeda motor	Honda BEAT (2011)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
92	Sepeda motor	Honda BEAT (2011)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
93	Sepeda motor	Honda REVO (2011)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
94	Sepeda motor	Honda REVO (2011)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
95	Sepeda motor	Suzuki NEX (2012)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
96	Sepeda motor	Honda SCOOPY (2014)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
97	Sepeda motor	Honda Supra X 125 F1 CW (2015)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
98	Sepeda motor	Honda Supra X 125 F1 CW (2015)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
99	Sepeda motor	Yamaha MIO GT (2014)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
100	Sepeda motor	Honda New Vario 125 ESP CBS (2015)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
101	Sepeda motor	Honda New Vario 125 ESP CBS (2015)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
102	Sepeda motor	Honda Vario E1F02N11M2 A/T (2017)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
103	Sepeda motor	Yamaha Yupiter (2017)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
104	P.C. Unit	Lenovo D.186 WA 2580-ABI (2013)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

No.	Jenis Sarana prasarana	Nama Barang Merk / Type	Kondisi sampai dengan 2025 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
105	P.C. Unit	Asus Deskstop M51 AD-1D001D (2014	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
106	P.C. Unit	Computer accer i3 (2015)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
107	P.C. Unit	Computer accer i3 (2015)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
108	P.C. Unit	Computer accer i3 (2015)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
109	P.C. Unit	Computer accer i3 (2015)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
110	P.C. Unit	Computer accer i3 (2015)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
111	P.C. Unit	Computer accer i3 (2015)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
112	P.C. Unit	Computer accer i3 (2015)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
113	P.C. Unit	Computer accer i3 (2015)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
114	P.C. Unit	Computer accer i3 (2015)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
115	P.C. Unit	PC Hp all in One (2016)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
116	P.C. Unit	PC Hp all in One (2016)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
117	P.C. Unit	Acer Processor (2010)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
118	P.C. Unit	LENOVO H30-50 FID (2015)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
119	P.C. Unit	LENOVO H30-50 FID (2015)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
120	P.C. Unit	PC Intel core i3-7100T, (2017)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

No.	Jenis Sarana prasarana	Nama Barang Merk / Type	Kondisi sampai dengan 2025 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
121	P.C. Unit	PC Intel core i3-7100T, (2017)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
122	P.C. Unit	PC Biasa (HP All in One 20 c303d)(2018)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
123	P.C. Unit	PC Biasa (HP All in One 20 c303d)(2018)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
124	P.C. Unit	PC Biasa (HP All in One 20 c303d)(2018)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
125	P.C. Unit	PC Biasa (HP All in One 20 c303d)(2018)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
126	P.C. Unit	PC Biasa (HP All in One 20 c303d)(2018)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
127	P.C. Unit	PC Biasa (HP All in One 20 c303d)(2018)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
128	P.C. Unit	PC Biasa (HP All in One 20 c303d)(2018)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
129	P.C. Unit	PC Biasa (HP All in One 20 c303d)(2018)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
130	P.C. Unit	PC Biasa (HP All in One 20 c303d)(2018)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
131	P.C. Unit	PC Biasa (HP All in One 20 c303d)(2018)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
132	P.C. Unit	Processor Core i7 7700 (2018)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
133	P.C. Unit	Processor Core i7 7700 (2018)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
134	P.C. Unit	Lenovo Idea Centre H320992 (2012)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

No.	Jenis Sarana prasarana	Nama Barang Merk / Type	Kondisi sampai dengan 2025 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
135	P.C. Unit	Lenovo H520s-6799 (2013)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
136	P.C. Unit	AiO PC, processor: intel core i7 (2019)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
137	P.C. Unit	AiO PC, processor: intel core i7 (2019)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
138	P.C. Unit	AiO PC, processor: intel core i7 (2019)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
139	P.C. Unit	AiO PC, processor: intel core i7 (2019)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
140	P.C. Unit	AiO PC, processor: intel core i7 (2019)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
141	P.C. Unit	AiO PC, processor: intel core i7 (2019)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
142	P.C. Unit	AiO PC, processor: intel core i7 (2019)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
143	P.C. Unit	AiO PC, processor: intel core i7 (2019)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
144	P.C. Unit	Lenovo (2019)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
145	P.C. Unit	Lenovo MSI (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
146	P.C. Unit	Lenovo MSI (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
147	P.C. Unit	Lenovo MSI (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
148	P.C. Unit	Lenovo MSI (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
149	P.C. Unit	Lenovo MSI (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
150	P.C. Unit	Lenovo MSI (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
151	P.C. Unit	Lenovo MSI (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
152	P.C. Unit	Lenovo MSI (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

No.	Jenis Sarana prasarana	Nama Barang Merk / Type	Kondisi sampai dengan 2025 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
153	P.C. Unit	Lenovo MSI (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
154	P.C. Unit	Lenovo MSI (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
155	P.C. Unit	Lenovo MSI (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
156	P.C. Unit	Lenovo MSI (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
157	P.C. Unit	Lenovo MSI (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
158	P.C. Unit	Lenovo MSI (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
159	P.C. Unit	HP 280 PRO G 9 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
160	P.C. Unit	HP 280 PRO G 9 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
161	P.C. Unit	HP 280 PRO G 9 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
162	P.C. Unit	HP 280 PRO G 9 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
163	P.C. Unit	HP 280 PRO G 9 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
164	P.C. Unit	HP 280 PRO G 9 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
165	P.C. Unit	HP 280 PRO G 9 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
166	P.C. Unit	HP 280 PRO G 9 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
167	P.C. Unit	HP 280 PRO G 9 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
168	P.C. Unit	HP 280 PRO G 9 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

No.	Jenis Sarana prasarana	Nama Barang Merk / Type	Kondisi sampai dengan 2025 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
169	P.C. Unit	Lenovo Desktop ThinkCenter neo 60a24 Gen4 12K8CT01WW (2023)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
170	P.C. Unit	Lenovo Desktop ThinkCenter neo 60a24 Gen4 12K8CT01WW (2023)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
171	P.C. Unit	Lenovo Desktop ThinkCenter neo 60a24 Gen4 12K8CT01WW (2023)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
172	P.C. Unit	Lenovo Desktop ThinkCenter neo 60a24 Gen4 12K8CT01WW (2023)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
173	P.C. Unit	Lenovo Desktop ThinkCenter neo 60a24 Gen4 12K8CT01WW (2023)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
174	P.C. Unit	Lenovo Desktop ThinkCenter neo 60a24 Gen4 12K8CT01WW (2023)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
175	P.C. Unit	Lenovo Desktop ThinkCenter neo 60a24 Gen4 12K8CT01WW (2023)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

No.	Jenis Sarana prasarana	Nama Barang Merk / Type	Kondisi sampai dengan 2025 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
176	P.C. Unit	Lenovo Desktop ThinkCenter neo 60a24 Gen4 12K8CT01WW (2023)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
177	P.C. Unit	Lenovo Desktop ThinkCenter neo 60a24 Gen4 12K8CT01WW (2023)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
178	P.C. Unit	Lenovo Desktop ThinkCenter neo 60a24 Gen4 12K8CT01WW (2023)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
179	P.C. Unit	Lenovo Desktop ThinkCenter neo 60a24 Gen4 12K8CT01WW (2023)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
180	P.C. Unit	Lenovo Desktop ThinkCenter neo 60a24 Gen4 12K8CT01WW (2023)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
181	P.C. Unit	Lenovo Desktop ThinkCenter neo 60a24 Gen4 12K8CT01WW (2023)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
182	P.C. Unit	Lenovo Desktop ThinkCenter neo 60a24 Gen4 12K8CT01WW (2023)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

No.	Jenis Sarana prasarana	Nama Barang Merk / Type	Kondisi sampai dengan 2025 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
183	P.C. Unit	Lenovo Desktop ThinkCenter neo 60a24 Gen4 12K8CT01WW (2023)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
184	P.C. Unit	ACER VERITON Z4 AOI -I5 (2024)	1	0	0	0	4	4	4	4	4	21
185	P.C. Unit	ACER VERITON Z4 AOI -I5 (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
186	P.C. Unit	ACER VERITON Z4 AOI -I5 (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
187	P.C. Unit	ACER VERITON Z4 AOI -I5 (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
188	P.C. Unit	ACER VERITON Z4 AOI -I5 (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
189	P.C. Unit	ACER VERITON Z4 AOI -I5 (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
190	P.C. Unit	ACER VERITON Z4 AOI -I5 (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
191	P.C. Unit	ACER VERITON Z4 AOI -I5 (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
192	P.C. Unit	ACER VERITON Z4 AOI -I5 (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
193	P.C. Unit	ACER VERITON Z4 AOI -I5 (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
194	Printer	Inkjet A3 HP OfficeJet (2015)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
195	Printer	L360/Epson (2016)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
196	Printer	Epson L220 (2016)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

No.	Jenis Sarana prasarana	Nama Barang Merk / Type	Kondisi sampai dengan 2025 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
197	Printer	Printer laserjet Fuji Xerox CP115 w, (2017)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
198	Printer	Printer laserjet Fuji Xerox CP115 w, (2017)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
199	Printer	Printer A3 (Brother MFC-J5910DW)(2014)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
200	Printer	Epson L 1300 Infus (2018)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
201	Printer	Epson L 1300 Infus (2018)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
202	Printer	Epson L 1300 Infus (2018)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
203	Printer	Epson L 1300 Infus (2018)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
204	Printer	Epson L 1300 Infus (2018)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
205	Printer	Epson L 1300 Infus (2018)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
206	Printer	Epson L 1300 Infus (2018)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
207	Printer	Epson L 1300 Infus (2018)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
208	Printer	Epson L 1300 Infus (2018)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
209	Printer	Epson L 1300 Infus (2018)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
210	Printer	Cannon Pixma IP 110 Portable (2018)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
211	Printer	Cannon Pixma IP 110 Portable (2018)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

No.	Jenis Sarana prasarana	Nama Barang Merk / Type	Kondisi sampai dengan 2025 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
212	Printer	Epson L210 (2016)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
213	Printer	Epson L210 (2016)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
214	Printer	Epson L1800 (2019)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
215	Printer	Epson L1800 (2019)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
216	Printer	Epson L1800 (2019)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
217	Printer	Epson L1800 (2019)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
218	Printer	Epson L1800 (2019)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
219	Printer	Epson L4260 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
220	Printer	Epson L4260 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
221	Printer	Epson L4260 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
222	Printer	Epson L4260 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
223	Printer	Epson L4260 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
224	Printer	Epson L4260 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
225	Printer	Epson L4260 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
226	Printer	Epson L4260 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
227	Printer	Epson L4260 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
228	Printer	Epson L4260 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
229	Printer	Epson L4260 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
230	Printer	Epson L4260 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
231	Printer	Epson L4260 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
232	Printer	Epson L4260 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
233	Printer	Epson L4260 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
234	Printer	Epson L4260 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

No.	Jenis Sarana prasarana	Nama Barang Merk / Type	Kondisi sampai dengan 2025 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
235	Printer	Epson L4260 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
236	Printer	Epson L4260 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
237	Printer	Epson ECOTANK L6460 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
238	Printer	Epson ECOTANK L6460 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
239	Printer	Epson ECOTANK L6460 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
240	Printer	Epson ECOTANK L6460 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
241	Printer	Epson ECOTANK L6460 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
242	Printer	Epson ECOTANK L6460 (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
243	Printer	HP SMART TANK 615 (2023)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
244	Printer	HP SMART TANK 615 (2023)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
245	Printer	HP Ink Tank Wireless 415 mm (2024)	1	0	0	0	5	5	5	5	5	26
246	Printer	EPSON L6260 (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
247	Printer	EPSON L6260 (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
248	Printer	EPSON L6260 (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
249	Printer	EPSON L6260 (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
250	Printer	Epson L15160 (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
251	Printer	Epson L15160 (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
252	Printer	Epson L15160 (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

No.	Jenis Sarana prasarana	Nama Barang Merk / Type	Kondisi sampai dengan 2025 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
253	Printer	Epson L15160 (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
254	Lap Top	Assus A550CC-XX470D Core i5 (2014)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
255	Lap Top	Assus A550CC-XX470D Core i5 (2014)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
256	Lap Top	LAPTOP GAMBAR sarfest book (2016)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
257	Lap Top	acer aspire (2018)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
258	Lap Top	acer aspire (2018)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
259	Lap Top	acer aspire (2018)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
260	Lap Top	Azus (2019)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
261	Lap Top	Azus (2019)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
262	Lap Top	HP SPECTRE X360 (2021)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
263	Lap Top	THINKPAD L13 GEN2 i7 16G 1T 10P (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
264	Lap Top	THINKPAD L13 GEN2 i7 16G 1T 10P (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
265	Lap Top	THINKPAD L13 GEN2 i7 16G 1T 10P (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
266	Lap Top	THINKPAD L13 GEN2 i7 16G 1T 10P (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
267	Lap Top	THINKPAD L13 GEN2 i7 16G 1T 10P (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
268	Lap Top	THINKPAD L13 GEN2 i7 16G 1T 10P (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

No.	Jenis Sarana prasarana	Nama Barang Merk / Type	Kondisi sampai dengan 2025 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
269	Lap Top	THINKPAD L13 GEN2 i7 16G 1T 10P (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
270	Lap Top	MSI KATANA 15B13V (2023)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
271	Lap Top	MSI KATANA 15B13V (2023)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
272	Lap Top	MSI KATANA 15B13V (2023)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
273	Lap Top	MSI KATANA 15B13V (2023)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
274	Lap Top	MSI KATANA 15B13V (2023)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
275	Lap Top	MSI KATANA 15B13V (2023)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
276	Lap Top	HP.840 G5, CORE i5 (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
277	Lap Top	LENOVO YOGA (2025)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
278	Note Book	Toshiba Sattelite (2012)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
279	Note Book	Toshiba Sattelite (2012)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
280	Note Book	Toshiba Sattelite (2012)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
281	Note Book	ASSUS SLIM BOOK (2013)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
282	Note Book	Notebook Intel Core i7 (2015)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
283	Note Book	Note Book/PC Tablet Acer (2016)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

No.	Jenis Sarana prasarana	Nama Barang Merk / Type	Kondisi sampai dengan 2025 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
284	Note Book	Note Book (2014)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
285	Note Book	Note Book (2014)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
286	Note Book	Lenovo IdeaPad Y410P 1919 (2014)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
287	Note Book	Dell Latitude 3410 (2021)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
288	Note Book	Dell Latitude 3410 (2021)	1	0	0	0	3	3	3	3	3	16
289	Note Book	ASUS NOTEBOOK (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
290	Note Book	ASUS NOTEBOOK (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
291	Note Book	ASUS NOTEBOOK (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
292	Note Book	ASUS NOTEBOOK (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
293	Note Book	Dell Intel Xeon E3 (2018)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
294	Note Book	Dell Intel Xeon E3 (2018)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
295	Drone Pemetaan/Mapping (CCTV)	DJI Phantom 4 Pro Obsidian (2018)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
296	Drone Pemetaan/Mapping (CCTV)	DJI Phantom 4 Pro Obsidian (2018)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
297	Drone Pemetaan/Mapping (CCTV)	DJI Matrice 600 (2018	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
298	Drone Pemetaan/Mapping (CCTV)	Dji Phantom 4 Part 62 intelogent flight (2022)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

No.	Jenis Sarana prasarana	Nama Barang Merk / Type	Kondisi sampai dengan 2025 (Unit)			Rencana Pengadaan (Unit)						Jumlah Akhir 2030
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
299	Drone Pemetaan/Mapping (CCTV)	DJI MAVIC 3 CLASSIC (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
300	Drone Pemetaan/Mapping (CCTV)	DJI MAVIC 3 CLASSIC (2024)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Table 2.1.5.
Tabel Rekapitulasi Inventaris Barang Milik Daerah (Jalan / Jaringan / Irigasi) Tahun 2025

No	Jenis Barang / Nama Barang	Konstruksi	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m2)	Jumlah	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	
1	Bak Penampung/ Kolam/Menara Penampungan	Irigasi	115,00	1,00	115,00	1	Bangunan
2	Bak Penampung/ Kolam/Menara Penampungan	BAK			70,00	1	Bangunan
3	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi)	TPT	7,00	2,00	14,00	1	Bangunan
4	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi)	Saluran Air			100,00	1	Bangunan
5	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi)	Saluran	10,00	2,00	20,00	1	Bangunan
6	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi)	Drainase			250,00	2	Bangunan
7	Bangunan Hidran Umum	Bangunan	5,00	2,00	5,00	2	Bangunan
8	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air)	Jembatan	2,00	4,00	8,00	1	Bangunan
9	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air)	Jembatan	412,00	129,50	1.877,50	14	Bangunan
10	Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air)	TPT				1	Bangunan
11	Bangunan Jembatan Penghalang (Bangunan Pelengkap Pasang Surut)	Jembatan	258,00	70,75	1.511,25	22	Bangunan
12	Bangunan Pelimpah Sampah	Bangunan	-	-	170,00	2	Bangunan
13	Bangunan Pemecah Gelombang	Drainase		3.940,00	138,00	1	Bangunan
14	Bangunan Pemecah Gelombang	Irigasi	12,00	2,00	24,00	1	Bangunan

No	Jenis Barang / Nama Barang	Konstruksi	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m2)	Jumlah	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	
15	Bangunan Pemecah Gelombang	saluran		1.299,00	87,00	1	Bangunan
16	Bangunan Pemecah Gelombang	Saluran Air	14,00	4,50	63,00	1	Bangunan
17	Bangunan Pemecah Gelombang	TALUD	8,00	3,00	24,00	1	Bangunan
18	Bangunan Pemecah Gelombang	TPT	1.875,50	139,20	13.932,90	145	Bangunan
19	Bangunan Pemecah Gelombang	Turap	434,50	2.546,00	1.460,00	8	Bangunan
20	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	Bangunan	-	-	2.829,00	13	Bangunan
21	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	Bendungan			4.782,00	1	Bangunan
22	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	Drainase	216,00	5,30	248,29	4	Bangunan
23	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	Jalan	-	-	166,00	3	Bangunan
24	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	Jembatan			1.500,00	1	Bangunan
25	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	TPT	20.693,15	2.181,00	4.485,00	1.032	Bangunan
26	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	Turap	55,00	1.928,00	205,00	2	Bangunan
27	Bangunan Penguat Tebing/Pantai		36,10	2,87	43,60	2	Bangunan
28	Bangunan Talang (Bangunan Pelengkap Irigasi)	TALUD			20,00	1	Bangunan
29	Bangunan Talang (Bangunan Pelengkap Irigasi)	Saluran Air			79,60	1	Bangunan
30	Bangunan Talang (Bangunan Pelengkap Irigasi)	TPT	10,00	4,00	40,00	1	Bangunan
31	Bangunan Waduk	IRIGASI			80,00	1	Bangunan
32	Bendung	Bangunan			5,00	1	Bendungan
33	Bendung	Bendungan	371,00	8,30	3.370,40	20	Bendungan
34	Bendung	IRIGASI	20,00	2,30	116,00	2	Bendungan
35	Bendung	Saluran Air	8,00	2,00	388,00	6	Bendungan
36	Bendung	TPT	139,00	7,00	527,50	2	Bendungan
37	Dst Bangunan Air Irigasi Lainnya	Saluran Air	250,00	4,00	251,00	5	Bangunan
38	Dst Bangunan Air Irigasi Lainnya	IPAL	100,00	1,00	100,00	1	Bangunan
39	Dst Bangunan Air Kotor Lainnya	Bangunan	-	-	367,00	3	Bangunan

No	Jenis Barang / Nama Barang	Konstruksi	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m2)	Jumlah	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	
40	Dst Bangunan Air Kotor Lainnya	Drainase			1,00	1	Bangunan
41	Dst Bangunan Air Kotor Lainnya	Saluran	5.511,20	20,01	6.650,37	30	Bangunan
42	Dst Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	Bangunan	-	-	1.136,00	4	Bangunan
43	Dst Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	Drainase			573,00	1	Bangunan
44	Dst Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	Jalan	-	-	63,00	2	Bangunan
45	Dst Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	Saluran Air	475,00	4,40	33.068,00	233	Bangunan
46	Dst Bangunan Pembuang Air Kotor	Saluran	34.503,59	172,53	24.890,49	250	Bangunan
47	Dst Bangunan Pembuang Air Kotor	Saluran Drainase	2.898,69	19,73	2.595,71	30	Bangunan
48	Dst Bangunan Pembuang Air Kotor	TPT	164,10	0,60	196,92	1	Bangunan
49	Dst Bangunan Pembuang Air Kotor		-	-	-	5	Bangunan
50	Dst Bangunan Pembuang Irigasi	Drainase	-	-	3.440,00	3	Bangunan
51	Dst Bangunan Pembuang Irigasi	Irigasi	80,00	5,00	504,97	5	Bangunan
52	Dst Bangunan Pembuang Irigasi	Saluran Air	-	-	43.831,20	32	Bangunan
53	Dst Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	Saluran Air	179,00	-	-	2	Bangunan
54	Dst Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	Bangunan	3,00	5,00	15,00	3	Bangunan
55	Dst Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	IPAL	14,50	5,20	262,25	2	Bangunan
56	Dst Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	Saluran	75,00	1,00	75,00	1	Bangunan
57	Dst Bangunan Pengaman Air Kotor	Saluran	157,00	1,00	157,00	1	Bangunan
58	Dst Bangunan Pengaman Air Kotor	Pagar Pengaman Ipal				1	Bangunan
59	Dst Bangunan Pengaman Irigasi	Irigasi	449,70	12,64	835,25	9	Bangunan

No	Jenis Barang / Nama Barang	Konstruksi	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m2)	Jumlah	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	
60	Dst Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	TPT	4.836,68	263,60	8.855,41	83	Bangunan
61	Dst Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	TPT	11.049,98	667,02	27.811,77	343	Bangunan
62	Dst Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	Banguna n	761,00	21,00	221,00	4	Bangunan
63	Dst Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	MCK	11,00	20,00	105,00	5	Bangunan
64	Dst Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	Saluran Air	5,00	10,00	50,00	1	Bangunan
65	Dst Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	IPAL			3.997,00	1	Instalasi
66	Dst Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	Jaringan dan sambungan rumah	3.515,00	2,00	3.705,00	6	Instalasi
67	Dst Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	SPAM	40,00	4,00	40,00	4	Instalasi
68	Dst Instalasi Air Buangan Domestik	IPAL Skala permukiman	809,30	19,15	608,87	36	Instalasi
69	Dst Instalasi Air Kotor Lainnya	SPALDT	450,40	7,50	321,70	6	Instalasi
70	Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Sedang	Jaringan dan sambungan rumah	1.201,00	27.230,40	1.860,33	17	Instalasi
71	Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Kecil	SPALDT	300,00	4,00	300,00	4	Instalasi
72	Jalan Desa	ipal		162,00	252,00	1	Jalan
73	Jalan Desa	Jalan	27.992,60	1.413,00	2.194,00	348	Jalan
74	Jalan Desa	Perbaikan Jalan	18.658,36	2.456,00	75.675,07	78	Jalan
75	Jalan Desa	Saluran			339,00	1	Jalan
76	Jalan Kabupaten Arteri	JALAN	5.027,65	68,50	24.490,50	15	Jalan
77	Jalan Kabupaten Bernilai Strategis Kabupaten	jalan	24.915,90	3.860,50	121.877,00	72	Jalan
78	Jalan Kabupaten Kolektor	Jalan	11.799,40	47.891,00	14.838,00	521	Jalan
79	Jalan Khusus Inspeksi	Jalan			930,00	2	Jalan
80	Jalan Khusus Perorangan	Jalan	1.485,00	13,00	4.614,00	9	Jalan

No	Jenis Barang / Nama Barang	Konstruksi	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m2)	Jumlah	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	
81	Jalan Khusus Perorangan	Trotoar	2.080,00	9,00	5.080,00	4	Jalan
82	Jalan Kota Lokal	Jalan	1.644,00	3.116,86	1.276,00	738	Jalan
83	Jalan Kota Lokal	Konsultan Perencanaan				1	Jalan
84	Jalan Kota Lokal	Saluran Drainase	202,00	0,60	60,60	1	Jalan
85	Jalan Kota Lokal	Trotoar	8.499,76	74,54	15.479,30	42	Jalan
86	Jalan Nasional Kolektor	jalan	540,00	5,00	2.700,00	1	Jalan
87	Jalan Propinsi Lokal	jalan	705,00	3,50	2.467,00	1	Jalan
88	Jalan Tol	Jalan			783,00	1	Jalan
89	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	Saluran		1,00		1	Jaringan
90	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar	Saluran Air	100,00	1,00	100,00	1	Jaringan
91	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	SPAM	470,00	5,00	470,00	5	Jaringan
92	Jaringan Rumah Tangga (JARUT)	Jaringan	10,00	1,00	10,00	1	Jaringan
93	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Strategis Kabupaten	Jembatan	348,00	27,50	3.418,65	58	Jembatan
94	Jembatan Pada Jalan Kota Lokal	Jembatan	661,95	45,90	2.649,44	18	Jembatan
95	Jembatan Penyeberangan Orang	Jembatan	1.090,47	228,80	10.511,55	157	Jembatan
96	Krib Pengaman Sungai/Pantai	Saluran Air	-	326,00	587,00	3	Saluran
97	Krib Pengaman Sungai/Pantai	Jalan			123,00	1	Jalan
98	Krib Pengaman Sungai/Pantai	TPT	-	90,00	599,00	6	Bangunan
99	Lain-Lain Jalan Desa	Jalan	-	-	1.048,00	3	Bangunan
100	Lain-Lain Jalan Kabupaten	Jalan	6.629,48	260.470,43	232.993,51	1.187	Jalan
101	Lain-Lain Jalan Khusus	Jalan	-	-	5.343,00	10	Jalan
102	Lain-Lain Jalan Kota	Jalan	17.916,34	298,75	425.039,26	70	Jalan
103	Lain-Lain Jalan Kota	Konsultan Pengawasan				1	Jalan
104	Lain-Lain Jalan Kota	Trotoar	2.907,70	15,48	5.893,10	8	Jalan
105	Lain-Lain Jembatan Pada Jalan Kota	Jembatan	326,84	64,80	3.873,60	30	Jembatan

No	Jenis Barang / Nama Barang	Konstruksi	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m2)	Jumlah	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	
106	Pintu Pengatur Banjir	Banguna n			1,00	1	Bangunan
107	Saluran Drainase	Saluran Air	36.049,60	5.952,86	703.259,01	372	Saluran
108	Saluran Drainage	Jalan	168,12	2.063,00	222,11	4	Saluran
109	Saluran Drainage	TPT	951,00	4.111,00	1.039,00	30	Saluran
110	Saluran Induk (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa)	Saluran Air	3.787,67	19,82	10.752,00	72	Saluran
111	Saluran Induk (Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa)	saluran	8.953,47	882,24	12.306,61	62	Saluran
112	Saluran Pengumpul Air Hujan	Saluran Air	117,80	12,95	6,00	4	Saluran
113	Stasiun Pos Penjaga/Pengamat	Banguna n	3,00	5,00	15,00	1	Bangunan
114	Tanggul Keliling	TALUD	8,00	5,00	45,00	1	Tanggul

Sumber: SIMASDA Dinas PUPR Kota Bogor

Sampai dengan Semester I Tahun 2025 jumlah Inventaris Barang Milik Daerah (BMD) berupa jalan, jaringan dan irigasi berjumlah 7.593 unit/bangunan. Semua unit/bangunan dalam kondisi baik dan terpelihara.

Lebih detil rekapitulasi BMD berupa jalan, jaringan dan irigasi dapat dilihat pada link: https://bit.ly/BMD-DRPUPR_Jlan_Jaringan_Irigasi.

Table 2.1.6.
Tabel Rekapitulasi Inventaris Barang Milik Daerah (Gedung / Bangunan)
Tahun 2025

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Kondisi Bangunan	Luas Lantai (M2)	Luas Tanah (M2)	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	803,00	1.000,00	1,00
2	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	B	3.828,00	4.025,00	3,00
3	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	B	-	-	3,00
4	Gedung Garasi/Pool Permanen	B	50,00	50,00	1,00
5	Gedung Pos Jaga Permanen	B	4,00	4,00	1,00
6	Lain-Lain Bangunan Fasilitas Umum	B	195,00	195,00	1,00
7	Lain-Lain Bangunan Gedung Garasi/Pool	B	192,00	192,00	1,00
8	Lain-Lain Bangunan Gedung Instalasi	B	75,00	75,00	1,00
9	Lain-Lain Bangunan Gedung Kantor	B	-	-	6,00
10	Lain-Lain Pagar	B	100,00	100,00	1,00
11	Lain-Lain Pilar/ Tugu/Tanda Lainnya	B	672,00	672,00	224,00
12	Lain-Lain Tugu	B	25,00	25,00	1,00
13	Pagar Permanen	B	78,00	78,00	1,00

Sumber: SIMASDA Dinas PUPR Kota Bogor

Sampai dengan Semester I Tahun 2025 jumlah Inventaris Barang Milik Daerah (BMD) berupa bangunan berjumlah 246 unit/bangunan. Semua unit/bangunan dalam kondisi baik dan terpelihara.

Lebih detil reakpitulasi BMD berupa bangunan dapat dilihat pada link: https://bit.ly/BMD-DPUPR_Bangunan.

Table 2.1.7.
Tabel Rekapitulasi Inventaris Barang Milik Daerah (Tanah) Tahun 2025

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)
1	2	3
1	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	15.292
2	Lain-Lain Tanah Untuk Jalan	8.360
3	Tanah Bangunan Stasiun Kereta Api	4.873
4	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Limbah	15.266
5	Tanah Untuk Jalan Desa	2.409
6	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	98.129
7	Tanah Untuk Jalan Kotamadya	5.776.672
8	Tanah Untuk Jalan Nasional	11.890

Sumber: SIMASDA Dinas PUPR Kota Bogor

Sampai dengan Semester I Tahun 2025 jumlah Inventaris Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah berjumlah 2.317 bidang tanah. Tahun perolehan Tanah dimulai dari tahun 2023 sampai denan 2024.

Asal usul peroleh tanah selain dari pengadaaan tanah langsung yang bersumber dari APBD, terdapat beberapa bidang tanah yang merupakan, Fasos Fasum Perumahan dan hibah dari Instansi perusahaan, pindahan dari Dinas lain dikota bogor seperti dari Dinas Perumkim dan Mutasi. Jumlah total aset tanah sampai dengan Semester I Tahun 2025 seluas 6.032.891 m2 dengan jumlah total harga perolehan sebesar Rp4.651.544.986,00.

Lebih detil reakpitulasi BMD berupa aset tanah dapat dilihat pada link: https://bit.ly/BMD-DPUPR_Tanah.

Table 2.1.8.
Rencana Pemenuhan Sarana Prasarana untuk Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor

No.	Jenis Sarana Prasarana	Ketersediaan		Kondisi sampai dengan 2024			Rencana Pengadaan (unit)						Jumlah Akhir 2030
		Tidak Ada	Ada	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A	**FASILITAS PENDUKUNG**												
1	Ketersediaan parkir roda dua dan roda empat: terdapat pemisahan yang jelas antara kendaraan roda 2 dan 4 yang diberikan marka.	0	ada	baik	0	0	0	1 Paket	0	1 paket	0	1 paket	4 Paket
2	Petugas parkir	tidak ada	0	0	0	0	0	3 orang	0	3 orang	0	0	6 orang
3	Pemeriksaan karcis/kartu parkir	Tidak Aada	0	0	0	0	0	0	3 unit	0	0	0	3 unit
4	CCTV Lokasi Parkir		ada	baik	0	0	0	ada	ada	ada	ada	ada	
5	Penitipan jaket/helm	tidak ada	0	0	0	0	0	1 Unit	0	1 Unit	0	1 unit	3 Unit
6	Pelindung (Kanopi/atap bahan lain)	0	ada	0	0	0	ada	1 paket	1 Paket	0	1 Paket	0	3 Paket
B	**FASILITAS WAJIB**	**0**											
1	Kursi tunggu	0	ada	baik	0	0	0	1 unit	1 unit	0	0	0	2 unit
2	Pendingin/sirkulasi ruangan	0	ada	baik	0	0	0	0	1 unit	0	0	0	2 unit
C	**FASILITAS PELENGKAP**	**0**											
1	Mesin antrian dilengkapi monitor	tidak ada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Televisi	tidak ada	0	0	0	0	1 unit	0	0	0	0	0	1 unit
3	Bahan bacaan	tidak ada	0	0	0	0	1 unit	0	0	0	0	0	1 unit
4	Pengisi daya baterai alat komunikasi/charger booth	0	ada	baik	0	0	0	0	0	0	0	1 unit	1 unit

No.	Jenis Sarana Prasarana	Ketersediaan		Kondisi sampai dengan 2024			Rencana Pengadaan (unit)						Jumlah Akhir 2030
		Tidak Ada	Ada	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Hotspot/wifi	0	ada	baik	0	0	0	0	0	0	0	0	1 unit
6	Air minum	0	ada	baik	0	0	0	0	1 unit	0	0	0	1 unit
D	**TOILET LAYAK PAKAI**	**0**			**-**	**-**				**0**	**0**	**0**	
1	Toilet pria dan wanita	0	ada	baik	0	0	0	0	0	0	0	0	8 unit
2	Wastafel	0	ada	baik	0	0	0	0	0	0	0	0	8 unit
3	Toiletries	0	ada	baik	0	0	1 set	1 set	1 set	1 set	1 set	1 set	6 set
4	Air bersih	0	ada	baik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Monev intensitas petugas membersihkan toilet	0	ada	baik	0	0	0	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	5 Unit
E	**SARPRAS KELOMPOK RENTAN**	**0**			**0**	**0**	**0**						
1	Kursi roda/tongkat/kruk	0	ada	baik	0	0	0	1 unit	0	0	0	0	1 unit
2	Pintu masuk yang mudah diakses	0	ada	baik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Step lobby/ramp/jalan landai dengan pegangan rambat	0	ada	baik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Lift khusus disertai huruf braille	tidakada	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Selasar yang menghubungkan semua ruangan	0	ada	baik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Toilet disabilitas	0	ada	baik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Loket Prioritas	tidak ada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Ruang tunggu khusus	tidak ada	0	0	0	0	1 Ruangan	0	0	0	0	0	1 Ruangan
9	Guiding block/jalur pemandu	tidak ada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Area parkir khusus	0	ada	baik	0	0	1 Paket	1 Paket	0	0	0	0	3 unit
11	Alat bantu	0	ada	baik	0	0	0	0	1 Paket	0	0	0	2 unit

No.	Jenis Sarana Prasarana	Ketersediaan		Kondisi sampai dengan 2024			Rencana Pengadaan (unit)						Jumlah Akhir 2030
		Tidak Ada	Ada	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
12	Arena bermain anak / area ramah anak	tidak ada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Ruang Laktasi	0	ada	baik	0	0	0	1 Paket	0	0	0	0	2 unit
14	Petugas Pemandu	0	ada	baik	0	0	14 personil	14 personil	16 personil	14 personil	14 personil	14 personil	16 personil
15	Ruang Tenang	0	ada	baik	0	0	0	1 Unit	0	0	0	0	2 unit
F	**SARPRAS PENUNJANG**	**0**			**0**	**0**							
1	Fotocopy/ATK	0	ada	baik	0	0	0	0	0	0	0	0	1 unit
2	P3K	0	ada	baik	0	0	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
3	APAR	0	ada	baik	0	0	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit
4	Kantin	tidak ada	0	baik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Ruang Ibadah	0	ada	baik	0	0	0	0	0	1 Paket	0	0	i paket
6	Jalur evakuasi/titik kumpul	0	ada	baik	0	0	1 Paket	0	0	0	0	0	1 paket
7	Tempat Sampah	0	ada	baik	0	0	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paketa	1 paket
8	Tempat Penitipan Anak/Tempat Bermain Anak	tidak ada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	CCTV	0	ada	baik	0	0	0	0	1 Unit	0	0	0	0
G	**SARANA FRONT OFFICE**	0	ada	baik	0	0	0	1 paket	0	0	0	0	1 paket

No.	Jenis Sarana Prasarana	Ketersediaan		Kondisi sampai dengan 2024			Rencana Pengadaan (unit)						Jumlah Akhir 2030
		Tidak Ada	Ada	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Petugas khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Meja/kursi	0	ada	baik	0	0	0	10 unit	10 unit	0	ada	10 unit	10 unit
3	Layar/display informasi	tidak ada	0	0	0	0	0	1 unit	0	0	0	0	1 unit
4	Bahan cetak informasi layanan	0	ada	baik	0	0	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
5	Register tamu (manual/elektronik)	0	ada	baik	0	0	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
H	**SARANA PRASARANA RUANG KONSULTASI DAN PENGADUAN**				-	-							
1	Kotak saran/pengaduan	0	0	0	0	0	0	3 unit	0	0	0	0	3 unit
2	Ruang khusus	tidak ada	0	0	0	0	0	1 paket	0	0	0	0	1 paket
3	Petugas khusus	tidak ada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Air minum/makanan ringan	0	ada	tersedia	0	0	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
5	Register Konsultasi dan Pengaduan	0	ada	baik	0	0	0	1 paket	0	0	0	0	1 paket
6	Publikasi informasi terkait mekanisme konsultasi dan pengaduan (poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain)	0	ada	baik	0	0	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket

Sumber: Hasil Analisis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, 2025

Selain itu dalam upaya percepatan pelasaksanaan pemerintahan berbasis digital, Dinas PUPR dalam pelaksanaan tugas fungsinya telah melaksanakan pelayanan berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi antara lain sebagai berikut :

Table 2.1.9.
Sistem Informasi yang Digunakan Untuk Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor

No	Sistem Informasi Existing				Rencana Pengembangan				
	Nama Sistem	Data yang dihasilkan	Tahun Pembuatan	Instansi Pembuat	2026	2027	2028	2029	2030
1	SDGIS	Peta Rencana Pola Ruang yang terinergrasi dengan Rencana Program Pembangunan	2021	DPUPR	-	Penambahan unsur Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	-	Penambahan informasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah direvisi	-

No	Sistem Informasi Existing				Rencana Pengembangan				
	Nama Sistem	Data yang dihasilkan	Tahun Pembuatan	Instansi Pembuat	2026	2027	2028	2029	2030
2	SISNINJA (Sistem Informasi Sedort Tinja)	Reservasi Layanan Jasa Pengelolaan air limbah domestik, Terintegrasi dan terjadwal (Sedot Kakus , Bus Toilet , L2T2 , Laboratorium) Tugas terintegrasi dengan operator	2022	UPTD-PAL	Penambahan fitur L2T2 secara otomatis , Realtime notifikasi dari sisi Platform Mobile dan Backend	Penambahan Fitur Pembayaran Online, Perubahan tampilan pada website publik sisninja.kotabogor.go.id	Penambahan Fitur data analisa mitigasi pencegahan pencemaran air limbah dan pengendalian pengoprasian IPAL	-	-
4	Website PUPR	Profil SOKP, Data Perencanaan, data pembangunan, kegiatan, pengumuman, dll		DPUPR	Update dan penambahan fitur layanan	-	-	-	-

No	Sistem Informasi Existing				Rencana Pengembangan				
	Nama Sistem	Data yang dihasilkan	Tahun Pembuatan	Instansi Pembuat	2026	2027	2028	2029	2030
5	Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan serta pembangunan daerah secara elektronik dan terintegrasi di seluruh Indonesia	2022	Kemendagri		-	-	-	-
6	Sistem Informasi Administrasi Pembangunan (SIABANG)	Sistem Informasi Administrasi Pembangunan yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Bogor	2022	Bagian Administrasi Pembagunan	-	-	-	-	-

No	Sistem Informasi Existing				Rencana Pengembangan				
	Nama Sistem	Data yang dihasilkan	Tahun Pembuatan	Instansi Pembuat	2026	2027	2028	2029	2030
7	SIAPMANG	Mengelola data aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dan pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD	-	Bapperida Kota Bogor	-	-	-	-	-
8	Sstem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (paket pekerjaan yang akan dilaksanakan, lokasi, dan perkiraan biaya).	2021	LKPP	-	-	-	-	-
9	Sistem Pengadaan Berbasis Elektronik	Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-
10	Ecatalog	Pengadaan Barang dan Jasa	-	LKPP	-	-	-	-	-

No	Sistem Informasi Existing				Rencana Pengembangan				
	Nama Sistem	**Data yang dihasilkan**	**Tahun Pembuatan**	**Instansi Pembuat**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
11	Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)	Surat Menyurat	-	BKPSDM Kota Bogor	-	-	-	-	-
12	Sibadra	Pengaduan masyarakat	-	Diskominfo Kota Bogor	-	-	-	-	-
13	SP4ANLAPOR Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)	Pengaduan Masyarakat	-	Menpan RB	-	-	-	-	-
14	Sistem Aplikasi Akuntibitas Pemerintah (SADAYA)	sistem aplikasi terintegrasi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bogor untuk mengelola kinerja	-	Setda Kota Bogot	-	-	-	-	-

No	Sistem Informasi Existing				Rencana Pengembangan				
	Nama Sistem	Data yang dihasilkan	Tahun Pembuatan	Instansi Pembuat	2026	2027	2028	2029	2030
15	SURABI	Data pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokras	-	Pemprov jabar	-	-	-	-	-
16	Simpeg Sistem Informasi Kepeegawaian (SIMPEG)	kepegawaian	-	BKPSD Kota Bogor	-	-	-	-	-
17	Sitem Infoemasi Barang Milik Daerah (SIMASDA)	pencatatan, pembukuan, dan inventarisasi aset daerah di Kota Bogor.	-	BKAD Kota Bogor	-	-	-	-	-
18	KRISNA	Data integrasi, sistem yang mendukung perencanaan dan penganggaran kinerja seperti Pengusulan Dana Lokasi Khusus (DAK)	-	Bappenas	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, 2025

I.4.2. Kinerja penyelenggaraan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor

I.4.2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor

Sesuai dengan dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019–2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor memiliki 10 Program antara lain Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan memiliki 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

a. Persentase Rumah Tangga yang terlayani air minum yang layak
b. Persentase Rumah tangga yang terlayani air minum yang aman;
c. Persentase Rumah Tangga yang terlayani sistem air limbah yang layak;
d. Persentase rumah tangga yang terlayani sistem air limbah yang aman;
e. Persentase Realisasi Rencana Struktur Ruang (Periode Rencana 2020-2024);
f. Persentase Realisasi Rencana Pola Ruang (Periode Rencana 2020-2024);
g. Persentase Jalan Berkondisi Baik; dan
h. Persentase Jalan Berkondisi Mantap

Berikut target dan realisasi tujuan dan sasaran renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2020 -2024.

Table 2.1.10.
Target Realisasi Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Capaian (%)					Evaluasi
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
VISI : MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG RAMAH KELUARGA																					
Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat																					
Tujuan 1: Meningkatkan infrastruktur dan pengaturan pemukiman yang baik untuk menciptakan lingkungan sehat yang berkualitas				Angka Universal Akses air minum dan air limbah	%	93,15	68,49	64,28	67,38	70,42	69,19	69,20	70,85	72,18	75,88	72,47	101,04	110,22	107,12	107,75	Tercapai
				Persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik	%	45,52	71,57	72,85	73,20	74,82	119,79	117,50	120,93	109,29	113,06	263,19	164,17	165,99	149,30	151,10	Tercapai
	Sasaran 1.1: Meningkatnya pelayanan akses air minum yang aman			persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman	%	98,30	68,49	64,28	67,38	72,42	70,90	68,49	68,68	70,78	72,33	72,13	100,00	106,85	105,05	99,88	Tidak Tercapai
		Meningkatnya pelayanan akses air minum yang aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum	Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	%	98,30	68,49	64,28	67,38	72,42	70,90	68,49	68,68	70,78	72,33	72,13	100,00	106,85	105,05	99,88	Tidak Tercapai

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Capaian (%)					Evaluasi
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum Bukan Jaringan Perpipaan;	%	55,20	56,60	59,30	62,00	67,40	0,71	15,36	15,36	15,33	15,05	1,29	27,14	25,90	24,73	22,33	Tidak Tercapai
	Sasaran 1.2: Meningkatnya pelayanan pengelolaan air limbah domestik			persentase rumah tanggah yang dilayani sistem pengelolaan air limbah domsetik yang layak	%	66,90	69,91	70,93	72,01	75,10	67,47	69,91	73,02	73,58	79,43	100,85	100,00	102,95	102,18	105,77	Tercapai
				persentase rumah tanggah yang dilayani sistem pengelolaan air limbah domsetik yang aman	%	3,72	5,20	7,20	7,88	8,55	4,03	5,20	5,43	5,49	6,07	108,33	100,00	75,42	69,67	70,99	Tidak Tercapai
		Meningkatnya pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangn Sistem Air Limbah	Persentase (%) rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak	%	66,90	69,91	70,93	72,01	75,10	67,47	69,91	73,02	73,58	79,43	100,85	100,00	102,95	102,18	105,77	Tercapai

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Capaian (%)					Evaluasi
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase (%) rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang aman	%	3,72	5,20	7,20	7,88	8,55	4,03	5,20	5,43	5,49	6,07	108,33	100,00	75,42	69,67	70,99	Tidak Tercapai
	Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya air			persenatse infrastrutur pengelolaan sumber daya air yang berkondsi baik	%	45,52	71,57	72,85	73,20	74,82	119,79	117,50	120,93	109,29	113,06	263,19	164,17	165,99	149,30	151,10	Tercapai
		Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)	%	91,03	91,69	92,54	96,77	97,62	91,04	91,71	94,81	82,46	85,73	100,01	100,02	102,45	85,21	87,82	Tidak Tercapai
				Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)	%	58,75	51,45	52,23	53,01	53,79	57,50	51,58	52,23	53,66	54,65	97,87	100,25	100,00	101,23	101,60	Tercapai
				Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani	lokasi	8,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	1,00	1,00	2,00	3,00	75,00	100,00	100,00	200,00	300,00	Tercapai
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas																					
Tujuan 2: Terwujudnya				Indeks Reformasi Birokrasi	poin	N/A	A	A	A	A	N/A	N/A	B	B	B	-	-	72.89	90.95	91.53	Tidak Tercapai

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Capaian (%)					Evaluasi
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tatatkelola Pemerintahan yang efektif efisien dan akuntabel di lingkup Perangkat Daerah			Nilai PMPRB di Lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	N/A	82	83	84	85	-	-	60,56	76,4	77,87	-	-	72.89	90.95	91.53	Tidak Tercapai
		Meningkatnya tata kelola yang efektif, efisien dan akuntabel dan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	BB	BB	A	A	A	BB	BB	A	A	A	100	100	100	100	100	Tercapai
				Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	poin	N/A	3,35	3,4	3,4	3,5	3,34	3,64	3,89	3,15	3,38	#VALUE!	108,66	114,41	92,65	96,57	Tidak Tercapai
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera																					
Tujuan 3: Meningkatkan kualitas ruang dan infrastruktur kebinamargaan untuk mendukun				Persentase Kesesuaian indiktator program RDTR dengan RTRW	%	20	40	60	80	100	N/A	40,00	48,00	60,00	56,99	0,00	100,00	80,00	75,00	56,99	Tidak Tercapai
				Persentase jalan yang berkondisi mantap (baik dan sedang)	%	84,00	84,50	86,00	88,00	90,00	83,47	84,20	88,23	88,95	90,05	99,37	99,64	102,59	101,08	100,06	Tercapai

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Capaian (%)					Evaluasi
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
g pertumbuhan ekonomi	Sasaran: Meningkatnya pengendalian pemanfaatan bangunan dan ruang kota			Persentase (%) Kesesuaian Implementasi Tata Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	%	N/A	40,00	60,00	80,00	100,00	N/A	40,00	48,00	60,00	56,99	0,00	100,00	80,00	75,00	56,99	Tidak Tercapai
		Meningkatnya pengendalian pemanfaatan bangunan dan ruang kota	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase (%) Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	%	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	N/A	40,00	48,00	60,00	56,99	0,00	100,00	80,00	75,00	56,99	Tidak Tercapai
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%) terhadap IMB yang dikeluarkan	%	82,00	84,00	86,00	100,00	100,00	88,00	88,46	95,18	86,97	88,59	107,32	105,31	110,67	86,97	88,59	Tidak Tercapai
				Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%)terhadap IMB yang dikeluarkan	%	90,00	92,00	94,00	100,00	100,00	99,15	99,88	99,59	99,70	95,79	110,17	108,57	105,95	99,70	95,79	Tidak Tercapai

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Capaian (%)					Evaluasi
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi terhadap seluruh bangunan yang harus memiliki SLF	%			10,00	11,00	12,00			5,00	15,00	26,25			50,00	136,36	218,75	Tercapai
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase dokumen RTBL yang tersusun sesuai dengan rencana penyusunan RTBL dalam RDTRK	%	N/A	N/A	N/A	20,00	2,00	N/A	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Tercapai
	Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur kebinamargaan			Persentase (%) drainase yang berkondisi baik	%	27,16	27,32	27,46	27,61	27,76	27,16	25,11	25,86	20,15	67,86	100,00	91,91	94,17	72,98	244,45	Tercapai
				persenatse penyelenggaraan jalan yang berkondisi mantap	%	84,00	84,50	86,00	88,00	90,00	83,47	84,20	88,23	88,95	90,05	99,37	99,64	102,59	101,08	100,06	Tercapai
		Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur kebinamargaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase yang berkondisi baik	%	27,16	27,32	27,46	27,61	27,76	27,16	25,11	25,86	20,15	67,86	100,00	91,91	94,17	72,98	244,45	Tercapai
				Persentase dokumen perencanaan SDA yang disusun	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					Realisasi					Capaian (%)					Evaluasi
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan yang berkondisi mantap	%	84,00	84,50	86,00	88,00	90,00	83,47	84,20	88,23	88,95	90,05	99,37	99,64	102,59	101,08	100,06	Tercapai
				Persentasae jalan yang terbangun	%	84,00	84,50	86,00	88,00	90,00	N/A	84,20	50,09	36,74	61,49	0,00	99,64	58,24	41,75	68,32	Tidak Tercapai
				Persentasae jalan yang ditingkatkan	%	84,00	84,50	86,00	88,00	90,00	N/A	N/A	5,54	51,09	58,21	0,00	0,00	6,44	58,06	64,68	Tidak Tercapai
				Persentase jalan yang dipelihara	%	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	N/A	N/A	8,12	62,05	73,35	0,00	0,00	11,28	85,00	99,12	Tidak Tercapai
				Persentasae jembatan yang terbangun	%	0,00	34,00	60,00	62,00	64,00	0,00	0,00	3,01	72,94	109,41	0,00	0,00	5,02	117,65	170,95	Tercapai
				Persentasae jembatan yang ditingkatkan	%	0,00	34,49	56,97	58,09	58,09	0,00	0,00	5,46	26,22	28,10	0,00	0,00	9,58	45,14	48,37	Tercapai
				Persentase pembanguan / peningkatan jalur pedestrian	%	0,00	38,00	50,00	62,00	66,00	0,00	0,00	1,27	9,99	11,31	0,00	0,00	2,54	16,11	17,14	Tidak Tercapai
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	%	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	70,00	81,00	82,50	102,80	83,33	70,00	81,00	82,50	102,80	Tercapai

Sumber: Hasil Analisis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, 2025

Dalam Rencana Strategis Dinas PUPR Kota Bogor 2020-2024, telah ditetapkan terdapat 3 Tujuan dan 6 sasaran Renstra Perangkat Daerah dengan 6 Indikator Kinerja Utama antara lain :

1. Meningkatnya pelayanan akses air minum yang aman
2. Meningkatnya pelayanan pengelolaan air limbah domestik
3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan sumber daya air
4. Meningkatnya akuntabilitas Dinas PUPR
5. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan bangunan dan ruang kota
6. Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur kebinamargaan

Untuk pencapaian 6 Indikator Kinerja Utama tersebut, didukung dengan 10 Program antara lain Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan total 24 indikator program.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2020-2024, terdapat beberapa indikator program yang masih belum tercapai 100%, walaupun ada pula indikator program yang sudah tercapai. Hal yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat terlaksananya program tersebut antara lain :

Table 2.1.11.
Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program

No	Program	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum	1. Penggunaan Data penduduk dengan pendekatan kepadatan penduduk 2. Perlu pengelolaan konservasi sumber daya air untuk menjamin kepastian pasokan air baku yang dapat diandalkan 3. Perlu melakukan optimalisasi pemasangan sambungan baru jaringan perpipaan	1. Belum keseluruhan data diperoleh terkait data masyarakat yang memiliki akses SPAM BJP 2. Terbatasnya ketersediaan air baku 3. Belum optimalnya cakupan pelayanan, karena: Masih banyaknya penduduk yang memilih menggunakan air tanah (air sumur).

No	Program	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
		4. Peran Perumda Tirta Pakuan dalam penyediaan pelayanan air minum	Belum optimalnya pemasangan sambungan baru. Masih banyaknya pelanggan yang konsumsi pemakaian air nya di bawah 10 m3/bulan. 4. Masih di atasnya batas toleransi maksimal Tingkat kebocoran/kehilangan air. 5. Belum optimalnya kontinuitas/jam pelayanan 6. mayoritas masyarakat di daerah pemukiman padat berpandangan bahwa air bersih haruslah murah bahkan gratis 7. Masih tingginya kebutuhan konservasi sumber daya air untuk menjamin kepastian pasokan air baku yang dapat diandalkan, 8. Masih kurangnya pengelolaan lingkungan terutama untuk konservasi dan perlindungan mata air
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangn Sistem Air Limbah	1. Perlu peningkatan sistem kelembagaan pengelolaan air limbah domestik 2. Dibutuhkan penyiapan infrastruktur IPLT dalam penerapan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2). 5. Perlu pembinaan sumber daya manusia pengelola air limbah domestik baik yang terpusat maupun komunal yang dikelola oleh Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) 6. Membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat dan Setempat yang telah memenuhi persyaratan Teknis terutama di wilayah sasaran masyarakat berpenghasilan rendah. 7. Perlu peningkatan kapasitas sarana dan prasana, serta SDM, dalam Pengelolaan Air	1. Hasil survey menunjukkan bahwa beberapa responden telah memiliki konstruksi pengolahan air limbah domestik setempat yang sudah kedap air, artinya bahwa pengolahan setempat tersebut merupakan tangki septik yang telah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) 2398:2017. namun masih ada masyarakat yang belum memenuhi Syarat teknis pengolahan setempatnya dengan kedap, artinya belum sesuai dengan SNI. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang standar kedap untuk tangki septik. Pengolahan setempat tersebut hanya dibangun dari material pasangan bata yang tidak kedap. Teknologi ini dikenal dengan sebutan

No	Program	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
		Limbah Domestik Setempat 8. Perlu dialokasikan dana APBD yang memadai;	cubluk, bukan tangki septik, yang dirancang untuk meresapkan air limbah kedalam tanah secara natural. Penggunaan cubluk berpotensi menyebabkan lumpur tinja dapat meresap ke dalam tanah dan mencemari air tanah, khususnya air tanah dangkal. Kondisi terbatasnya pengetahuan tentang standar tangki septik. Menurut Soesanto (2000), masalah yang paling umum dalam pembangunan tangki septik adalah: a. Tangki septik tidak dibangun dengan benar, sehingga ada kebocoran; b. Ukuran tangki septik tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga; c. Aliran efluen terletak terlalu dekat dengan aliran influen; dan d. Tidak ada pipa ventilasi dan lubang akses untuk mengosongkan tangki septik 2. Belum dapat meningkatkan akses layanan karena keterbatasan dana operasional, keterbatasan jaringan instalasi, terbatasnya ketersediaan lahan pegembangan 3. Kurangnya kapasitas dan pembinaan sumber daya manusia pengelola air limbah domestik baik yang terpusat maupun komunal yang dikelola oleh KSM-KSM, Kelembagaan pengelola air limbah domestik komunal oleh Lembaga di bawah dinas teknis yang mengelola air limbah domestik 4. Keuangan yang dimiliki oleh pengelola skala kawasan (KSM) belum dapat memenuhi

No	Program	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
			keseluruhan pengelolaan air limbah domestik yang ideal. 5. Belum terbinanya masyarakat untuk mau mengeluarkan sejumlah uang untuk membiayai pengelolaan air limbah domestik. 6. Nilai retribusi untuk sambungan air limbah domestik terpusat, retribusi jasa tangki tinja maupun pengelolaan komunal belum mendukung *cost recovery* dalam mengelola SPALD
3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Diperlukannya Kebijakan dalam pengelolaan sumber daya air 2. Perlunya penanganan fisik pada infrastruktur Sumber Daya Air untuk memastikan kondisi fisik infrastruktur SDA berfungsi dengan baik 3. Perlunya upaya penanganan permasalahan sumber daya air secara komprehensif dari hulu hingga hilir	1. Adanya kewenangan a pusat dan provinsi di beberapa lokasi di kota sehingga pemerintah kota tidak bisa secara langsung mengintervensi penanganan permasalahan SDA 2. Keterbatasan anggaran dan SDM dalam upaya penanganan permasalahan SDA 3. Perilaku masyarakat yang turut memperparah kerusakan sarana dan prasarana SDA (membuang sampah ke sungai/saluran, membangun di sempadan sungai/saluran, mempersempit badan sungai/saluran)
4.	Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	1. Diperlukannya Kebijakan yang konsisten dalam mengendalikan dan menata bangunan sesuai rencana tata ruang; 2. Pengoptimalan sistem digital Sistem Informasi Managemen Bangungan Gedung (SIMBG) untuk perizinan dan pengawasan; 3. Monitoring berkala terhadap pembangunan dan Penegakan sanksi yang konsisten bagi pelanggar.	1. Tumpang tindih Aturan yang berlaku antara pusat dan daerah; 2. SIMBG yang belum optimal; 3. SDM aparatur terbatas jumlah dan kompetensinya tidak merata,
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	1. Diperlukannya standar teknis bangunan sebagai acuan pelaksanaan; 2. Penambahan Aparatur yang kompeten di bidang teknis dan hukum bangunan;	1. Tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah; 2. Kurangnya SDM di bidang Teknis Bangunan Gedung dan hukum bangunan; 3. Kurangnya/minimnya integrasi data Bangunan

No	Program	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
		3. Peningkatan Basis data bangunan yang akurat dan terintegrasi. 4. Dialokasikan dana APBD yang memadai; 5. Diperlukannya Kolaborasi dengan akademisi dan praktisi untuk penguatan program.	Gedung antar Perangkat Daerah; 4. Keterbatasan anggaran Pemerintah Kota untuk mendukung program Bangunan Gedung;
6.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1. Penyesuaian target kinerja di Renja 2025 - 2030 dan hanya dihitung dari ketercapaian struktur ruang, sehingga kinerja bisa lebih terukur; 2. Penggunaan Data Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) dapat mendukung ketercapaian realisasi Pola Ruang dan Struktur Ruang pada setiap Stakeholder terkait; 3. Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR) dapat menjadi tolak ukur dan tindak lanjut evaluasi terhadap ketercapaian pola ruang dan struktur ruang kota bogor	1. Penentuan Target yang sudah 100% di tahun kelima dinilai terlalu tinggi/ ideal; 2. Indikasi program terdiri dari banyak sektor dan stakeholder terkait, instansi horizontal maupun vertikal, sehingga ketercapaian target menjadi sulit untuk dicapai; 3. Penyusunan Program dan kegiatan sektoral belum sepenuhnya mengacu pada amanat indikasi program dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
7.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1. perda kota bogor no. 13 tahun 2024 tentang penyelenggaraan sistem drainase perkotaan 2. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi lingkungan dalam hal pemeliharaan sistem drainase 3. mengembangkan sistem drainase yang efektif dan efisien untuk mengurangi risiko banjir dan genangan 4. memanfaatkan teknologi untuk mendukung pengembangan sistem drainase.	1. keterbatasan angggaran 2. sistem drainase yang sudah ada belum sepenuhnya efektif dan efisien 3. tingkat partisipasi/kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam pemeliharaan drainase misalnya kesadaran dalam membuang sampah pada tempatnya karena seperti kita ketahui bersama bahwa kebanyakan ketidakberfungsian sistem drainase di kota Bogor disebabkan karena tersumbatnya drainase oleh sampah.
8.	Program Penyelenggaraan Jalan	1. Ketersediaan lahan yang *clean* and *clear* (terbebas dari permasalahan lahan) 2. Tersedianya Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan	1. Kondisi geografis dan alam (cuaca, topografi, jenis tanah) 2. Sumber daya yang terbatas 3. Lahan yang belum terbebaskan

No	Program	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
		3. Peran masyarakat dalam monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jalan	
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1. Tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur 2. Penyediaan pelatihan, sosialisasi dan pembinaan berkala untuk menjaga kualitas pekerjaan konstruksi 3. Monitoring secara berkala kepada penyedia jasa konstruksi	1. Kurangnya tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat kompetensi 2. Belum updatenya data penyedia jasa konstruksi di database 3. Kurangnya evaluasi kinerja penyedia jasa konstruksi 4. kurangnya SDM pembina jasa konstruksi
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Tersedianya sarana dan prasarana 2. Kualitas sumber daya manusia 3. Dukungan anggaran 4. Manajemen yang efektif	1. Birokrasi yang lamban 2. Kurangnya koordinasi 3. Perencanaan yang tidak matang 4. Sistem akuntabilitas yang tidak efektif 5. Pelaporan yang tidak tepat waktu

Sumber: Hasil Analisis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, 2025

Table 2.1.12.
Target dan Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2020-2024

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Indikator	Satuan	Target				Realisasi				Capaian (%)				Evaluasi
			2020	Rp.	2021	Rp.	2020	Rp.	2021	Rp	2020	Rp.	2021	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
VISI : MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG RAMAH KELUARGA															
	Angka Universal Akses air minum dan air limbah	%													
	Persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik	%	45,52		71,57										
	persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman	%	93,15		68,49		72,67		68,49		78,01		100,00		Tidak Tercapai
VISI : MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG RAMAH KELUARGA															
Program Pengelolaan dan Pengembanga Sistem Penyedia Air Minum	Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	%		4.058.546.200	68,49	1.625.000.000	72,67		68,49		70,9	8.183.220.467	100	1.545.683.860	Tidak Tercapai
	Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum Bukan Jaringan Perpipaan;	%	55,2		56,6		0,71		15,36		0,71		27,14		Tidak Tercapai
Kegiatan 1.1.1.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan;				151598										Tidak Tercapai

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Indikator	Satuan	Target				Realisasi				Capaian (%)				Evaluasi
			2020	Rp.	2021	Rp.	2020	Rp.	2021	Rp	2020	Rp.	2021	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Kabupaten/ Kota															
Sub kegiatan 1.1.1.1.1.	Jumlah rumah tangga Jaringan Perpipaan				250	1.625.000.000			250	1.545.683.860			95,12	1.545.683.860	Tercapai
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perkotaan															
	persentase rumah tanggah yang dilayani sistem pengelolaan air limbah domsetik yang layak	%	67,47	4.058.546.200	70,42		71,5	2.963.614.677	72,65		105,97		103,17		Tercapai
	persentase rumah tanggah yang dilayani sistem pengelolaan air limbah domsetik yang aman	%	3,72		5,02		3,8		4,01		102,15		79,88		Tidak Tercapai
Program Pengelolaan dan Pengembangn Sistem Air Limbah	Persentase (%) rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak	%	67,47		70,42	8.092.025.692	71,5		72,65		105,97		103,17	7.202.451.245	Tercapai
	Persentase (%) rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang aman	%	3,72		5,02		3,8		4,01		102,15		79,88		Tidak Tercapai
Kegiatan 1.2.2.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam	Jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak				169,06	8.092.025.692							89,01	7.202.451.245	Tidak Tercapai
	Jumlah rumah tangga yang dilayani				15.783										Tidak Tercapai

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Indikator	Satuan	Target				Realisasi				Capaian (%)				Evaluasi
			2020	Rp.	2021	Rp.	2020	Rp.	2021	Rp	2020	Rp.	2021	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Daerah Kabupaten/ Kota	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Aman														
Sub kegiatan 1.1.2.1.1.Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Penambahan jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Skala Permukiman				70	729.030.000			74,00	727.887.000			99.84	727.887.000	Tidak Tercapai
Sub kegiatan 1.1.2.1.2. Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Peningkatan Sarana dan Prasarana IPLT				1	3.500.000.000							82.64	1.899.584.396	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 1.1.2.1.3.	Penambahan jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Skala Permukiman				95	982.162.996							78.39	769.870.798	Tidak Tercapai
Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman															
Sub kegiatan 1.1.2.1.4.	Penambahan jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS)				30	2.259.846.000							99.14	2.240.404.500	Tidak Tercapai

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Indikator	Satuan	Target				Realisasi				Capaian (%)				Evaluasi
			2020	Rp.	2021	Rp.	2020	Rp.	2021	Rp	2020	Rp.	2021	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat															
Sub kegiatan 1.1.2.1.5.Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Penambahan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja				2	1.000.000.000							99.92	999.240.000	Tidak Tercapai
Sub kegiatan 1.1.2.1.6. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Penambahan Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Pengedotan Lumpur Tinja				734	822.365.600							68.76	565.518.452	Tidak Tercapai
Sub kegiatan 1.1.2.1.7. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Penambahan jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Skala Kota														Tidak Tercapai
Sub kegiatan 1.1.2.1.8. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Peningkatan Sarana dan Prasarana IPLT				1	2,298,621,096									Tidak Tercapai
Sub kegiatan 1.1.2.1.9.	Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				506	1.510.196.200									Tidak Tercapai
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air															

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Indikator	Satuan	Target				Realisasi				Capaian (%)				Evaluasi
			2020	Rp.	2021	Rp.	2020	Rp.	2021	Rp	2020	Rp.	2021	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Limbah Domestik															
	persenatse infrastrutur pengelolaan sumber daya air yang berkondsi baik	%	52,6	21.658.250.000	71,57		52,92	19.470.361.638							Tidak Tercapai
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)	%	91,03		91,69	25,266,545,000	91,04		91,71		100,01		100,02	23,093,078,366	Tidak Tercapai
	Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)	%	58,75		51,45		57,5		51,58		97,87		100,25		Tercapai
	Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani	lokasi	8		1		6		1		75		100		Tercapai
Kegiatan 1.1.3.1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan SDA yang disusun (perbandingan jumlah dokumen yang tersusun terhadap rencana pembangunan dan pemeliharaan SDA)	Dokumen			14	23,266,545,000							90.71	21,106,312,954	Tidak Tercapai
	Panjang Sungai yang berkondisi baik				108,1922										Tidak Tercapai
	Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani	(Lokasi Tamansari Persada)			1										Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 1.1.3.2.1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali	Jumlah dokumen perencanaan Sumber Daya Air yang disusun	Dokumen			26	2,499,149,000							92.54	2,312,680,500	Tidak Tercapai

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Indikator	Satuan	Target				Realisasi				Capaian (%)				Evaluasi
			2020	Rp.	2021	Rp.	2020	Rp.	2021	Rp	2020	Rp.	2021	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai															
Sub Kegiatan 1.1.3.2.2. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang TPT sungai yang dibangun				-										Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 1.1.3.2.3. Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang TPT sungai yang direhab				48,3	6,000,000,000							96.74	5,804,393,025	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 1.1.3.2.4. Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang TPT sungai yang ditingkatkan				48,3	5,772,301,000							89.66	5,175,607,169	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 1.1.3.2.5. Peningkatan Kanal Banjir	Jumlah lokasi kanal banjir yang ditingkatkan				0,25	2,320,000,000									Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 1.1.3.2.6. Peningkatan Polder/ Kolam Retensi	Jumlah polder/ Kolam retensi yang dibangun/ ditingkatkan				0,33	6,000,000,000									Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 1.1.3.2.7. Normalisasi/ Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang berkondisi baik				9,17	2,095,095,000							70.47	1,476,342,000	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 1.1.3.2.8. Operasi dan	Panjang sungai yang terpelihara				19,29	6,900,000,000							91.84	6,337,290,260	Tidak Tercapai

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Indikator	Satuan	Target				Realisasi				Capaian (%)				Evaluasi
			2020	Rp.	2021	Rp.	2020	Rp.	2021	Rp	2020	Rp.	2021	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Pemeliharaan Sungai															
Kegiatan 1.1.3.2.	Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)				51,45	2,000,000,000									Tidak Tercapai
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota															
Sub Kegiatan 1.1.3.2.1.	Panjang irigasi yang ditingkatkan/direhab				51,45	2,000,000,000								1,986,765,382	Tidak Tercapai
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan															
Sub Kegiatan 1.1.3.2.2. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang irigasi yang dipertahankan kondisinya														Tidak Tercapai
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas															
	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	N/A		A										Tidak Tercapai
	Nilai PMPRB di Lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	N/A		82										Tidak Tercapai
Program Penunjang Urusan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	80	8.157.614.540	BB		81,36	6.353.073.135	BB		101,7		100		Tercapai

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Indikator	Satuan	Target				Realisasi				Capaian (%)				Evaluasi
			2020	Rp.	2021	Rp.	2020	Rp.	2021	Rp	2020	Rp.	2021	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Pemerintahan Daerah	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	poin	N/A		3,35		3,34		3,64		#VALUE!		108,66		Tidak Tercapai
Kegiatan 2.4.1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan dan Pelaporan yang terselesaikan tepat waktu				100										Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 2.4.1.1.1.	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6										Tidak Tercapai
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
Sub Kegiatan 2.4.1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5										Tidak Tercapai
Kegiatan 2.4.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti				100	17,413,495,278							96.99	16,888,642,545	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 2.4.1.2.1. Penyediaan Gaji	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia				166	17,357,995,278							96.98	16,834,222,545	Tidak Tercapai

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Indikator	Satuan	Target				Realisasi				Capaian (%)				Evaluasi
			2020	Rp.	2021	Rp.	2020	Rp.	2021	Rp	2020	Rp.	2021	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
dan Tunjangan ASN															
Sub Kegiatan 2.4.1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				559	55,500,000							98.05	54,420,000	Tidak Tercapai
Kegiatan 2.4.1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah				100	48,500,000							98.69	47,817,000	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 2.4.1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah Pemenuhan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)				35	48,500,000							98.69	47,817,000	Tidak Tercapai
Kegiatan 2.4.1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah				100	1,319,489,620							62.82	828,960,199	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 2.4.1.4.1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Pemenuhan Keperluan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan ruangan				85	50,975,000							34.45	17,561,610	Tidak Tercapai

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Indikator	Satuan	Target				Realisasi				Capaian (%)				Evaluasi
			2020	Rp.	2021	Rp.	2020	Rp.	2021	Rp	2020	Rp.	2021	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Bangunan Kantor															
Sub Kegiatan 2.4.1.4.2.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang fungsional				75	533,332,580							75.05	400,245,500	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 2.4.1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				75	24,750,000							97.33	24,090,000	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 2.4.1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan penyediaan jamuan				85	301,140,000							45.30	136,410,000	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 2.4.1.4.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan cetakan format kedinasan				90	160,429,000							66.57	106,804,500	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 2.4.1.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan Keperluan Perjalanan kedinasan				85	248,862,000							57.80	143,848,589	Tidak Tercapai
Kegiatan 2.4.1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah				15										Tidak Tercapai

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Indikator	Satuan	Target				Realisasi				Capaian (%)				Evaluasi
			2020	Rp.	2021	Rp.	2020	Rp.	2021	Rp	2020	Rp.	2021	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Sub Kegiatan 2.4.1.5.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Gedung				15										Tidak Tercapai
Kegiatan 2.4.1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah				100	3,373,523,920							88.76	2,994,401,217	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 2.4.1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan pembayaran jasa penggunaan air,listrik dan komunikasi kantor				100	329,999,904							91.46	301,807,961	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 2.4.1.6.2.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan pembayaran jasa umum dan tenaga sumber daya non ASN				100	3,043,524,016							88.47	2,692,593,256	Tidak Tercapai
Kegiatan 2.4.1.6.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah				90	3,728,638,850							78.53	2,635,313,837	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 2.4.1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Pemenuhan pembayaran kewajiban pajak dan pemeloiharaan kendaraan dinas				90	324,420,000							70.74	229,489,441	Tidak Tercapai

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Indikator	Satuan	Target				Realisasi				Capaian (%)				Evaluasi
			2020	Rp.	2021	Rp.	2020	Rp.	2021	Rp	2020	Rp.	2021	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
Sub Kegiatan 2.4.1.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan pembayaran kewajiban pajak dan pemeliharaan kendaraan operasional/lapangan				85	1,792,474,450							54.03	968,407,000	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 2.4.1.6.3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemenuhan perbaikan gedung kantor				90	1,158,744,400							91.20	1,056,740,996	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 2.4.1.6.4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan perbaikan sarana dan prasarana kantor				90	453,000,000							84.02	380,626,400	Tidak Tercapai
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera															
	Persentase Kesesuaian indiktator program RDTR dengan RTRW	%	20	587.350.000	40		20	262.375.000	40		100		100		Tidak Tercapai

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Indikator	Satuan	Target				Realisasi				Capaian (%)				Evaluasi
			2020	Rp.	2021	Rp.	2020	Rp.	2021	Rp	2020	Rp.	2021	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	Persentase jalan yang berkondisi mantap (baik dan sedang)	%	84		84,5		83,47		84,2		99,37		99,64		Tercapai
	Persentase (%) Kesesuaian Implementasi Tata Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	%	N/A		40		N/A		40		0		100		Tidak Tercapai
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase (%) Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	%	20		40	850,000,000	N/A		40		0		77.17	655,971,400	Tidak Tercapai
Kegiatan 3.5.1.1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/ Kota	Persentase (%) Jumlah RRTR yang disusun terhadap jumlah RRTR yang harus disusun sesuai RTRW				22,22	750,000,000							74.21	556,560,000	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.5.1.1.1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah RRTR (RDTR) yang disusun terhadap jumlah RDTR yang harus disusun sesuai RTRW	Kegiatan			1	750,000,000							74.21	556,560,000	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.5.1.1.2.	Jumlah Rencana Rinci/ Panduan														Tidak Tercapai

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Indikator	Satuan	Target				Realisasi				Capaian (%)				Evaluasi
			2020	Rp.	2021	Rp.	2020	Rp.	2021	Rp	2020	Rp.	2021	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Rancang Kota (PRK) Yang Disusun terhadap Jumlah PRK Yang Harus Disusun Sesuai RTRW														
Kegiatan 3.5.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase (%) Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan ruang Daerah				40	400,000,000									Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.5.1.2.1. Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang	Jumlah pelaksanaan kegiatan diskusi/ penyerapan aspirasi masyarakat	Kegiatan			1	400,000,000									Tidak Tercapai
Kegiatan 3.5.1.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase (%) Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Permanfaatan ruang Daerah				40	800,000,000									Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.5.1.3.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Kegiatan			1	400,000,000									Tidak Tercapai

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Indikator	Satuan	Target				Realisasi				Capaian (%)				Evaluasi
			2020	Rp.	2021	Rp.	2020	Rp.	2021	Rp	2020	Rp.	2021	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Pembangunan Daerah															
Sub Kegiatan 3.5.1.3.2. Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi Tata Ruang Yang Siap Digunakan	Kegiatan			1	400,000,000									Tidak Tercapai
Kegiatan 3.5.1.4. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase (%) Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan uang Daerah				40	100,000,000							99.41	99,411,400	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.5.1.4.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Kegiatan			1	400,000,000									Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.5.1.4.2. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kegiatan			1	100,000,000							99.41	99,411,400	Tidak Tercapai
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%) terhadap IMB yang dikeluarkan	%	82		84	35,647,638,000	88		88,46		107,32		65.91	23,496,858,168	Tidak Tercapai
	Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB	%	90	9.982.000.000	92		99,15	6.536.977.209	99,88		110,17		108,57		Tidak Tercapai

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Indikator	Satuan	Target				Realisasi				Capaian (%)				Evaluasi
			2020	Rp.	2021	Rp.	2020	Rp.	2021	Rp	2020	Rp.	2021	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	(%)terhadap IMB yang dikeluarkan														
	Persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi terhadap seluruh bangunan yang harus memiliki SLF	%													Tercapai
Kegiatan 3.6.1.1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%) terhadap IMB yang dikeluarkan				84	35,647,638,000							65.91	23,496,858,168	Tidak Tercapai
	Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%)terhadap IMB yang dikeluarkan				92										Tidak Tercapai
	Jumlah bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi terhadap seluruh bangunan yang harus memiliki SLF					299,728,000							7.73	23,180,000	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.6.1.1.1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan	Jumlah penerbitan izin bangunan				900	500,000,000									Tidak Tercapai

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Indikator	Satuan	Target				Realisasi				Capaian (%)				Evaluasi
			2020	Rp.	2021	Rp.	2020	Rp.	2021	Rp	2020	Rp.	2021	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
(IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG															
	Jumlah penerbitan sertfikat laik fungsi				6	300,000,000									Tidak Tercapai
	Jumlah rekomendasi Tenaga Ahli				4	400,000,000									Tidak Tercapai
	Jumlah rekomendasi Tenaga Ahli					35,347,910,000							66.41	23,473,678,168	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.6.1.1.2. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor	Bangunan			1	32,884,000,000									Tidak Tercapai
	Jumlah dokumen perencanaan bangunan pemerintah yang disusun	Dokumen			2	1,018,000,000									Tidak Tercapai
	Jumlah pelaksanaan konstruksi bangunan pemerintah yang dibangun														Tidak Tercapai

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Indikator	Satuan	Target				Realisasi				Capaian (%)				Evaluasi
			2020	Rp.	2021	Rp.	2020	Rp.	2021	Rp	2020	Rp.	2021	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase dokumen RTBL yang tersusun sesuai dengan rencana penyusunan RTBL dalam RDTRK	%	N/A		N/A		N/A		0		0		0		Tercapai
	Persentase (%) drainase yang berkondisi baik	%	27,16		27,32	10,364,003,378	27,16		25,11		100		91.72	9,505,931,779	Tercapai
	persenatse penyelenggaraan jalan yang berkondisi mantap	%	84		84,5		83,47		84,2		99,37		99,64		Tercapai
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase yang berkondisi baik	%	27,16		27,32		27,16		25,11		100		91,91		Tercapai
	Persentase dokumen perencanaan SDA yang disusun	%	100		100		100		100		100		100		Tercapai
Kegiatan 3.2.8.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang drainse yang dibangun/ ditingkatkan (km)				2,5	10,364,003,378							**91.72**	**9,505,931,779**	Tidak Tercapai
	Panjang Drainase yang dipelihara (km)				376										Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.2.8.1.1.Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen Perencanaan Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				N/A										Tidak Tercapai

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Indikator	Satuan	Target				Realisasi				Capaian (%)				Evaluasi
			2020	Rp.	2021	Rp.	2020	Rp.	2021	Rp	2020	Rp.	2021	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Sub Kegiatan 3.2.8.1.2. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang dibangun				1	1,567,367,246							94.98	1,488,728,647	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.2.8.1.3. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang ditingkatkan				1,5	2,289,663,684							93.15	2,132,760,075	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.2.8.1.4. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang drainase yang dipelihara (km)				379	1,004,432,000							95.99	964,129,293	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.2.8.1.5. Rehabilitasi saluran drainase lingkungan	Panjang saluran drainase lingkungan yang direhabilitasi				5815	5,502,540,448							89.42	4,920,313,764	Tidak Tercapai
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan yang berkondisi mantap	%	89	64.639.779.950	84,5	133,153,429,935	83,47	55.729.022.443	84,2		93,79		85.15	113,375,079,480	Tercapai
	Persentasae jalan yang terbangun	%	84		84,5	133,153,429,935	N/A		84,2		0		85.15	113,375,079,480	Tidak Tercapai
	Persentasae jalan yang ditingkatkan	%	84		84,5		N/A		N/A		0		0		Tidak Tercapai
	Persentase jalan yang dipelihara	%	70		71		N/A		N/A		0		0		Tidak Tercapai
	Persentasae jembatan yang terbangun	%	0		34		0		0		0		0		Tercapai
	Persentasae jembatan yang ditingkatkan	%	0		34,49		0		0		0		0		Tercapai
	Persentase pembanguan/	%	0		38		0		0		0		0		Tidak Tercapai

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Indikator	Satuan	Target				Realisasi				Capaian (%)				Evaluasi
			2020	Rp.	2021	Rp.	2020	Rp.	2021	Rp	2020	Rp.	2021	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	peningkatan jalur pedestrian														
Kegiatan 3.2.9.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentasae jalan yang terbangun				84,5										Tidak Tercapai
	Persentasae jalan yang ditingkatkan				84,5										Tidak Tercapai
	Persentase jalan yang dipelihara				71										Tidak Tercapai
	Persentasae jembatan yang terbangun				34										Tidak Tercapai
	Persentasae jembatan yang ditingkatkan				34,49										Tidak Tercapai
	Persentase pembanguan/ peningkatan jalur pedestrian				38										Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.2.9.1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan yang disusun				48	6,002,908,000							93.43	5,608,814,900	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.2.9.1.2. Pembebasan Lahan/ Tanah untuk	Jumlah Lahan yang dibebaskan	Lokasi (kampung sawah			1	1,653,735,000							31.10	514,287,200	Tidak Tercapai

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Indikator	Satuan	Target				Realisasi				Capaian (%)				Evaluasi
			2020	Rp.	2021	Rp.	2020	Rp.	2021	Rp	2020	Rp.	2021	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Penyelenggaraan Jalan		panjang 230 m)													
Sub Kegiatan 3.2.9.1.3. Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun				1	15,360,866,044							93.03	14,290,098,604	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.2.9.1.4. Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang diperbaiki				3	55,194,910,984							72.98	40,280,468,748	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.2.9.1.5. Rehabilitasi Jalan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi				4	4,566,802,726							90.44	4,130,207,470	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.2.9.1.6. Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara rutin (Jalan, Drainase dan Trotoar) dalam Km				435	17,000,000,000							96.03	16,325,250,222	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.2.9.1.7. Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang diperbaiki secara berkala (dalam Km)				72	27,078,798,181							97.15	Rp 26,306,256,784	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.2.9.1.8. Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun				2	3,853,357,000							98.25	3,785,747,531	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.2.9.1.9. Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi				4	1,692,052,000							85.02	1,438,583,204	Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.2.9.1.10. Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara rutin (dalam unit)				138	750,000,000							92.71	695,346,817	Tidak Tercapai
Program 3.2.10. PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	%	60		100		50		70		83,33		95.26	190,515,150	Tidak Tercapai
Kegiatan 3.2.10.1. Penyelenggaraa	Persentase tenaga terampil yang memiliki kompetensi				50	200,000,000							95.26	190,515,150	Tidak Tercapai

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	Indikator	Satuan	Target				Realisasi				Capaian (%)				Evaluasi
			2020	Rp.	2021	Rp.	2020	Rp.	2021	Rp	2020	Rp.	2021	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
n Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	(jumlah tenaga terampil yang bersertifikasi terhadap jumlah tenaga yang mengikuti pelatihan)														
Sub Kegiatan 3.2.10.1.1.Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil yang memiliki kompetensi				50	200,000,000							95.26	190,515,150	Tidak Tercapai

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, 2025

Table 2.1.13.
Target dan Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2022-2024

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
VISI : MEWUJUDKAN KOTA BOGOR YANG RAMAH KELUARGA																					
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia	Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	%	64,28	2.636.325.000	67,38	771.270.800	72,42	2.639	68,06	2.431.776.298	69,81	759.079.075	72,33	0	105,79		103,6		99,88		Tidak Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
	Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum Bukan Jaringan Perpipaan;	%	59,3	2636	62	771.270.800	67,4	1.100	15,36	0	15,33	759.079.075	15,05	0	25,9		24,73		22,33		Tidak Tercapai
Kegiatan 1.1.1.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan;	SR	243.802	2.636.325.000	242.443	771.270.800	265.521	2.641	204.647	*2.431.776.298*	*207.684*	*759.079.075*	*260.363*	*0*			113,97				Tidak Tercapai
Sub kegiatan 1.1.1.1.1. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perkotaan	Jumlah rumah tangga Jaringan Perpipaan																				Tidak Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
	persentase rumah tanggah yang dilayani sistem pengelolaan air limbah domsetik yang layak	%	70,93	10.247.426.500	72,01	21.121.832.650	75,1	20.283.276.721	73,02	9.197.791.665	73,58	20.160.027.211	79,43	19.927.312	102,95		102,18		105,77		Tercapai
	persentase rumah tanggah yang dilayani sistem pengelolaan air limbah domsetik yang aman	%	7,2	529,949	7,88	21.121.832.650	8,55	20.283.276.721	5,43		5,49	20.160.027.211	6,07	19.927.312	75,42		69,67		70,99		Tidak Tercapai
Program Pengelolaan dan Pengembangn Sistem Air Limbah	Persentase (%) rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak	%	70,93	10.247.426.500	72,01	21.121.832.650	75,1	20.283.276.721	73,02	9.197.791.665	73,58	20.160.027.211	79,43	19.927.312.298	102,95		102,18		105,77		Tercapai
	Persentase (%) rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang aman	%	7,2	529,949	7,88	21.121.832.650	8,55	20.283.276.721	5,43		5,49	20.160.027.211	6,07	19.927.312.298	75,42		69,67		70,99		Tidak Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
Kegiatan 1.2.2.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak	Rumah Tangga	174.784	10.247.426.500	201,483	21.121.832.650	201,483	20.283.276.721	*175.958*	9.197.791.665	*178.098*	*20.160.027.211*	*177,866*	19.927.312.298			2,39		88,28		Tidak Tercapai
	Jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Aman	Rumah Tangga	17.695	10.247.426.500	22,47	21.121.832.650	22,47	20.283.276.721	*12.607*	9.197.791.665	*13.301*	20.160.027.211	*14,705*	19.927.312.298			5,5		65,44		Tidak Tercapai
Sub kegiatan 1.1.2.1.1. Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Penambahan jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Skala Permukiman	Rumah Tangga			1.575	1.446.000.000					50	1.171.705.008									Tidak Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
Sub kegiatan 1.1.2.1.2. Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Peningkatan Sarana dan Prasarana IPLT																				Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 1.1.2.1.3. Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Penambahan jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Skala Permukiman	Rumah Tangga	1.550	1394,86	1.575	1500	1,575	12,600,000			50	1.171.705.008					31,75				Tidak Tercapai
Sub kegiatan 1.1.2.1.4.	Penambahan jumlah rumah																				Tidak Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS)																				
Sub kegiatan 1.1.2.1.5. Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Penambahan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja																				Tidak Tercapai
Sub kegiatan 1.1.2.1.6. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Penambahan Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Pengedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	842		991	2,5	3200	1.437.929.000					3135	1.339.448.148					97,97		Tidak Tercapai
Sub kegiatan 1.1.2.1.7. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Penambahan jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Skala Kota																				Tidak Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
Sub kegiatan 1.1.2.1.8. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Peningkatan Sarana dan Prasarana IPLT																				Tidak Tercapai
Sub kegiatan 1.1.2.1.9. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik																				Tidak Tercapai
	persenatse infrastrutur pengelolaan sumber daya air yang berkondsi baik	%	72,85	42,07	73,2	45,177	74,82	57,919													Tidak Tercapai
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)	%	92,54	45.720.071.038	96,77	75.424.355.200	97,62	46.826.033.196	94,81	43.186.106.740	82,46	70.701.738.173	85,73	46.124.257.356	102,45		85,21		87,82		Tidak Tercapai
	Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)	%	52,23	12,2	53,01	75.424.355.200	53,79	46.826.033.196	52,23		53,66	70.701.738.173	54,65	46.124.257.356	100		101,23		101,6		Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
	Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani	lokasi	1	3	1	75.424.355.200	1	46.826.033.196	1		2	70.701.738.173	3	46.124.257.356	100		200		300		Tercapai
Kegiatan 1.1.3.1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan SDA yang disusun (perbandingan jumlah dokumen yang tersusun terhadap rencana pembangunan dan pemeliharaan SDA)	Dokumen	*16 dokumen*	*35.555.827.238*	*20*	*62.004.355.200*	*20*	36.119.233.196			*20*	*58.274.825.292*	*16*	35.935.829.066			100		80		Tidak Tercapai
	Panjang Sungai yang berkondisi baik	*Km*	*109,19221 2*	*23,87*	*7.000*	*62.004.355.200*	*7000*	36.119.233.196			*6.672,25*	*58.274.825.292*	*3,86*	35.935.829.066			95		0		Tidak Tercapai
	Jumlah lokasi rawan banjir yang ditangani	(Lokasi)	1 Lokasi (Situ Anggalena)	3	1 Lokasi (Situ Panjang)	62.004.355.200	1	36.119.233.196	1		2	58.274.825.292	3	35.935.829.066	100		200		300		Tercapai
Sub Kegiatan 1.1.3.2.1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk	Jumlah dokumen perencanaan Sumber Daya Air yang disusun																				Tidak Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai																					
Sub Kegiatan 1.1.3.2.2. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang TPT sungai yang dibangun																				Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 1.1.3.2.3. Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang TPT sungai yang direhab																				Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 1.1.3.2.4. Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang TPT sungai yang ditingkatkan																				Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 1.1.3.2.5. Peningkatan Kanal Banjir	Jumlah lokasi kanal banjir yang ditingkatkan																				Tidak Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
Sub Kegiatan 1.1.3.2.6. Peningkatan Polder/ Kolam Retensi	Jumlah polder/ Kolam retensi yang dibangun/ ditingkatkan																				Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 1.1.3.2.7. Normalisasi/ Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang berkondisi baik																				Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 1.1.3.2.8. Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang sungai yang terpelihara																				Tidak Tercapai
Kegiatan 1.1.3.2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu)	Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)	%	54,1	10.164.243.800	53,01	13.420.000.000	55,41	10.706.800.000			53,79	12.426.912.881	54,65	10.188.428.290			101		99		Tidak Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
Daerah Kabupaten/ Kota																					
Sub Kegiatan 1.1.3.2.1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang irigasi yang ditingkatkan/direhab	km	53,17		1,28	2.420.000.000	55,41	2.662			478,15	1.851.643.367					37355				Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 1.1.3.2.2. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang irigasi yang dipertahankan kondisinya																				Tidak Tercapai
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas																					
	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	A	200	A	393.695.533.978	A	400													
	Nilai PMPRB di Lingkungan Perangkat Daerah	Nilai	83	200	84	393.695.533.978	85	233.502.470.271			77,87	356.717.151.639	77,87	225.379.025.584			92,7		91,61		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	A	29.121.566.853	A	29.126.446.409	A	48.634.167.900	A	27.371.419.741	A	26.867.035.070	A	46.265.547.623	100		100		100		Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat Daerah	poin	3,4	19,07	3,4	20080	3,5	21.090	3,89		3,15		3,38		114,41		92,65		96,57		Tidak Tercapai
Kegiatan 2.4.1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan dan Pelaporan yang terselesaikan tepat waktu																				Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 2.4.1.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 2.4.1.1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				Tidak Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
Kegiatan 2.4.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti																				Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 2.4.1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	OB	186	17,794	196	18.609.407.087	196	20.003.978.896			196	17.761.637.623	196	19.778.620.511			98				Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 2.4.1.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																				Tidak Tercapai
Kegiatan 2.4.1.3. Kegiatan Administrasi	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional																				Tidak Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
Kepegawaian Perangkat Daerah	perangkat daerah																				
Sub Kegiatan 2.4.1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah Pemenuhan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)																				Tidak Tercapai
Kegiatan 2.4.1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	%	82,5	2,419	100	3.517.948.900	100	3.272.428.100			100	3.343.373.208	100	3.173.745.210			100		100		Tercapai
Sub Kegiatan 2.4.1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Keperluan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan ruangan	*paket*	*85*	*16,659*	*100*	*40.009.000*	*100*	*99.906.600*			*100*	*39.787.950*	*100*	*99.013.000*			100		100		Tercapai
Sub Kegiatan 2.4.1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengka	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang fungsional	*paket*	*85*		*100*		*100*				*100*		*100*				100		100		Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
pan Kantor																					
Sub Kegiatan 2.4.1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	*paket*	*75*	*1,232*	*75*	*785.785.100*	*75*	*1.282.899.800*			*75*	*778.120.800*	*75*	*1.276.012.450*			100		100		Tercapai
Sub Kegiatan 2.4.1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan penyediaan jamuan																				Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 2.4.1.4.5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan cetakan format kedinasan																				
Sub Kegiatan 2.4.1.4.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Pemenuhan Keperluan Perjalanan kedinasan																				

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
Konsultasi SKPD																					
Kegiatan 2.4.1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah																				
Sub Kegiatan 2.4.1.5.1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Gedung																				
Kegiatan 2.4.1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah																				
Sub Kegiatan 2.4.1.6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Pemenuhan pembayaran jasa penggunaan air,listrik dan komunikasi kantor																				

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
Daya Air dan Listrik																					
Sub Kegiatan 2.4.1.6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan pembayaran jasa umum dan tenaga sumber daya non ASN																				
Kegiatan 2.4.1.6.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah																				
Sub Kegiatan 2.4.1.6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan pembayaran kewajiban pajak dan pemeloiharaan kendaraan dinas																				

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
Sub Kegiatan 2.4.1.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan pembayaran kewajiban pajak dan pemeliharaan kendaraan operasional/lapangan																				
Sub Kegiatan 2.4.1.6.3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemenuhan perbaikan gedung kantor	Unit	90	462.040.266	90	293.100.000	4	697.818.000			1	291.283.400	1	649.098.874			1,11		25		
Sub Kegiatan 2.4.1.6.4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan perbaikan sarana dan prasarana kantor																				

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera																					
	Persentase Kesesuaian indiktator program RDTR dengan RTRW	%	60		80		100		48		60		56,99		80		75		56,99		Tidak Tercapai
	Persentase jalan yang berkondisi mantap (baik dan sedang)	%	86	183.016.784.080	88	187.469.752.127	90	84.161.447.405	88,23	160.966.013.043	88,95	174.319.441.025	90,05	80.296.598.812	102,59		101,08		100,06		Tercapai
	Persentase (%) Kesesuaian Implementasi Tata Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	%	60		80		100		48		60		56,99		80		75		56,99		Tidak Tercapai
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase (%) Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	%	60	2.500.000.000	80	1.400.000.000	100	900.000.000	48	1.899.636.358	60	1.400.000.000	56,99	828.029.475	80		75		56,99		Tidak Tercapai
Kegiatan 3.5.1.1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah	Persentase (%) Jumlah RRTR yang disusun terhadap jumlah RRTR yang harus	%	*50*	*1.500.000.000*	*80*	*300.000.000*	*80*	*300.000.000*			60	284.190.525	60	279.750.525			75		75		Tidak Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/ Kota	disusun sesuai RTRW																				
Sub Kegiatan 3.5.1.1.1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah RRTR (RDTR) yang disusun terhadap jumlah RDTR yang harus disusun sesuai RTRW																				Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.5.1.1.2. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	Jumlah Rencana Rinci/ Panduan Rancang Kota (PRK) Yang Disusun terhadap Jumlah PRK Yang Harus Disusun Sesuai RTRW																				Tidak Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
Kegiatan 3.5.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase (%) Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan ruang Daerah																				Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.5.1.2.1. Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang	Jumlah pelaksanaan kegiatan diskusi/ penyerapan aspirasi masyarakat	Kegiatan																			Tidak Tercapai
Kegiatan 3.5.1.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase (%) Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Permanfaatan ruang Daerah	*%*	*55,56*	*550.000.000*	*100*	*500.000.00*	*100*	*300.000.000*			100	437.457.660	100	269.619.000			100		100		Tercapai
Sub Kegiatan 3.5.1.3.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan	Kegiatan																			Tidak Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Pembangunan Daerah																				
Sub Kegiatan 3.5.1.3.2. Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi Tata Ruang Yang Siap Digunakan	Kegiatan																			Tidak Tercapai
Kegiatan 3.5.1.4. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%) Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan uang Daerah	*%*	*55,56*	*450.000.000*	*100*	*300.000.00*	*100*	*300.000.00*			100	219.780.000	100	278.659.950			100		100		Tercapai
Sub Kegiatan 3.5.1.4.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Kegiatan																			Tidak Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
Sub Kegiatan 3.5.1.4.2. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kegiatan	1	450.000.000	1		1	300.000.00					1	278.659.950					100		Tercapai
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%) terhadap IMB yang dikeluarkan	%	86	59.629.013.303	100	52.752.120.262	100	9.680.007.448	95,18	53.136.886.842	86,97	41.360.030.098	88,59	9.196.400.116	110,67		86,97		88,59		Tidak Tercapai
	Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%)terhadap IMB yang dikeluarkan	%	94	32.698	100	52.752.120.262	100	9.680.007.448	99,59		99,7	41.360.030.098	95,79	9.196.400.116	105,95		99,7		95,79		Tidak Tercapai
	Persentase bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi terhadap seluruh bangunan yang harus memiliki SLF	%	10	30	11	52.752.120.262	12	9.680.007.448	5		15	41.360.030.098	26,25	9.196.400.116	50		136,36		218,75		Tercapai
Kegiatan 3.6.1.1. Penyelenggaraan Bangunan	Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak	%	86	41.170.166.978	100	52.752.120.262	100	9.680.007.448	95,18	35.840.341.808	86,97	41.360.030.098	88,59	9.196.400.116	110,67		86,97		88,59		Tidak Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	berizin (%) terhadap IMB yang dikeluarkan																				
	Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai IMB (%)terhadap IMB yang dikeluarkan	%	94		100	52.752.120.262	100	9.680.007.448	99,59		99,7	41.360.030.098	95,79	9.196.400.116	105,95		99,7		95,79		Tidak Tercapai
	Jumlah bangunan gedung yang memiliki sertifikat laik fungsi terhadap seluruh bangunan yang harus memiliki SLF	%	10	501.537.600	11	52.752.120.262	12	9.680.007.448	5	122.400.000	15	41.360.030.098	26,25	9.196.400.116	50		136,36		218,75		Tercapai
Sub Kegiatan 3.6.1.1.1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli	Jumlah penerbitan izin bangunan	angka	*950*	*600*	*1000*		*1100*														Tidak Tercapai
	Jumlah penerbitan sertfikat laik fungsi	angka	*7*	*350*	*8*	*400*	*10*	*500*													Tidak Tercapai
	Jumlah rekomendasi Tenaga Ahli	angka	*4*	*450*	*4*	*500*	*4*	*500*													Tidak Tercapai
	Jumlah rekomendasi Tenaga Ahli	angka	*4*	*450*	*4*	*500*	*4*	*500*													Tidak Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG																					
Sub Kegiatan 3.6.1.1.2. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Masjid Agung Kota Bogor	Bangunan	1	27,6	1	26.800															Tidak Tercapai
	Jumlah dokumen perencanaan bangunan pemerintah yang disusun	Dokumen																			Tidak Tercapai
	Jumlah pelaksanaan konstruksi bangunan pemerintah yang dibangun	*Kegiatan*	1		2	41.500	3														Tidak Tercapai
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase dokumen RTBL yang tersusun sesuai dengan rencana penyusunan RTBL dalam RDTRK	%	N/A		20	700	2	700	0		0		2		0		0		100		Tercapai
	Persentase (%) drainase yang berkondisi baik	%	27,46	18.458.846.325	27,61	25.182.726.530	27,76	22.581.543.051	25,86	17.296.545.034	20,15	25.182.726.530	67,86	22.361.375.604	94,17		72,98		244,45		Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
	persenatse penyelenggaraan jalan yang berkondisi mantap	%	86	183.016.784.080	88	187.469.752.127	90	84.161.447.405	88,23	160.966.013.043	88,95	174.319.441.025	90,05	80.296.598.812	102,59		101,08		100,06		Tercapai
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase yang berkondisi baik	%	27,46	18.458.846.325	27,61	25.182.726.530	27,76	22.581.543.051	25,86	17.296.545.034	20,15	25.182.726.530	67,86	22.361.375.604	94,17		72,98		244,45		Tercapai
	Persentase dokumen perencanaan SDA yang disusun	%	100	18.000	100	25.182.726.530	100	22.581.543.051	100		100	25.182.726.530	100	22.361.375.604	100		100		100		Tercapai
Kegiatan 3.2.8.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang drainse yang dibangun/ ditingkatkan (km)		6	18.000	7	22.000	12	22.581.543.051					345	22.361.375.604					2875		Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase yang dipelihara (km)		378	18.458.846.325	376	380	380	300													Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.2.8.1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen Perencanaan Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																				Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.2.8.1.2. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang dibangun	m/km	3	8,423	3,5	10.112.474.225	3,5	9.297.086.891			7,535	7.405.819.796	4,2	9.231.388.190			215,29		120		Tercapai
Sub Kegiatan 3.2.8.1.3. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang ditingkatkan	m/km	3	8.686	3,5	10.268.262.305	3,5	10.214.985.450			7,47	8.892.074.302	3,4	10.089.565.799			213,43		97,14		Tidak Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
Sub Kegiatan 3.2.8.1.4. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang drainase yang dipelihara (km)	km	18,71	1.350.000.000	1,5	2.850.000.000	2	1.975.164.000	24,14	1.314.774.802	1,47	2.833.247.268	1,36	1.966.514.375	129,02		98		90,67		Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.2.8.1.5. Rehabilitasi saluran drainase lingkungan	Panjang saluran drainase lingkungan yang direhabilitasi																				Tidak Tercapai
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan yang berkondisi mantap	%	86	183.016.784.080	88	187.469.752.127	90	84.161.447.405	88,23	160.966.013.043	88,95	174.319.441.025	90,05	80.296.598.812	102,59		101,08		100,06		Tercapai
	Persentasae jalan yang terbangun	%	86	183.016.784.080	88	187.469.752.127	90	84.161.447.405	50,09	160.966.013.043	36,74	174.319.441.025	61,49	80.296.598.812	58,24		41,75		68,32		Tidak Tercapai
	Persentasae jalan yang ditingkatkan	%	86	17.500	88	187.469.752.127	90	84.161.447.405	5,54		51,09	174.319.441.025	58,21	80.296.598.812	6,44		58,06		64,68		Tidak Tercapai
	Persentase jalan yang dipelihara	%	72	25.500	73	187.469.752.127	74	84.161.447.405	8,12		62,05	174.319.441.025	73,35	80.296.598.812	11,28		85		99,12		Tidak Tercapai
	Persentasae jembatan	%	60	2.800	62	187.469.752.127	64	84.161.447.405	3,01		72,94	174.319.441.025	109,41	80.296.598.812	5,02		117,65		170,95		Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
	yang terbangun																				
	Persentasae jembatan yang ditingkatkan	%	56,97	4.600	58,09	187.469.752.127	58,09	84.161.447.405	5,46		26,22	174.319.441.025	58,09	80.296.598.812	9,58		45,14		100		Tercapai
	Persentase pembangua/ peningkatan jalur pedestrian	%	50	60.000	62	187.469.752.127	66	84.161.447.405	1,27		9,99	174.319.441.025	11,31	80.296.598.812	2,54		16,11		17,14		Tidak Tercapai
	Persentasae jalan yang terbangun	%	86	183.016.784.080	88	187.469.752.127	90	84.161.447.405	50,09	160.966.013.043	36,74	174.319.441.025	61,49	80.296.598.812	58,24		41,75		68,32		Tidak Tercapai
	Persentasae jalan yang ditingkatkan	%	86	17.500	88	187.469.752.127	90	84.161.447.405	5,46		51,09	174.319.441.025	58,21	80.296.598.812	6,35		58,06		64,68		Tidak Tercapai
Kegiatan 3.2.9.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan yang dipelihara	%	72	25.500	73	187.469.752.127	74	84.161.447.405	8,12		62,05	174.319.441.025	73,35	80.296.598.812	11,28		85		99,12		Tidak Tercapai
	Persentasae jembatan yang terbangun	%	60	2.800	62	187.469.752.127	64	84.161.447.405	3,1		72,94	174.319.441.025	109,41	80.296.598.812	5,17		117,65		170,95		Tercapai
	Persentasae jembatan yang ditingkatkan	%	59,97	4.700	58,09	187.469.752.127	58,09	84.161.447.405	5,46		26,22	174.319.441.025	28,1	80.296.598.812	9,1		45,14		48,37		Tidak Tercapai
	Persentase pembangunan/ peningkatan jalur pedestrian	%	50	60.000	62	187.469.752.127	66	84.161.447.405	1,27		9,99	174.319.441.025	11,31	80.296.598.812	2,54		16,11		17,14		Tidak Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
Sub Kegiatan 3.2.9.1.1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan yang disusun																				Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.2.9.1.2. Pembebasan Lahan/ Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Lahan yang dibebaskan	Lokasi (kampung sawah panjang 230 m)																			Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.2.9.1.3. Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	km	7	13.056.855.000	8	38.423.569.450	8000	2.619.885.750			0,425	33.071.743.486	396	2.428.808.330			5,31		4,95		Tidak Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
Sub Kegiatan 3.2.9.1.4. Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang diperbaiki																				Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.2.9.1.5. Rehabilitasi Jalan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi																				Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.2.9.1.6. Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara rutin (Jalan, Drainase dan Trotoar) dalam Km																				Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.2.9.1.7. Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang diperbaiki secara berkala (dalam Km)	km	72	40.524.307.771	72	22.385.615.000	7200	18.231.670.386			22,057	21.742.705.732	20.975	18.122.934.707			30,63		291,32		Tercapai
Sub Kegiatan 3.2.9.1.8. Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	M	13	2.800.000.000	1	38.423.569.450	1000	2.020.168.500			0,62	33.071.743.486	31	1.771.686.418			62		3,1		Tidak Tercapai
Sub Kegiatan 3.2.9.1.9. Rehabilita	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi	M	20	6.900.000.000	2	8.000.000.000	2000	3.165.573.806			0,449	5.360.472.267	31	3.067.727.755			22,45		1,55		Tidak Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
si Jembatan																					
Sub Kegiatan 3.2.9.1.10. Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara rutin (dalam unit)	M	138	900.000.000	138	1.400.000.000	138	1.625.000.000			138	1.313.781.305	138	1.616.906.727			100		100		Tercapai
Program 3.2.10. PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	%	100	299.557.000	100	447.030.000	250	435.994.550	81	173.553.159	82	370.047.984	257	379.504.300	81		82		102,8		Tercapai
Kegiatan 3.2.10.1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil yang memiliki kompetensi (jumlah tenaga terampil yang bersertifikasi terhadap jumlah tenaga yang mengikuti pelatihan)	*%*	*50*	*299.557.000*	*100*	*447.030.000*	*100*	*200.000.000*			*82*	*370.047.984*	*102,8*	*170.210.300*			82		102,8		Tercapai
Sub Kegiatan 3.2.10.1.1 .Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil yang memiliki kompetensi	*%*																			Tidak Tercapai

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target						Realisasi						Capaian						Evaluasi
			2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	2022	Rp.	2023	Rp.	2024	Rp.	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	%	100	299.557.000	100	447.030.000	100	435.994.550	81	173.553.159	82,5	370.047.984	102,8	379.504.300	81		82,5		102,8		Tercapai

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, 2025

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2020-2024, masih terdapat beberapa indikator Kegiatan yang belum tercapai 100% antara lain :

Table 2.1.14.
Faktor Pendukung dan Penghambat, Permasalahan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan

No.	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	a) Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik dilingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat umum lainnya. b) Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan c) Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya d) Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi e) Masyarakat dapat menikmati peningkatan	a) Belum keseluruhan data diperoleh terkait data masyarakat yang memiliki akses SPAM BJP b) Terbatasnya ketersediaan air baku c) Masih di atasnya batas toleransi maksimal Tingkat kebocoran/kehilangan air. d) Belum optimalnya kontinuitas/jam pelayanan e) mayoritas masyarakat di daerah pemukiman padat berpandangan bahwa air bersih haruslah murah bahkan gratis f) Masih tingginya kebutuhan konservasi sumber daya air untuk menjamin kepastian pasokan air baku yang dapat diandalkan, g) Masih kurangnya pengelolaan lingkungan terutama untuk	a) sumber air baku yang semakin berkurang. b) Belum optimalnya cakupan pelayanan, karena: ● Masih banyaknya penduduk yang memilih menggunakan air tanah (air sumur). ● Belum optimalnya pemasangan sambungan baru. ● Masih banyaknya pelanggan yang konsumsi pemakaian air nya di bawah 10 m3/bulan.	a) Pengembangan SPAM meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan b) Pembangunan baru dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi belum tersedianya kapasitas, kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal dan/atau kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan; c) Perluasan dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat d) Perlu pengelolaan konservasi sumber daya

No.	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		kesejahteraan dari pengusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah; Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM	konservasi dan perlindungan mata air		air untuk menjamin kepastian pasokan air baku yang dapat diandalkan e) sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan air minum aman
2	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	Pemenuhan akses sanitasi melalui rantai layanan yang dikelola secara aman, berkelanjutan dan inklusif sesuai dengan karakteristik wilayah	a) masih ada masyarakat yang belum memenuhi syarat dalam penggunaan tangki septik yang sesuai dengan SNI. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang standar kedap untuk tangki septik. Menurut Soesanto (2000), masalah yang paling umum dalam pembangunan tangki septik adalah: ● Tangki septik tidak dibangun dengan benar, sehingga ada kebocoran; ● Ukuran tangki septik tidak sesuai dengan	a) Banyak tangki septik rumah tangga belum memenuhi standar teknis dan tidak dilakukan penyedotan berkala b) Terbatasnya jaringan sistem terpusat dan terbatasnya jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), c) Infrastruktur komunal yang telah dibangun belum optimal dari segi pemanfaatan dan pemeliharaan	a) Mendorong pembangunan dan revitalisasi tangki septik kedap di rumah tangga dan fasilitas publik, b) Subsidi sedot tinja bagi masyarakat berpenghasilan rendah, c) Pembangunan baru IPLT, d) Pembangunan IPAL komunal di kawasan padat dan IPAL Komunal terintegrasi di permukiman baru, e) Rehabilitasi dan perluasan jaringan air limbah eksisting, f) Memaksimalkan Peran aplikasi SISNINJA (Sistem Pemesanan

No.	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			kebutuhan rumah tangga; • Aliran efluen terletak terlalu dekat dengan aliran influen; dan • Tidak ada pipa ventilasi dan lubang akses untuk mengosongkan tangki septik b) Belum dapat meningkatkan akses layanan karena keterbatasan dana operasional, keterbatasan jaringan instalasi, terbatasnya ketersediaan lahan pegembangan c) Kurangnya kapasitas dan pembinaan sumber daya manusia pengelola air limbah domestik baik yang terpusat maupun komunal yang dikelola oleh KSM-KSM, Kelembagaan pengelola air limbah domestik komunal oleh Lembaga di bawah dinas teknis yang mengelola air limbah domestik d) Keuangan yang dimiliki oleh pengelola skala kawasan (KSM) belum	d) Penerapan regulasi yang belum optimal berdampak pada pengawasan dari stakeholder terhadap masyarakat, e) Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyedotan rutin dan sanitasi aman, f) Kelembagaan pengelola, terutama di tingkat masyarakat (KSM), masih terbatas kapasitas dan pendampingannya g) Pembiayaan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur air limbah masih sangat tergantung pada APBD atau bantuan pemerintah pusat, h) Belum semua wilayah memiliki KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara) aktif	Digital Jasa Sedot Lumpur Tinja), g) Pemutakhiran data spasial dan baseline h) sistem sanitasi rumah tangga berbasis RT, i) Sosialisasi dan Edukasi rutin berbasis RW melalui Forum Komunikasi Sanitasi dan lomba RW sanitasi terbaik, j) Pembangunan/ Peningkatan kapasitas IPLT eksisting (kapasitas,armada,SDM)

No.	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			dapat memenuhi keseluruhan pengelolaan air limbah domestik yang ideal. e) Belum terbinanya masyarakat untuk mau mengeluarkan sejumlah uang untuk membiayai pengelolaan air limbah domestik. f) Nilai retribusi untuk sambungan air limbah domestik terpusat, retribusi jasa tangki tinja maupun pengelolaan komunal belum mendukung *cost recovery* dalam mengelola SPALD	atau kader sanitasi yang dapat menggerakkan perubahan perilaku	
3	Persentase Jalan yang terbangun	kebutuhan konektivitas antar wilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta membuka isolasi daerah terpencil untuk mengoptimalkan potensi daerah dan meningkatkan akses terhadap layanan publik	kendala geografis dan alam (cuaca, topografi, jenis tanah), keterbatasan sumber daya, pembebasan lahan	keterbatasan sumber daya & anggaran, masalah pengadaan lahan, serta kendala teknis	penyelesaian masalah lahan, pemilihan material dan desain yang tepat, usulan bantuan keuangan

No.	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
4	Persentase Jalan yang ditingkatkan	kebutuhan akan peningkatan konektivitas sosial dan ekonomi melalui akses yang lebih baik	keterbatasan sumber daya, cuaca ekstrem (curah hujan tinggi), partisipasi masyarakat yang rendah, dan masalah sosial	kualitas layanan jalan yang menurun akibat overloading, drainase yang belum optimal	perbaikan regulasi, optimalisasi sistem drainase, pelaksanaan pemeliharaan jalan secara rutin
5	Persentasae jembatan yang ditingkatkan	permintaan akan aksesibilitas dan transportasi yang lebih baik akibat pertumbuhan populasi dan ekonomi, yang menyebabkan kebutuhan akan infrastruktur yang efisien untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, memacu aktivitas perekonomian, serta mendukung pertumbuhan sosial dan pembangunan daerah secara keseluruhan	kondisi lingkungan yang sulit seperti medan menantang dan tanah tidak stabil, cuaca ekstrem yang mengganggu konstruksi, batasan anggaran dan waktu yang ketat, kurangnya koordinasi, serta potensi masalah sosial seperti penolakan dari masyarakat sekitar	kendala pendanaan, tantangan struktural seperti pondasi tidak stabil dan kegagalan material, kondisi lingkungan yang sulit, kurangnya pemeliharaan dan perawatan rutin, serta ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan beban maksimal	pengamanan pendanaan yang memadai, perencanaan pemeliharaan rutin, penerapan pemeriksaan kualitas dan kondisi jembatan secara berkala, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan
6	Persentase pembangunan/peningkatan jalur pedestrian	kebutuhan akan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pejalan kaki	keterbatasan anggaran, perubahan kondisi lingkungan dan sosial, penyalahgunaan fungsi trotoar seperti untuk parkir atau pedagang kaki lima, infrastruktur yang sudah rusak, dan kesadaran masyarakat yang rendah untuk menjaga fasilitas publik	kerusakan fisik dan penyalahgunaan fungsi (PKL, parkir kendaraan, vandalisme), yang terjadi akibat kurangnya pemeliharaan dan penegakan hukum	perbaikan struktural dengan bahan berkualitas, penegakan aturan untuk fungsi trotoar yang sesuai, peningkatan kesadaran masyarakat, pemeliharaan untuk menciptakan trotoar yang aman, nyaman, dan berfungsi optimal sebagai fasilitas publik

No.	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
7	Persentase (%) Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	a) Penggunaan Data Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) dapat mendukung ketercapaian realisasi Pola Ruang dan Struktur Ruang pada setiap Stakeholder terkait; b) Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR) dapat menjadi tolak ukur dan tindak lanjut evaluasi terhadap ketercapaian pola ruang dan struktur ruang kota bogor.	a) Penentuan Target yang sudah 100% di tahun kelima dinilai terlalu tinggi/ ideal; b) Indikasi program terdiri dari banyak sektor dan stakeholder terkait, instansi horizontal maupun vertikal, sehingga ketercapaian target menjadi sulit untuk dicapai	Penyusunan Program dan kegiatan sektoral belum sepenuhnya mengacu pada amanat indikasi program dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Penyesuaian target kinerja di Renja 2025 - 2030 dan hanya dihitung dari ketercapaian struktur ruang, sehingga kinerja bisa lebih terukur.
8	Persentase (%) Jumlah RRTR yang disusun terhadap jumlah RRTR yang harus disusun sesuai RTRW	a) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi program prioritas baik di Pusat maupun di Daerah b) Ketersediaan RDTR merupakan salah satu langkah dalam kemudahan investasi	Penyusunan RDTR melibatkan banyak sektor horizontal maupun vertikal sehingga perlu adanya penyelarasan rencana antar sektor	a) Belum tersusunnya seluruh RDTR yang menjadi amanat RTRW di Kota Bogor b) Belum tersusunnya kebijakan yang menjadi turunan dari RDTR	Mendorong percepatan penyusunan RDTR WP B C dan E serta kebijakan turunannya

No.	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
9	Persentase (%) Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Permanfaatan ruang Daerah	Sudah terbit Petunjuk Teknis terkait Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha dan Non Berusaha	Belum selarasnya pemahaman terkait proses bisnis pelayanan KKPR antar sektor terkait	a) Terbitnya Undang-undang Cipta Kerja dan aturan turunannya memunculkan amanat baru terkait pelaksanaan KKPR b) Belum optimalnya pelayanan KKPR dalam masa transisi kebijakan	a) Mendorong penyusunan dasar hukum di daerah terkait pembagian kewenangan dalam pelaksanaan pelayanan KKPR b) Mendorong penambahan sub kegiatan baru dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Koordinasi dan SInkronisasi Pengendalian {emanfaatan Ruang Daerah (Penilaian KKPR dan Pernyataan Mandiri UMK, Perwujudan RTR)
10	Persentase dokumen RTBL yang tersusun sesuai dengan rencana penyusunan RTBL dalam RDTRK	a) Adanya payung hukum yang menegaskan kewajiban penyusunan RTBL sehingga menjadi landasan formal yang kuat; b) Pusat pusat pelayanan yang sudah ditentukan di dalam RTR dan perlu adanya pengaturan lanjutan dalam rangka penataan kawasan tersebut.	a) Keterbatasan anggaran sehingga belum tersusunnya dokumen RTBL di Kota Bogor yang sesuai dengan amanat RTRW Kota Bogor; b) Kondisi lapangan yang kompleks dan heterogen sehingga membutuhkan pendekatan SOAR (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) di dalamnya	a) Belum terwujudnya penataan bangunan dan lingkungan yang terpadu, berkelanjutan dan berkualitas sesuai dengan kaidah perencanaan kota yang tercantum di dalam Rencana Tata Ruang. b) Kurang pedulinya masyarakat akan pentingnya Dokumen Legalitas	a) Proses Penyusunan Dokumen RTBL sedang berjalan pada 2 kawasan sesuai amanat RTRW Kota Bogor yaitu Jl. Raya Jakarta-Bogor dan Bogor Inner Ring Road b) Mendorong pengembangan titik titik kawasan yang perlu diatur RTBL nya, terutama di perbatasan kota

No.	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				Perizinan Bangunan;	
11	Prosentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin (%) terhadap IMB yang dikeluarkan	a) Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perizinan bangunan gedung; b) Sosialisasi dan informasi kepada masyarakat terkait prosedur perizinan; c) Kepastian peraturan hukum terkait teknis dan standar bangunan; d) Proses perizinan yang mudah dan transparan e) Tuntutan Kebutuhan masyarakat baik itu rumah tinggal/non rumah tinggal akan pentingnya dokumen Sertifikat laik Fungsi Bangunan Gedung	a) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Izin mendirikan bangunan b) Kurangnya Sosialisasi tentang wajibnya perizinan bangunan gedung; c) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait konsekuensi hukum akibat ketidaksesuaian antara bangunan gedung dengan perizinan yang dimiliki; d) Anggaapan masyarakat bahwa administrasinya kompleks; e) Biaya ke konsultan pengkaji bangunan Gedung yang lumayan besar dalam pengurusannya;	a) Kurang pedulinya masyarakat akan pentingnya Dokumen Legalitas Perizinan Bangunan; b) Kurang pedulinya masyarakat akan pentingnya Kesesuaian antara Bangunan Gedung yang dibangun dengan dokumen Legalitas Perizinan Bangunan dengan; c) Kurang pedulinya masyarakat akan pentingnya Dokumen Sertifikat Laik Fungsi Bangunan.	Diadakannya sosialisai ke masyarakat.

No.	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			f) Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Pemilik Bangunan		
	Persentase Sungai yang berkondisi Baik	Kondisi topografi kota bogor dan morfologi sungai yang berkelok menyebabkan sering terjadinya bencana longsor di tebingan sungai dan banjir di dataran rendah sehingga diperlukan perbaikan kondisi sungai untuk menjaga keamanan dan keselamatan warga terutama yang berlokasi di sekitar aliran sungai	a) Keterbatasan Anggaran sehingga perbaikan kondisi sungai belum dapat dilakukan secara optimal b) Rendahnya kesadaran masyarakat akan kebersihan sungai dan bahaya membangun di sempadan sungai c) Terbatasnya kewenangan pemerintah kota pada sungai utama sehingga tidak dapat mengintervensi kerusakan sungai secara langsung	a) Permasalahan banjir di sungai memerlukan penanganan komprehensif dari hulu hingga hilir, tak jarang hasil kajian memerlukan pembebasan lahan untuk penyelesaiannya, sehingga dibutuhkan biaya yang sangat besar b) Perilaku masyarakat yang masih kurang peduli akan kondisi sungai sehingga adanya pembangunan di sempadan sungai serta membuang sampah ke sungai	Melakukan upaya perbaikan kondisi sungai dengan anggaran dan sumber daya yang ada, serta melakukan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian sungai

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, 2025

Table 2.1.15.
Target dan Realisasi Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024

No.	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SAT.	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/ 2019)	Target					Realisasi					Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	PEKERJAAN UMUM																	
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	88,59	89,00	84,50	86,00	88,00	90,00	83,47	84,20	88,23	88,95	90,05	93,78	99.64	102.59	101.08	100,06
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	0,0660997	0,0642509	0,0634	0,0625	0,0617	0,0609	0,576	0,1203	0,817	0,197	0,1942	896,49	189,75	1307,20	319,28	318,88
3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	Persen	88,59	89,00	84,50	86,00	88,00	90,00	83,47	84,20	88,23	88,95	90,05	93,78	99.64	102.59	101.08	100,06
4	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 meter)	Meter	66,44	67,00	67,50	68,00	68,5	69,5	66,70	507,38	518,377	96,121	96,321	99,55	751,67	762,32	140,29	138,59
5	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	%	67,21	67,47	70,42	7,20	7,88	8,55	3,72	75,12	5,43	5,49	6,07	5,51	106,67	75,42	69,67	70,99
6	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	11,01	21,80	32,60	43,40	54,20	65,00	11,17	25,11	25,86	20,15	67,86	51,24	77,02	59,59	37,18	104,40
7	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	Persen	71,57	75	77,5	80	82,5	85	0,014	0,509	60,71	0,88	0,82	0,02	0,66	75,89	1,07	0,96
8	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya	Lokasi	745	865	985	1,105	1,225	1,345	863	921	985	1195	1295	99,77	93,50	89140,27	97551,02	96282,53
9	persentase irigasi kota dalam kondisi baik	Persen	45,83	58,75	51,45	52,23	53,01	53,79	57,50	51,58	52,62	53,66	54,65	97,87	100,25	100,75	101,23	101,60
10	Rasio jaringan irigasi	Point	0,2578	0,3304	0,3374	0,3445	0,3515	0,3574	0,2600	0,415	0,3450	0,3600	0,3720	78,69	123,00	100,15	102,42	104,09
11	Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik	Persen	90	91,03	91,69	92,54	93,38	94,23	91,04	91,71	94,81	82,46	85,73	100,01	100,02	102,45	88,30	90,97

No.	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SAT.	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/ 2019)	Target					Realisasi					Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
12	persentase penduduk berakses air minum	Persen	91,98	93,15	98,80	99,20	99,60	100	81,46	83,83	68,68	91,90	84,10	87,45	84,84	69,23	92,27	84,10
13	proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak,perkotaan dan perdesaan	persen	91,98	93,15	98,80	99,20	99,60	100	81,46	83,83	68,68	91,90	84,10	87,45	84,84	69,23	92,27	84,10
	PENATAAN RUANG																	
1	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Persen	35	37	39	0,0055	0,0067	0,0073	0,0046	-	0,323	0,0035	0,0055	0,01%	0,00%	5872,73 %	52,24%	75,34 %
2	Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	persen	80	82	84	86	88	90	82	90	95,18	86,90	88,59	100,00 %	107,14 %	110,67 %	98,75%	98,43 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2020-2024, masih terdapat beberapa indikator indikator penyelenggaraan pemerintah daerah yang belum tercapai 100% antara lain :

Table 2.1.16.
Faktor Pendukung dan Penghambat, Permasalahan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Indikator Penyelenggaraan Pemerintah

No.	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Ketersediaan dana yang memadai, kebijakan pemerintah yang mendukung infrastruktur, meningkatnya kebutuhan transportasi akibat pertumbuhan ekonomi dan populasi	Pendanaan yang terbatas, pembebasan lahan yang sulit, beban kendaraan yang berlebih (overloading), banjir akibat drainase yang tidak optimal	Infrastruktur jalan yang cepat mengalami kerusakan karena tonase kendaraan yang melewati kadang melebih tonase yang diperbolehkan serta tingginya jumlah lalu lintas kendaraan yang melintas, genangan air yang sering timbul setelah turunnya hujan	Perbaikan jalan dan drainase secara rutin dan berkala
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Pertumbuhan populasi dan kepadatan penduduk, faktor pemerintahan seperti kebijakan pembangunan infrastruktur, dan faktor infrastruktur yang meliputi investasi, anggaran, dan perencanaan pembangunan jalan	Keterbatasan anggaran pemerintah, kepadatan penduduk yang tinggi, keterbatasan lahan	Infrastruktur jalan tidak memadai, mengakibatkan kemacetan, aksesibilitas terbatas, dan tingginya biaya transportasi	Peningkatan anggaran infrastruktur jalan, pengembangan transportasi publik
3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 KM/jam)	Ketersediaan dana yang memadai, kebijakan pemerintah yang mendukung infrastruktur, meningkatnya kebutuhan	Pendanaan yang terbatas, pembebasan lahan yang sulit, beban kendaraan yang berlebih (overloading),	Infrastruktur jalan yang cepat mengalami kerusakan karena tonase kendaraan yang	Perbaikan jalan dan drainase secara rutin dan berkala, pembangunan jalan

No.	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		transportasi akibat pertumbuhan ekonomi dan populasi	banjir akibat drainase yang tidak optimal	melewati kadang melebih tonase yang diperbolehkan serta tingginya jumlah lalu lintas kendaraan yang melintas, genangan air yang sering timbul setelah turunnya hujan	baru sebagai alternatif akses jalan untuk menghindari penumpukkan kendaraan di tengah kota
4	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 meter)	Kebutuhan Aktivitas Pejalan Kaki, Kenyamanan dan Keamanan Pejalan Kaki, Manajemen Air Hujan	keterbatasan sumber daya, keterbatasan lahan, masalah pembebasan lahan, biaya konstruksi yang tinggi, kondisi geografis yang sulit	risiko banjir dan kerusakan infrastruktur seperti jalan berlubang, serta gangguan mobilitas pejalan kaki	investigasi dan survei, perancangan dan pembangunan infrastruktur drainase dan trotoar yang sesuai standar, perbaikan dan pemeliharaan berkala, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menjaga fungsi sistem drainase
5	Persentase rumah tangga yang dilayani sistem air limbah yang aman	Pemenuhan akses sanitasi melalui rantai layanan yang dikelola secara aman, berkelanjutan dan inklusif sesuai dengan karakteristik wilayah	Belum optimalnya pelayanan Kesehatan, Rendahnya cakupan air limbah domestik aman berkelanjutan, kurangnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha	Banyak tangki septik rumah tangga belum memenuhi standar teknis dan tidak dilakukan penyedotan berkala, Terbatasnya jaringan sistem terpusat dan terbatasnya jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), infrastruktur komunal	Mendorong pembangunan dan revitalisasi tangki septik kedap di rumah tangga dan fasilitas publik, Subsidi sedot tinja bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Pembangunan baru IPLT, Pembangunan IPAL komunal di kawasan padat dan

No.	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				telah dibangun belum optimal dari segi pemanfaatan dan pemeliharaan, Penerapan regulasi yang belum optimal berdampak pada pengawasan dari stakeholder terhadap masyarakat, Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyedotan rutin dan sanitasi aman, Kelembagaan pengelola, terutama di tingkat masyarakat (KSM), masih terbatas kapasitas dan pendampingannya, Pembiayaan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur air limbah masih sangat tergantung pada APBD atau bantuan pemerintah pusat, Belum semua wilayah memiliki KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara) aktif	IPAL Komunal terintegrasi di permukiman baru, Rehabilitasi dan perluasan jaringan air limbah eksisting, Memaksimalkan Peran aplikasi SISNINJA (Sistem Pemesanan Digital Jasa Sedot Lumpur Tinja), Pemutakhiran data spasial dan baseline sistem sanitasi rumah tangga berbasis RT, Sosialisasi dan Edukasi rutin berbasis RW melalui Forum Komunikasi Sanitasi dan lomba RW sanitasi terbaik, Pembangunan/ Peningkatan kapasitas IPLT eksisting (kapasitas,armada,SDM)

No.	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
				atau kader sanitasi yang dapat menggerakkan perubahan perilaku	
6.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Kerja Sama Antar-Instansi, Partisipasi dan Pelaporan dari Masyarakat, Dukungan Regulasi"	Ketersediaan Anggaran	Keterbatasan SDM dan Teknologi	Pengajuan anggaran yang memadai
7.	Tidak terjadi genangan >2 kali setahun	Drainase berkondisi baik (kapasitas dan kualitas) sehingga tidak menimbulkan genangan	Kapasitas drainase yang tidak lagi menampung	Perilaku masyarakat menjaga keberfungsian Drainase (co. Buang sampah sembarangan)	Penegakan regulasi, Ketersediaan anggaran untuk perbaikan drainase
8.	Jumlah lokasi rawan longsor yang dibangun TPTnya	Kebutuhan akan kondisi rasa aman terutama bagi masyarakat yang berada di daerah tebing saluran atau sungai	Ketersediaan anggaran, kondisi geografis kota bogor yang berbukit	Perilaku masyarakat yang melakkan pembangunan di tebing saluran dan sungai sehingga menyebabkan terjadinya longsor	Melakukan upaya perbaikan tebing longsor dan melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak membangun di sempadan saluran dan sungai
9.	Persentase irigasi kota dalam kondisi baik	Rehabilitasi Saluran Irigasi secara berkala	seiring berkurangnya (menghilangnya) lahan yang membutuhkan irigasi, sehingga saluran irigasi seolah tidak lagi menjadi prioritas	Alih fungsi saluran irigasi menjadi menjadi saluran drainase lingkungan	Memberikan perhatian yang lebih terhadap pemeliharaan dan perbaikan saluran irigasi
10.	Rasio jaringan irigasi	Adanya kebutuhan akan terpeliharanya kondisi jaringan irigasi eksisting	Keterbatasan anggaran, rendahnya kepedulian masyarakat dalam menjaga kondisi saluran	Perubahan fungsi saluran irigasi menjadi drainase	Melakukan upaya pemeliharaan kondisi saluran agar tetap berfungsi dengan baik

No.	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
					dan memastikan ketersediann anggaran
11.	Persentase saluran/ sungai yang berkondisi baik	Rehabilitasi tebing sungai melalui pembangunan/ perbaikan TPT	Pembangunan liar di sempadan dan badan sungai	Keterbatasan Sumber Daya dalam hal pengawasan perlindungan sungai	Penegakan regulasi dalam hal perlindungan sungai
12.	persentase penduduk berakses air minum	1. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik dilingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat umum lainnya. 2. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya	1. Belum keseluruhan data diperoleh terkait data masyarakat yang memiliki akses SPAM BJP 2. Terbatasnya ketersediaan air baku 3. Masih di atasnya batas toleransi maksimal Tingkat kebocoran/kehilangan air. 4. Belum optimalnya kontinuitas/jam pelayanan 5. mayoritas masyarakat di daerah pemukiman padat berpandangan bahwa air bersih haruslah murah bahkan gratis 6. Masih tingginya kebutuhan konservasi sumber daya air untuk menjamin kepastian	1. sumber air baku yang semakin berkurang. 2. Belum optimalnya cakupan pelayanan.	1. Pengembangan SPAM meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan 2. Pembangunan baru dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi belum tersedianya kapasitas, kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal dan/atau kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan; 1. Perluasan dilakukan pada unit distribusi

No.	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			pasokan air baku yang dapat diandalkan. 7. Masih kurangnya pengelolaan lingkungan terutama untuk konservasi dan perlindungan mata air		berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat 2. Perlu pengelolaan konservasi sumber daya air untuk menjamin kepastian pasokan air baku yang dapat diandalkan 3. sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan air minum aman
13.	proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak,perkotaan dan perdesaan	Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah; Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM	1. Belum keseluruhan data diperoleh terkait data masyarakat yang memiliki akses SPAM BJP 2. Terbatasnya ketersediaan air baku Masih di atasnya batas toleransi maksimal Tingkat kebocoran/kehilangan air.	1. sumber air baku yang semakin berkurang. 2. Belum optimalnya cakupan pelayanan.	1. Pengembangan SPAM meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan 2. Pembangunan baru dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi belum tersedianya

No.	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
			3. Belum optimalnya kontinuitas/jam pelayanan 4. mayoritas masyarakat di aerah pemukiman padat berpandangan bahwa air bersih haruslah murah bahkan gratis 5. Masih tingginya kebutuhan konservasi sumber daya air untuk menjamin kepastian pasokan air baku yang dapat diandalkan. 6. Masih kurangnya pengelolaan lingkungan terutama untuk konservasi dan perlindungan mata air		kapasitas, kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal dan/atau kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan; 3. Perluasan dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat 4. Perlu pengelolaan konservasi sumber daya air untuk menjamin kepastian pasokan air baku yang dapat diandalkan 5. sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan air minum aman

Sumber : Hasil Analisis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

I.4.2.2 Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Tingkat Kota Bogor ada 2 pelayanan dasar yaitu sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Table 2.1.17.
Hasil Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Bogor

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Tahun Dasar 2022	Target					Realisasi					Capaian (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari - Satuan KK/SR	KK/SR																
a	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/ SR	68.68%	241.946	242,064	241,744	241,744	242,443	175.822	165,793	166,036	185,645	193,296	72.67	68.49	68.68	76.79	79,73
b	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh,	Rumah Tangga		241.946	242,064	241,744	241,744	242,443	175.822	165,793	166.036	185,645	193,296	72.67	68.49	68.68	76.79	79.73

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Tahun Dasar 2022	Target					Realisasi					Capaian (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)																	
c	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	15.33%	241.946	242,064	241,744	241,744	242,443	10.428	37,137	37,137	37,177	67,027	4.31	15.34	15.36	15.37	27.64
d	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	0.65%	241.946	242,064	241,744	241,744	242,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Tahun Dasar 2022	Target					Realisasi					Capaian (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik-Satuan KK/SR	KK/SR																
a	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPAL D-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	78.45%	241.946	242,064	241,744	241,744	242,443	172.991	181,842	189,646	191,390	192,571	71.50	75.12	78.45	79.17	79.43
b	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPAL D-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25	Rumah Tangga	73.02%	241.946	242,064	241,744	241,744	242,443	163.241	169,235	176,381	178,089	177,866	67.47	69.91	72.96	73.66	73.36

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Tahun Dasar 2022	Target					Realisasi					Capaian (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	jiwa/hektar)																	
c	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPAL D-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	2.59%	241.946	242,064	241,744	241,744	242,443		5,754	5.754	6,313	7,587		2.38	2.38	2.61	3.13
d	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPAL D-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air	Rumah Tangga	5.78%	241.946	242,064	241,744	241,744	242,443										

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Tahun Dasar 2022	Target					Realisasi					Capaian (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	limbah domestik)																	
e	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPAL D-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	2.84%	241.946	242,064	241,744	241,744	242,443		6,853	6.841	6,988	7,118		2.83	2.83	2.89	2.94
f	Pengolahan Lumpur Tinja (IPAL)	Rumah Tangga	0.21%															

Sumber : Hasil Analisis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan realisasi dan capaian terhadap target pemenuhan kebutuhan pokok air minum melalui sistem penyediaan air minum (SPAM) baik yang menggunakan jaringan perpipaan maupun non-perpipaan, dari tahun 2020 hingga 2024. Meskipun terdapat kemajuan pada beberapa indikator, pencapaian target belum sepenuhnya optimal, terutama pada akses air minum non-jaringan dan dari segi kualitas air.

I.4.3. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, kelompok sasaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

Table 2.1.18.
Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Kelompok Sasaran	Kegiatan Layanan
1	Masyarakat Kota Bogor	Pembangunan/Penyediaan infrastruktur meliputi: - Pembangunan Jalan, Drainase, dan Trotoar - Pembangunan Jembatan - Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing/Tembok Penahan Tanah - Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) Skala Permukiman - Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) Skala Komunal - Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALDS) Skala Individu - Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan - Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Peningkatan, dan perbaikan infrastruktur meliputi: - Peningkatan dan Perbaikan Jalan, Drainase, dan Trotoar - Peningkatan dan Perbaikan Bangunan Perkuatan Tebing/Tembok Penahan Tanah Pemeliharaan infrastruktur meliputi: - Pemeliharaan Rutin Jalan, Drainase, dan Trotoar - Pemeliharaan Berkala Jalan - Pemeliharaan Saluran, Sungai, Situ dan Danau - Pemeliharaan Bangunan Perkuatan Tebing/Tembok Penahan Tanah - Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Pelayanan Publik meliputi: - Penyediaan data Infrastruktur Jalan, Jembatan, Drainase, Trotoar, Sungai, Saluran, Situ, Danau - Penyediaan Data Rencana Pengembangan Infrastruktur Jalan di Kota Bogor - Jasa Pelayanan Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Pembangunan Gedung - Jasa Pelayanan Penerbitan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) - Jasa Pelayanan Penerbitan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi - Jasa Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja - Jasa Pelayanan Sambungan Rumah untuk Pengolahan Air Limbah

No.	Kelompok Sasaran	Kegiatan Layanan
		- Jasa Pelayanan Sambungan Rumah untuk Air Minum - Sosialisasi, Pelatihan, Penyediaan Air Limbah dan Air Minum yang aman - Penyediaan Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bogor
2.	Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan	Pelayanan Publik meliputi: - Penyediaan data Infrastruktur Jalan, Jembatan, Drainase, Trotoar, Sungai, Saluran, Situ, Danau - Penyediaan Data Rencana Pengembangan Infrastruktur Jalan di Kota Bogor - Jasa Pelayanan Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Pembangunan Gedung Pemerintah - Jasa Pelayanan Penerbitan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) - Jasa Pelayanan Penerbitan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) - Jasa Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja - Jasa Pelayanan Sambungan untuk Pengolahan Air Limbah - Jasa Pelayanan Sambungan untuk Air Minum - Penyediaan Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bogor
3	Instansi Vertikal, Kemetrian, Badan, Lembaga, dan Propinsi Jawa Barat	Pelayanan Publik meliputi: - Penyediaan data Infrastruktur Jalan, Jembatan, Drainase, Trotoar, Sungai, Saluran, Situ, Danau - Penyediaan Data Rencana Pengembangan Infrastruktur Jalan di Kota Bogor - Jasa Pelayanan Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Pembangunan Gedung Pemerintah - Jasa Pelayanan Penerbitan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) - Jasa Pelayanan Penerbitan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) - Jasa Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja - Jasa Pelayanan Sambungan untuk Pengolahan Air Limbah - Jasa Pelayanan Sambungan untuk Air Minum - Informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bogor
4.	Pelaku Usaha	Pelayanan Publik meliputi: - Penyediaan data Infrastruktur Jalan, Jembatan, Drainase, Trotoar, Sungai, Saluran, Situ, Danau - Penyediaan Data Rencana Pengembangan Infrastruktur Jalan di Kota Bogor - Penyediaan Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kelompok Sasaran	Kegiatan Layanan
		- Jasa Pelayanan Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Pembangunan Gedung Pemerintah - Jasa Pelayanan Penerbitan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) - Jasa Pelayanan Penerbitan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) - Pembinaan dan Pengembangan Jasa Kontruksi - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi - Jasa Pelayanan Pengujian Perkerasan Aspal, Beton. - Jasa Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja - Jasa Pelayanan Sambungan untuk Pengolahan Air Limbah - Jasa Pelayanan Sambungan untuk Air Minum - Informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bogor
5.	Penyandang Disabilitas dan Lansia	Pelaksanaan Pembangunan Konstruksi rama kelompok rentan, dan pelayanan publik lainnya terka urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber: Hasil Analisis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, 2025

I.4.4. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, yang menjadi mitra pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

Table 2.1.19.
Tabel Kelompok Mitra Pelayanan

No.	Mitra Kerja	Kegiatan Layanan
1.	Perangkat Daerah	Kolaborasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur (baik dalam hal persiapan dan pelaksanaan).
2.	Kementerian, Badan, Lembaga, Pemerintah Propinsi, BUMD/BUMN, Pelaku Usaha, Filanthrophi, Lembaga Non Pemerintah/NGOs	Kolaborasi dan Kerjasama Pembiayaan/Pendanaan Pembangunan, Perencanaan
3.	DPRD	Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran serta legalisasi peraturan daerah
4.	Media	Publikasi Kegiatan Sosialisasi, Pelatihan, Pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Bogor
5.	BPS dan BIG	Penyedia Data dan Informasi
6.	Penyedia Jasa Konsultansi (Perencana, Supervisi)	Penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, dan penyusunan kajian
7.	Penyedia Jasa Konstruksi	Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
8.	Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian	Pelaksanaan Riset dan Kajian, Penyusunan Dokumen Perencanaan
9.	KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)	Pengelola Air Limbah Domestik Skala Komunal di tingkat masyarakat
10.	KPP (Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat)	Melaksanakan pemanfaatan dan pemeliharaan berkelanjutan terhadap infrastruktur sanitasi yang telah dibangun serta menjebatani hubungan antara

No.	Mitra Kerja	Kegiatan Layanan
		pengguna layanan dan pengelola teknis. serta mendorong perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.
11.	Satgas Naturalisasi Ciliwung Cisadane	Menjalankan program naturalisasi Sungai Ciliwung Cisadane di Kota Bogor, memberikan edukasi dan melakukan pendampingan kepada masyarakat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di sekitar bantaran sungai.

Sumber: Hasil Analisis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, 2025

I.4.5. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja (Jika Ada)

Dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

Table 2.1.20.
Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja (jika ada)

No.	Nama BUMD	Bentuk Dukungan	Tahun
1	*2*	*3*	*4*
1.	Perumda Tirta Pakuan	Penyajian data, perencanaan, operator pelayanan air minum, membantu peningkatan capaian air minum jaringan perpipaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyediaanaAir minum, rencana penugasan pengelolaan air limbah domestik	2025 s/d 2030

Sumber: Hasil Analisis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, 2025

I.4.6. Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis serta pencapaian kinerja yang optimal, menjadi suatu keniscayaan perlunya kolaborasi dan kerjasama perangkat daerah dengan para pemangku kepentingan secara pentahelix. Adapun kerjasama yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari tahun 2019 sampai saat ini dan masih akan berkesinambungan ke depan adalah sebagai berikut :

Table 2.1.21.
Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

NO	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PARA PIHAK		NOMOR		TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (Tahun)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
1	PKS.62	KSDD	Yusmada Faizal /ka SDA Prov DKI Jakarta	Chusnul Rozaqi/ ka DPUPR	119/Perj.62-DPUPR/2021	10141/073-7	25 November 2021	5	25 November 2026	Penyediaan dan Pengelolaan Alat Ukur Curah Hujan Otomatis di Wilayah Kota Bogor
2	KB.08	KSDPK	Bima Arya/ Walikota Bogor	Direktur/ Utama PT. Olympic Bangun Persada	119/KB.08-DPUPR/2023	010HK/LEGAL/PEMKOT-OBP/II/2023	6 Februari 2023	5	6 Februari 2028	Peningkatan Kapasitas Simpang Jalan Raya Bogor-Jalan Sholeh Iskandar-Jalan Tol Bogor Ring Road Pada On Ramp Kedung Halang
	IMPLEMENTASI TAHAP I 1. Pembangunan/ Peningkatan Jalan Kolektor Sekunder menuju Akses Bukaan Tol Bogor Outer Ring Road KM 3+600; 2. Pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan Akses Tol Bogor Outer Ring Road KM 3+600. TAHAP II 1. Pembangunan Jalan Frontage R2 (sisi utara) dari Jl. KS Tubun sampai dengan Jl. Kaum Sari.									

NO	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PARA PIHAK		NOMOR		TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (Tahun)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
	Note: Dalam pelaksanaan Tahap I, PT. Olympic Bangun Persada melakukan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Marga Sarana Jabar, berdasarkan MoU antara Pemkot Bogor dan PT. MSJ."									
3	KB.19	Sinergi	Diana Kusumastuti / Direktur Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Bima Arya/ Walikota Bogor	HK0101.Dc/486	119/KB.19-DPUPR/2023	28 April 2023	3 Tahun	28 April 2026	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Melalui Kegiatan National Urban Water Supplay Project (NUWSP)
	IMPLEMENTASI: Pengembangan Sambungan Rumah (SR) sebanyak 1.000 SR									
4	PKS.32	KSDPK	Rena Da Frina (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor)	Ida Bagus Surya Sanjaya /Direktur Utama PT Bima Sakti Jinluo	119/Perj.32-DPUPR/2023	09-PKSFS/BSJ/III/2023	30 Maret 2023	1	30 Maret 2024	Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study) Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Bogor
	IMPLEMENTASI: Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study) Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Bogor									
5	PKS.86	SINERGI	Rena Da Frina (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Waito Wongateleng / Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor	119/Perj.86-DPUPR/2023	06/M.2.12/Gs/08/2023	7 Agustus 2023	2	6 Agustus 2025	Penyelesaian Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor

NO	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PARA PIHAK		NOMOR		TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (Tahun)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
			Ruang Kota Bogor)							
	IMPLEMENTASI: Pembuatan Legal Opinion Penggantian Jembatan Otista terkait kepastian bangunan cagar budaya, Pendampingan Pekerjaan Prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.									
6	KB.08	KSDPK	Bima Arya/ Walikota Bogor	Wahyu Kurniawan Bayangkara/ Direktur PT. Sejahtera Eka Graha	500.12.17. 1/KB.08-PUPR/2024	MoU.14/BOD-SEG/IV/24	1 April 2024	5	1 April 2029	Perencanaan Pekerjaan Infrastruktur untuk Akses Bersama di Kawasan Pengembangan Pusat Pemerintahan Kota Bogor
	IMPLEMNTASI: PT. SEG dan Pemerintah Kota Bogor telah membuat dokumen perencanaan jalan akses rencana kawasan kantor pemerintahan Kota Bogor									
	KB.08	KSDPK	Bima Arya/ Walikota Bogor	Cornelius Widjaja/ Direktur Utama PT. Kharisma Tangguh Persada	500.12.17. 1/KB.08-PUPR/2024	01/SK-KTP?IV?204	1 April 2024	5	1 April 2029	Perencanaan Pekerjaan Infrastruktur untuk Akses Bersama di Kawasan Pengembangan Pusat Pemerintahan Kota Bogor
	IMPLEMNTASI: PT. KTP menyetuui dokumen perencanaan jalan akses rencana kawasan kantor pemerintahan Kota Bogor yang telah dibuat oleh PT. SEG dan Pemerintah Kota Bogor									
7	PKS.17	KSDPK	Rena De Frina/ Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	Andryansyah Daslim / Wakil Ketua Bidang Jasa Konstruksi Kamar Dagang dan Industri Kota Bogor	500.12.17. 1/Perj.17-DPUPR/2024	007/WKB/PKS/II/2024	29 Februari 2024	3	31 Desember 2026	Kerja Sama Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi Kompeten Kerja (SKK) di Kota Bogor

NO	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PARA PIHAK		NOMOR		TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (Tahun)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
	IMPLEMNTASI: 1. Sertifikasi Operator Alat Berat; 2. Sertifikasi Teknisi/Analis Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan									
8	PKS.26	KSDPK	Rena De Frina/ Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	Wahyu Kurniawan Bayangkara/ Direktur PT. Sejahtera Eka Graha	500.12.1.1 /Perj.26-DPUPR/2024	P.129/BOD-SEG/P/IV/2024	1 April 2024	4	31 Desember 2028	Pembangunan Jalan Akses Bersama Menuju Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Bogor
	IMPLEMNTASI: 1. Sertifikasi Operator Alat Berat; 2. Sertifikasi Teknisi/Analis Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan									
	PKS.26	KSDPK	Rena De Frina/ Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	Cornelius Widjaja/ Direktur Utama PT. Kharisma Tangguh Persada	500.12.17. 1/Perj.26-DPUPR/2024	02/SK-KTP/IV/24	1 April 2024	4	31 Desember 2028	Pembangunan Jalan Akses Bersama Menuju Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Bogor
	IMPLEMNTASI: Pembangunan Jalan Akses Bersama menuju Kawasan Pusat Pemerintah Kota Bogor di wilayah Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor Masih belum terbangun									
9	PKS.55	KSDPK	Rena De Frina/ Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan	Roni Sanggoro/ Direktur Utama PT Usaha Adi Sanggoro	500.12.17. 1/Perj.55-DPUPR/2024	014.536/PKS/UAS-PUPR/VII/2024	22 Juli 2024	5	22 Juli 2029	Pemantauan dan Perapihan Infrastuktur Telekomunikasi di Kota Bogor

NO	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PARA PIHAK		NOMOR		TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (Tahun)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
			Ruang Kota Bogor							
	IMPLEMNTASI: 1. Sudah dilaksanakan relokasi utilitas di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Otista 2. Disepakati dilaksanakannya pemeliharaan, perapihan dan penertiban di seluruh area Kota Bogor secara berkala									
10	PKS.57	KSDPK	Rena De Frina/ Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	Omar Syarif / Direktur Utama PT Nap Info Lintas Nusa	500.12.17.1/Perj.57-DPUPR/2024	005.PKS/LRG/VII/2024	22 Juli 2024	5	22 Juli 2029	Pemantauan dan Perapihan Infrastuktur Telekomunikasi di Kota Bogor
	IMPLEMENTASI: 1. Sudah dilaksanakan relokasi utilitas di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Otista 2. Disepakati dilaksanakannya pemeliharaan, perapihan dan penertiban di seluruh area Kota Bogor secara berkala									
11	PKS.58	KSDPK	Rena De Frina/ Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	Robestus/ Manager Legal PT Jala Lintas Media	500.12.17.1/Perj.58-DPUPR/2024	141/PKS/JLM-PUPR/VII/2024	22 Juli 2024	5	22 Juli 2029	Pemantauan dan Perapihan Infrastuktur Telekomunikasi di Kota Bogor
	IMPLEMNTASI: 1. Sudah dilaksanakan relokasi utilitas di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Otista 2. Disepakati dilaksanakannya pemeliharaan, perapihan dan penertiban di seluruh area Kota Bogor secara berkala									

NO	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PARA PIHAK		NOMOR		TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (Tahun)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
12	PKS.59	KSDPK	Rena De Frina (Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor)	Dicky /Direkrtur PT Power Telecom	500.12.17.1/Perj.59-DPUPR/2024	020/PKS/PWT-PEMKOT BOGOR/VII/2024	22 Juli 2024	5	22 Juli 2029	Pemantauan dan Perapihan Infrastuktur Telekomunikasi di Kota Bogor
	IMPLEMNTASI: 1. Sudah dilaksanakan relokasi utilitas di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Otista 2. Disepakati dilaksanakannya pemeliharaan, perapihan dan penertiban di seluruh area Kota Bogor secara berkala									
13	PKS.60	KSDPK	Rena De Frina/ Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	Reynaldy Fauzan/Legal Mangaer PT Cemerlang Multimedia	500.12.17.1/Perj.60-DPUPR/2024	192/PKS/CM/LGL/VII/2024	22 Juli 2024	5	22 Juli 2029	Pemantauan dan Perapihan Infrastuktur Telekomunikasi di Kota Bogor
	IMPLEMNTASI: 1. Sudah dilaksanakan relokasi utilitas di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Otista 2. Disepakati dilaksanakannya pemeliharaan, perapihan dan penertiban di seluruh area Kota Bogor secara berkala									
14	PKS.61	KSDPK	Rena De Frina (Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor)	Septian Catur /Senior Manager PT Supra Primatama Nusantara	500.12.17.1/Perj.61-DPUPR/2024	041/PKS/BIZNET/VII/2024	22 Juli 2024	5	22 Juli 2029	Pemantauan dan Perapihan Infrastuktur Telekomunikasi di Kota Bogor

NO	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PARA PIHAK		NOMOR		TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (Tahun)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
	IMPLEMNTASI: 1. Sudah dilaksanakan relokasi utilitas di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Otista 2. Disepakati dilaksanakannya pemeliharaan, perapihan dan penertiban di seluruh area Kota Bogor secara berkala									
15	PKS.62	KSDPK	Rena De Frina/ Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	Sivi, Rony /Wakil Presiden Direktur PT. Iforte Solusi Infotek	500.12.17.1/Perj.62-DPUPR/2024	37/ISI-Pemerintah Daerah Kota Bogor/Governtmen Relation/VII/2024	22 Juli 2024	5	22 Juli 2029	Pemantauan dan Perapihan Infrastuktur Telekomunikasi di Kota Bogor
	IMPLEMNTASI: 1. Sudah dilaksanakan relokasi utilitas di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Otista 2. Disepakati dilaksanakannya pemeliharaan, perapihan dan penertiban di seluruh area Kota Bogor secara berkala									
16	PKS.62	KSDPK	Rena De Frina/ Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	Irawan Delfi Nurcahyo/ PT Mega Akses Persada	500.12.17.1/Perj.62-DPUPR/2024	0894/MAP/LGL/LOC-BGR/VII/2024	22 Juli 2024	5	22 Juli 2029	Pemantauan dan Perapihan Infrastuktur Telekomunikasi di Kota Bogor
	IMPLEMNTASI: 1. Sudah dilaksanakan relokasi utilitas di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Otista 2. Disepakati dilaksanakannya pemeliharaan, perapihan dan penertiban di seluruh area Kota Bogor secara berkala									
17	PKS.63	KSDPK	Rena De Frina/ Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan	M. AMPERANDUS SIMANJUNTAK, YA'ARO HULU/ Direktur PT	500.12.17.1/Peri.63-DPUPR/2024	00133-PKS/TIS-PUPR/VII 2024	22 Juli 2024	5	22 Juli 2029	Pemantauan dan Perapihan Infrastuktur Telekomunikasi di Kota Bogor

NO	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PARA PIHAK		NOMOR		TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (Tahun)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
			Ruang Kota Bogor	Trans Indonesia Superkoridor						
	IMPLEMNTASI: 1. Sudah dilaksanakan relokasi utilitas di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Otista 2. Disepakati dilaksanakannya pemeliharaan, perapihan dan penertiban di seluruh area Kota Bogor secara berkala									
18	PKS.64	KSDPK	Rena De Frina/ Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	JOHANNES, KANISHKA GAYAN WICKRAMA/ Chief Commercial Officer PT Link Net Tbk	500.12.17.1/Perj.64-DPUPR/2024	PK-066/CSL-LN/NRO-PEMKOTBOGOR/VII/24	22 Juli 2024	5	22 Juli 2029	Pemantauan dan Perapihan Infrastuktur Telekomunikasi di Kota Bogor
	IMPLEMNTASI: 1. Sudah dilaksanakan relokasi utilitas di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Otista 2. Disepakati dilaksanakannya pemeliharaan, perapihan dan penertiban di seluruh area Kota Bogor secara berkala									
19	PKS.65	KSDPK	Rena De Frina/ Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	BIANTONO SUBASTIAN/ Manager Sitac PT Parsaoran Global Datatrans	500.12.17.1/Perj.65-DPUPR/2024	2207/PKS-PPIT/PGD/VII/2024	22 Juli 2024	5	22 Juli 2029	Pemantauan dan Perapihan Infrastuktur Telekomunikasi di Kota Bogor
	IMPLEMNTASI: 1. Sudah dilaksanakan relokasi utilitas di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Otista 2. Disepakati dilaksanakannya pemeliharaan, perapihan dan penertiban di seluruh area Kota Bogor secara berkala									

NO	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PARA PIHAK		NOMOR		TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (Tahun)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
20	PKS.66	KSDPK	Rena De Frina/ Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	HARIYADI /Direktur dari PT Aplikanusa Lintasarta	500.12.17.1/Perj.66-DPUPR/2024	220/41000/LA/PKS/2024	22 Juli 2024	5	22 Juli 2029	Pemantauan dan Perapihan Infrastuktur Telekomunikasi di Kota Bogor
	IMPLEMNTASI: 1. Sudah dilaksanakan relokasi utilitas di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Otista 2. Disepakati dilaksanakannya pemeliharaan, perapihan dan penertiban di seluruh area Kota Bogor secara berkala									
21	PKS.71	KSDPK	Rena De Frina (Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor)	AGUS SULISTIO/ SVP Ilead of Network Operations PT Indosat Tbk	500.12.17.1/Perj.71-DPUPR/2024	457/ROO-ROAD/NET/24	22 Juli 2024	5	22 Juli 2029	Pemantauan dan Perapihan Infrastuktur Telekomunikasi di Kota Bogor
	IMPLEMNTASI: 1. Sudah dilaksanakan relokasi utilitas di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Otista 2. Disepakati dilaksanakannya pemeliharaan, perapihan dan penertiban di seluruh area Kota Bogor secara berkala									
22	PKS.75	KSDPK	Rena De Frina/ Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	FARIZ AZHAR HARAHAP/ Kuasa Direksi PT Eka Mas Republik	500.12.17.1/Perj.75-DPUPR/2024	002/PKS-GOVREL-BOGOR/EMR/VII/2024	22 Juli 2024	5	22 Juli 2029	Pemantauan dan Perapihan Infrastuktur Telekomunikasi di Kota Bogor

NO	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PARA PIHAK		NOMOR		TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (Tahun)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
	IMPLEMNTASI: 1. Sudah dilaksanakan relokasi utilitas di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Otista 2. Disepakati dilaksanakannya pemeliharaan, perapihan dan penertiban di seluruh area Kota Bogor secara berkala									
23	PKS.76	KSDPK	Rena De Frina/ Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	PURWAHONO TRISNA MURTI/ Project and Operation Manager PT Uninet Media Telecommunication	500.12.17.1/Perj.76-DPUPR/2024	007/LGLJUMTe1PDKB/PKS/VII/2024	22 Juli 2024	5	22 Juli 2029	Pemantauan dan Perapihan Infrasuktur Telekomunikasi di Kota Bogor
	IMPLEMNTASI: 1. Sudah dilaksanakan relokasi utilitas di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Otista 2. Disepakati dilaksanakannya pemeliharaan, perapihan dan penertiban di seluruh area Kota Bogor secara berkala									
24	PKS.77	KSDPK	Rena De Frina/ Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	TJANDRA WIRYA WIDJAYA/ Direktur PT Quantum Tera Network	500.12.17.1/Peri.77-DPUPR/2024	001/PKS/QTN-PUPR/VII/2024	22 Juli 2024	5	22 Juli 2029	Pemantauan dan Perapihan Infrastuktur Telekomunikasi di Kota Bogor
	IMPLEMNTASI: 1. Sudah dilaksanakan relokasi utilitas di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Otista 2. Disepakati dilaksanakannya pemeliharaan, perapihan dan penertiban di seluruh area Kota Bogor secara berkala									
25	PKS.95	KSDPK	Atep Budiman /Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan	NUR SYAHRIZA/ Sitac & Project Permit Division	500.12.17.1/Peri.95-DPUPR/2024	0118/TBIG-TBE-01/PMS/06/X/2024	11 Oktober 2024	5	11 Oktober 2029	Pemantauan dan Perapihan Infrastuktur Telekomunikasi di Kota Bogor

NO	JENIS DOKUMEN	BENTUK	PARA PIHAK		NOMOR		TANGGAL PENANDATANGANAN	MASA BERLAKU (Tahun)	BERLAKU SAMPAI DENGAN	TENTANG
			PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
			Penataan Ruang Kota Bogor	Head PT Tower Bersama						
	IMPLEMNTASI: 1. Sudah dilaksanakan relokasi utilitas di Jl. Ahmad Yani dan Jl. Otista 2. Disepakati dilaksanakannya pemeliharaan, perapihan dan penertiban di seluruh area Kota Bogor secara berkala									
26	PKS.110	KSDPK	Atep Budiman /Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	Bayu Prasetyo Aji/Area Manager PT Sandya Sistem Indonesia	500.12.17.1/Perj.110-DPUPR/2024		25 November 2024	5	25 November 2029	Pemantauan dan Perapihan Infrastuktur Telekomunikasi di Kota Bogor
27	PKS.111	KSDPK	Atep Budiman /Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	Yudhitia Sinatra/Head Of Sitac & Permit PT Asia net Media Televisi	500.12.17.1/Perj.111-DPUPR/2024	2024/SPEM-AMT/1407	25 November 2024	5	25 November 2029	Pemantauan dan Perapihan Infrastuktur Telekomunikasi di Kota Bogor

Sumber: Hasil Analisis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, 2025

I.4.7. Inovasi Perangkat Daerah

Table 2.1.22.
Tabel Inovasi Perangkat Daerah

No.	Inovasi Eksisting			Rencana		
	Nama Inovasi	Tahun	Gambaran Singkat	Nama Inovasi	Tahun	Gambaran Singkat
1	SISNINJA	2024	Sistem informasi Sedot tinja terjadwal, merupakan aplikasi yang terdiri dari fitur Pemesanan jasa layanan berbasis Website dan mobile	SI-IPAL Jelita	2025	Pengembangan Fitur layanan dari sisninja untuk lebih mempermudah pelanggan dengan layanan utama L2T2
2				Daftar Tenaga Ahli	2025	Penyediaan daftar Ternaga Ahli bersertifikat keterangan ahli untuk pemohon PBG/SLF, untuk biaya jasa dan lain-lain DPUPR tidak terlibat di dalamnya

Pada tahun 2024, telah dikembangkan sebuah inovasi bernama Sisninja. Inovasi ini merupakan sistem informasi untuk layanan sedot tinja terjadwal yang berbasis aplikasi. Aplikasi ini menyediakan fitur pemesanan jasa layanan sedot tinja yang dapat diakses melalui website maupun perangkat mobile, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan tersebut secara digital.

Sebagai kelanjutan dari inovasi tersebut, direncanakan pada tahun 2025 akan diluncurkan pengembangan lanjutan dengan nama SI-IPAL Jelita. Inovasi ini bertujuan untuk mengembangkan fitur layanan dari Sisninja, agar semakin mempermudah pelanggan dalam mengakses layanan utama L2T2 (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal). Pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan serta efisiensi dalam pengelolaan limbah domestik.

I.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

I.5.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan PD

Table 2.2.1.
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD

No.	Permasalahan RPJMD	Permasalahan KLHS	Permasalahan RTRW	Renstra K/L	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Penurunan Kualitas dan Kuantitas sumberdaya air	1. Akses terhadap infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang belum memadai 2. Belum terpenuhi dan meratanya terhadap infrastruktur air bersih dan sanitasi secara menyeluruh	1. Belum meratanya penyediaan jaringan infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan dasar yang berkualitas yang berdampak pada ketimpangan wilayah			Belum meratanya layanan akses rumah tangga terhadap penyediaan air minum dan air limbah yang layak dan aman dan berkelanjutan
2	Belum optimalnya kualitas jalan dan jembatan			Infrastruktur dan sistem transportasi yang terintegrasi	Infrastruktur dan Sistem Transportasi yang Terintegrasi	Belum optimalnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan (panjang jalan, lebar jalan, kecepatan)
3	Belum optimalnya pembangunan tata ruang	● Belum optimalnya upaya pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	● Indikasi pemanfaatan ruang untuk perwujudan rencana struktur dan pola ruang belum sepenuhnya dirumuskan tahapan waktu perencanaannya dengan	● Terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penataan ruang yang menyebabkan kurangnya sinkronisasi	● Rencana pemanfaatan ruang yang memfasilitasi aktivitas masyarakat belum optimal ● Pengendalian pemanfaatan ruang belum maksimal	Belum terwujudnya struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Rencana Tata Ruang

No.	Permasalahan RPJMD	Permasalahan KLHS	Permasalahan RTRW	Renstra K/L	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			memperhatikan skala prioritas dan indikasi pembiayaannya, sehingga pencapaian kinerja rencana tata ruang menjadi tidak optimal	kebijakan dan menurunkan efektivitas implementasi tata ruang; ● Dampak perubahan iklim, seperti bencana alam, menimbulkan tantangan besar bagi perencanaan tata ruang sehingga memerlukan revisi kebijakan secara berkelanjutan; ● Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang masih rendah, menyebabkan kebijakan tata ruang tidak selalu mencerminkan kebutuhan lokal.		
	Belum optimalnya pencegahan dan mitigasi	3. Belum optimalnya upaya pembangunan berketahanan iklim dan mempertimbangkan daya dukung dan				Belum optimalnya penanganan genangan dan banjir

No.	Permasalahan RPJMD	Permasalahan KLHS	Permasalahan RTRW	Renstra K/L	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		daya tampung lingkungan				
		4. Belum optimalnya kinerja dan kolaborasi kelambagaan pemerintah dan non-pemerintah di Kota Bogor				

I.5.2. Penetapan Isu Strategis

Isu Strategis pembangunan daerah merupakan isu krusial yang diidentifikasi dari permasalahan permasalahan pembangunan yang berkelanjutan, isu strategis pembangunan daerah merupakan isu krusial yang berasal dari permasalahan yang berkelanjutan dan berdampak luas yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Isu strategis Perencanaan Pembangunan Daerah yang terkait dengan pelayanan Dinas PUPR dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diidentifikasi dan ditelaah berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PUPR, KLHS RPJMD 2025-2029, dengan tetap mempertimbangkan isu isu yang relevan baik ditingkat global, nasional dan reginal. Dan berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud diatas.

Table 2.2.2.
Penentuan Isu-isu Strategis

No	Ruang Lingkup Pelayanan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Keterbatasan akses aman bagi masyarakat Kota Bogor, serta infrastruktur yang belum optimal	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) masih menjadi tantangan serta kemampuan pendanaan untuk membangun dan mengelola SPAM dan SPALD masih terbatas	1. Kualitas air yang buruk menjadi isu krusial akibat pencemaran lingkungan. Ini berdampak pada kesehatan masyarakat dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit; 2. Perubahan iklim memperparah krisis air dengan memicu bencana seperti kekeringan dan banjir, serta mengurangi ketersediaan air bersih.	Lonjakan inflasi	Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*)	Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur	Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur yang Berkelanjutan
	Infrastruktur dan SDM yang belum optimal sesuai dengan kebutuhan	1. Pembiayaan pembangunan yang terbatas; 2. Proses pembebasan lahan kerap menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur.	Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur	Kesenjangan pembangunan antara wilayah	Keberlanjutan Kota dan Komunitas (*Sustainable Cities and communities*)	Penyediaan infrastruktur dasar (telekomunikas, jalan, air bersih, drainase) yang terjangkau seluruh wilayah	Pemenuhan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur yang Berkelanjutan
	SDM yang belum optimal, baik dari jumlah SDM	1. SDM yang tersedia kurang kompeten untuk berakselerasi	Sering terjadi tumpang tindih antar program yang dijalankan oleh berbagai	Ketimpangan digital	Kemitraan untuk Mencapai	Tata kelola pemerintahan yang baik	Penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang

No	Ruang Lingkup Pelayanan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	maupun keterampilan/ fungsional yang dibutuhkan	dengan perkembangan teknologi pada saat ini; 2. Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) belum optimal	dinas atau sektor karena belum terintegrasinya KLHS secara menyeluruh dalam perencanaan pembangunan		Tujuan (*Partnership for the Goals*)		efektif, efisien, dan lincah serta budaya birokrasi dengan ASN yang profesional.

Tabel di atas merupakan bagian dari analisis perencanaan strategis yang berfokus pada isu-isu pelayanan publik (PD/Program/Proyek Daerah), dengan mengacu pada beberapa dimensi penting seperti: ruang lingkup pelayanan, permasalahan, isu-isu lingkungan strategis (baik global, nasional, regional), dan isu-isu strategis yang relevan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi keterkaitan antara permasalahan yang dihadapi daerah dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan arah kebijakan yang strategis ke depan.

Inflasi yang tinggi berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat serta kemampuan pemerintah menyediakan layanan dasar, khususnya air bersih dan sanitasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi infrastruktur berkelanjutan untuk menjamin akses layanan dasar tetap terjaga dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif. Tantangan utama adalah kesenjangan infrastruktur antar wilayah. Mengatasi ketimpangan ini penting untuk mewujudkan kota dan komunitas berkelanjutan, sebagaimana menjadi agenda global dalam SDGs (Sustainable Development Goals). Ketimpangan akses terhadap teknologi digital menghambat pemerataan layanan publik. Oleh karena itu, penerapan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan menjadi prioritas strategis untuk mewujudkan layanan yang efisien, responsif, dan profesional.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

III.1 TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Program Perangkat Daerah, kinerja tujuan dan sasaran dapat diukur serta dievaluasi melalui indikator yang telah ditetapkan. Indikator berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja kegiatan, program, sasaran, maupun tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact). Namun, dalam konteks ini indikator difokuskan sebagai alat ukur pencapaian kinerja pada level *outcome* dan *impact*. Penetapan indikator menjadi penting untuk memberikan batasan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga penggunaan sumber daya dapat berlangsung secara efisien, efektif, dan tepat sasaran. Dengan demikian, perumusan tujuan, sasaran, dan indikator merupakan tahapan strategis yang menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara menyeluruh.

Adapun visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor periode 2025–2029 adalah **"BOGOR BERES – BOGOR MAJU"**. Visi tersebut berakar dari keinginan kuat menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang tertata dan berdaya saing tinggi di berbagai aspek kehidupan, dengan fokus pada perbaikan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga Kota Bogor dapat tumbuh menjadi kota maju dan berkelanjutan.

Bogor Beres mengandung makna ajakan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja sama membangun Kota Bogor hingga tuntas. Beres tidak hanya berarti penataan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Beres juga dimaknai sebagai upaya penyelesaian permasalahan mendasar yang masih ada, karena kemajuan kota tidak akan tercapai jika persoalan lama belum terurai.

Bogor Maju bermakna membangun kemajuan Kota Bogor melalui penguatan pilar-pilar pembangunan, antara lain pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan teknologi dan inovasi, penguatan kebudayaan dan karakter masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyediaan infrastruktur yang memadai.

Untuk mendukung visi tersebut, Kota Bogor memiliki empat misi, yaitu:

a. Bogor Cerdas, mencerminkan perwujudan kualitas intelektualitas manusia, tata kelola pembangunan, dan pelayanan publik. Dengan demikian, misi ini memastikan ketersediaan fasilitas dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, berkelanjutan, berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat, serta memperdayakan lembaga pendidikan formal dan non formal. Selain itu, misi ini juga memastikan pengelolaan pembangunan yang baik, disertai dengan aparatur yang cerdas dan pelayanan publik yang semakin prima dan inovatif.

Memastikan Ketersediaan Fasilitas Dan Perluasan Akses Pendidikan Yang Merata, Terjangkau, Berkelanjutan, Berkeadilan Untuk Seluruh Lapisan Masyarakat. Serta Memperdayakan Lembaga Pendidikan Formal dan Non formal;

b. Bogor Sehat, mencerminkan perwujudan kualitas warga dan lingkungan yang sehat. Dengan demikian, misi ini memastikan setiap warga Kota Bogor mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatan indeks pembangunan manusia. Selain itu, misi ini juga memastikan penciptaan kualitas lingkungan binaan dan hidup yang menopang kesehatan dan kualitas hidup warganya dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
   Memastikan setiap warga kota bogor mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatan Indeks Pembangunan Manusia;
c. Bogor Sejahtera, mencerminkan perwujudan peningkatan kualitas ekonomi kota yang berkeadilan. Dengan demikian, misi ini memastikan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif yang inovatif, dan peningkatan pendapatan daerah.
   Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; dan
d. Bogor Lancar, mencerminkan perwujudan peningkatan kualitas mobilitas dan tata ruang. Dengan demikian, misi ini berupaya untuk menjadikan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman, modern, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan transportasi publik, memperluas aksesibilitas dan mengatasi kemacetan lalu lintas serta mengoptimalkan fasilitas publik.
   Menjadikan Kota Bogor sebagai Kota yang nyaman, modern, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan mengatasi kemacetan lalu lintas serta mengoptimalkan fasilitas public.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor berperan penting dalam mewujudkan tiga Misi, yaitu:

a. Bogor Cerdas, melalui kegiatan Pembangunan Gedung Pemerintahan Terpadu.
b. Bogor Sehat, melalui Perencanaan Tata Ruang yang mempertimbangkan Ekses Perubahan Iklim dan Resiko Bencana serta Optimalisasi Pengelolaan infrastruktur air minum, air limbah dan sumber daya air.
c. Bogor Lancar. melalui kegiatan Pemeliharaan jalan dan jembatan baik rutin dan berkala, Pembangunan Jalan Frontage R2, Pembangunan Lanjutan Jalan R3, Pembangunan Jalan Bogor Inner Ring Road (BIRR), Akses Jl. Pemuda menuju Jl, Sukaresmi (Jalan temus dadali - Sholeh Iskandar), Pembangunan Simpang tak sebidang Jalan Kebon Pedes, Pembangunan jalan akses IPAL Kayumanis, Pelebaran jalan akses Pasar Jambu Dua, Pembangunan Bogor Interchange, Pembangunan jalan akses

kantor pemerintahan terpadu, Jalan Tembus R3 - Kampung Pasir, Jalan Tembus Pakuan Indah - Permata, dan Pelebaran jalan Cifor sampai dengan batas kota.

III.1.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR dalam melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka dalam perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas PUPR diarahkan untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor 2025-2029, yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Table 3.1.1.
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja						Target Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
MISI 1 : BOGOR CERDAS											
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik	n/A	4.65	4.66	4.67	4.68	4.69	4.70	4.70
	Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang andal dan berkelanjutan guna mendukung tata ruang kota yang tertib dan pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	78.4	80	81	82	83	84	85	85
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Dinas PUPR	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A (85,1)	A (85,5)	A (86,5)	A (87,0)	A (87,50)	A (88,00)	A (88,50)	A (88,50)
			Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK/ITDA	87.69	100	100	100	100	100	100	100
			Kepatuhan Pengeloaan Keuangan	100	100	100	100	100	100	100	100
			Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	95,25	95,45	95,45	95,55	95,65	96,50	96,75	96,75

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja						Target Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang Ditetapkan menjadi Inovasi Daerah Dengan Tingkat Kematangan >100	1	1	1	1	1	1	1	1
MISI 2 : BOGOR SEHAT											
Meningkatnya Akses masyarakat terhadap layanan Utilitas Dasar			Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum jaringan perpipaan	72.8	73.30	73.80	74.30	74.80	75.30	75.80	75.80
			Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	6.07	6.27	6.49	6.70	6.91	7.12	7.25	7.25
	Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang andal dan berkelanjutan guna mendukung tata ruang kota yang tertib dan pelayanan publik yang berkualitas		Persentase layanan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	72.33	72.60	72.90	73.20	73.50	73.90	74.20	74.20
			Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	6.07	6.27	6.49	6.70	6.91	7.12	7.25	7.25
		Meningkatnya Pengelolaan	Persentase rumah tangga yang	98,04	98,20	98,40	98,60	98,80	99,0	99,05	99,05

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja						Target Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	telayanai sistem pengelolaan air minum								
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Persentase rumah tangga yang telayanai sistem pengelolaan air limbah domestik	79,43	79,93	81,0	81,66	82,49	83,31	84,0	84,0
Menurunnya resiko bencana di seluruh wilayah			Indeks Resiko Bencana	n/A	58.03	58.02	60.00	59.00	58.07	58.02	58.02
	Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang andal dan berkelanjutan guna mendukung tata ruang kota yang tertib dan pelayanan publik yang berkualitas		Persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik	70.19	70,88	71,65	72,38	73,15	73,88	74,65	74,65
		Menurunnya Resiko Bencana Banjir dan	Persentase lokasi rawan banjir dan tanah longsor	22.86	24.29	25.71	27.14	28.57	30.00	31.43	31.43

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja						Target Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Tanah Longsor Dibantaran Sungai	dibantaran sungai yang ditangani								
MISI 3: BOGOR SEJAHTERA											
Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah			Indeks Ketahanan Pangan	n/A	69.14	71,65	74,26	76,96	79,75	82,63	82,63
		Meningkatnya kuliatas sungai	Persentase Sungai yang berkondisi baik	85,73	86,65	86,65	87,10	87,65	88,10	88,65	88,65
		Meningkatnya saluran irigasi yang berfungsi optimal	Persentase Irigasi yang berkondisi baik	54.65	55,65	56,65	57,65	58,65	59,65	60,65	60,65
MISI 4: BOGOR LANCAR											
Meningkatnya Konektivitas Transportasi			(Volume Capacity Ratio (V/C Ratio)	90.03	90.04	90.05	90.06	90.07	90.08	90.09	90.09
	Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang andal dan berkelanjutan guna mendukung tata ruang kota yang tertib dan pelayanan publik yang berkualitas		Persentase jalan berkondisi mantap	90.03	90.04	90.05	90.06	90.07	90.08	90.09	90.09
		Meningkatnya kualitas dan kapasitas	Persentase Jalan berkondisi mantap	90.03	90.04	90.05	90.06	90.07	90.08	90.09	90.09

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja						Target Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		infrastruktur jalan									
		Meningkatnya kualitas drainase	Persentase drainase yang berkondisi baik	67.86	68.00	70.00	72.00	75.00	78.00	80.00	80.00
Meningkatnya kualitas ruang kota			Persentase ketercapaian rencana struktur ruang	58.7	59.00	60.00	61.00	62.00	63.00	64.00	64.00
	Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang andal dan berkelanjutan guna mendukung tata ruang kota yang tertib dan pelayanan publik yang berkualitas		Persentase program/kegiatan pada rencana struktur ruang yang terealisasi sesuai dengan rencana	58.7	59.00	60.00	61.00	62.00	63.00	64.00	64.00
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang	Persentase kesesuaian antara aktivitas pada RKPD dan indikasi program pada rencana struktur ruang pada RTR	58.7	59.00	60.00	61.00	62.00	63.00	64.00	64.00
			Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0.0055	0.0065	0.01	0.0135	0.0165	0.02	0.0235	0.0235

III.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas, selanjutnya perlu dirumuskan lebih lanjut Arah Kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas PUPR 2025-2029 sebagaimana dimaksud diatas. Arah Kebijakan merupakan serangkaian prioritas kebijakan yang menjadi pedoman untuk mencapai tujuan, sasaran, visi dan misi pemerintah Kota Bogor, sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi lebih sinergis, terarah dan berkesinambungan.. Sedangkan Strategi merupakan langkah langkah spesifik yang harus diambil untuk mencapai tujuan organisasi, dan menjadi peta jalan dalam mencapai tujuan jangka menengah pembangunan daerah yang tertuang pada rencana strategis organisasi.

Memperhatikan hal tersebut diatas, maka dalam perumusan rencana Strategis Dinas PUPR 2025-2029, Arah Kebijakan dan Strategi untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas PUPR 2025-2029 dijabar sebagai berikut:

Table 3.1.2.
Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Dinas PUPR

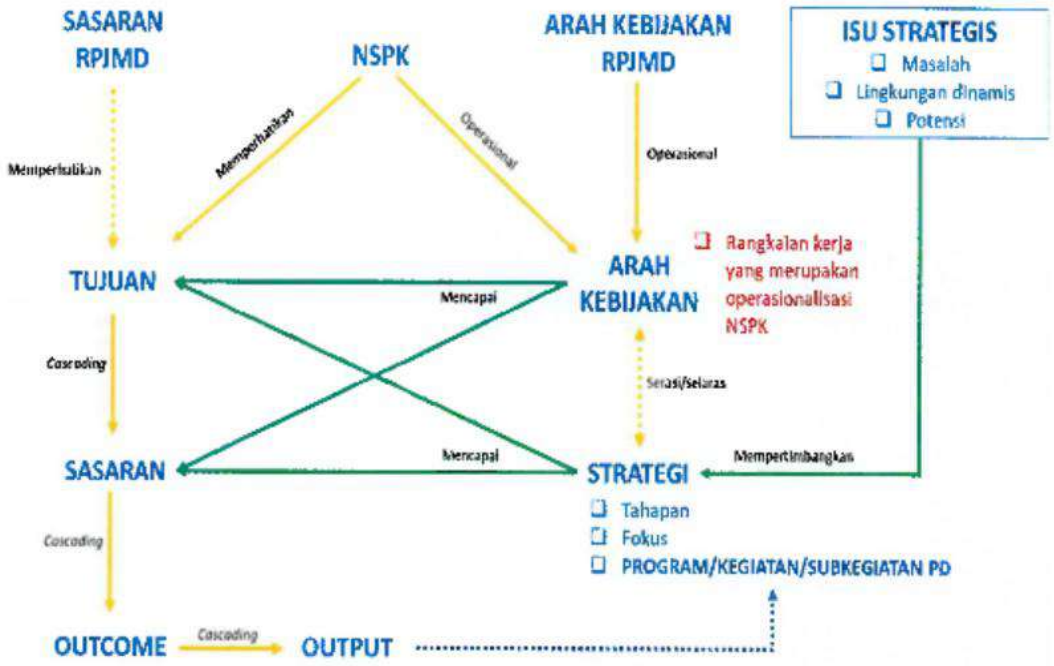
No	Operasionalisasi NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Strategi Renstra PD
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Meningkatnya Akses masyarakat terhadap layanan Utilitas Dasar	Peningkatan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum jaringan perpipaan dan Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur Air Minum dan Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah	Meningkatnya jumlah Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum jaringan perpipaan dan Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak
2.	Menurunnya Resiko Bencana di Seluruh Wilayah	Peningkatan infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik	Meningkatnya infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik	Peningkatan infrastruktur penanganan lokasi rawan banjir dan tanah longsor dibantaran sungai
3.	Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah	Peningkatan infrastruktur irigasi yang berkondisi baik	Meningkatnya infrastruktur irigasi yang berkondisi baik	Peningkatan infrastruktur irigasi yang berkondisi baik melalui pemeliharaan dan peningkatan irigasi
4.	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Meningkatnya Kondisi Jalan dalam Kondisi Mantap	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan	Bertambahnya panjang jalan yang terbangun, panjang jalan yang ditingkatkan, trotoar yang dibangun/ditingkatkan, jembatan yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara; Meningkatnya Kualitas Drainase; dan Meningkatnya Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik.
5.	Meningkatnya kualitas ruang kota	Meningkatnya ketercapaian rencana struktur ruang	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah dan bangunan gedung	Terwujudnya Penyelenggaraan Penataan Ruang yang menunjang daya saing, dan penataan bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan.

Sumber : Hasil Analisis DPUPR, 2025

III.2 PENTAHAPAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Adapun dalam rangka menentukan prioritas dan tahapan perencanaan strategis jangka menengah diperlukan pentahapan pelaksanaan prioritas Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang mengacu pada pentahapan Pelaksanaan Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Bogor 2025-2029 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 3.2-1.
Gambar 6.
Alur Pentahapan Renstra Perangkat Daerah



Pentahapan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor disusun untuk siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen panduan 5 tahunan, kemudian penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Renja) sebagai penjabaran tahunan Renstra, dilanjutkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, dan diakhiri dengan pelaporan kinerja (LAKIP) serta evaluasi kinerja untuk peningkatan kinerja berkelanjutan yang sesuai disajikan dalam tabel dibawah ini :

Table 3.2.1.
Pentahapan Pelaksanaan Renstra Dinas PUPR

Tahun	Tahap I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Tahapan	Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Menopang Daya Saing Daerah	Pengembangan Kapasitas dan Transformasi Digital Pemerintahan	Transformasi Ekonomi Kreatif Menuju Inovasi Inklusif	Inovasi untuk Keberlanjutan dan Ketahanan Perkotaan	Konsolidasi Capaian dan Fondasi Menuju Kota Sains Kreatif
Focus Utama	Fokus utama pada Peningkatan jumlah Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum jaringan perpipaan, dan Peningkatan Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman dan layak, dalam rangka menurunkan stunting dan BABS Meningkatkan penyedia jasa konstruksi yang berkondite baik, menyiapkan infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik, dan	Fokus utama pada: Penguatan SDM Peningkatan kualitas perencanaan, kajian, penguatan penyediaan data dan pelayanan yang berbasis Sistem Informasi yang transparan, terintegrasi dan mudah diakses oleh publik menuju tata kelola yang lebih transparan, efisien, dan adaptif terhadap perubahan.	Fokus utama pada: Penyediaan infrastruktur pendukung, serta pelibatan komunitas dan pelaku usaha dalam penciptaan nilai tambah ekonomi.	Fokus pembangunan mencakup pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam rangka mendukung paripurnanya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat lokal. Hal ini mencakup pengelolaan lingkungan berbasis teknologi, efisiensi energi, serta penguatan sistem transportasi dan infrastruktur hijau.	Tahun terakhir RPJMD difokuskan pada proses konsolidasi hasil pembangunan dan perumusan strategi akselerasi menuju fase penguatan pada periode perencanaan berikutnya sebagai fondasi menuju kota sains kreatif. Pemerintah Kota Bogor melakukan evaluasi komprehensif atas pencapaian indikator pembangunan, memperkuat jejaring kemitraan nasional dan internasional, serta mempersiapkan model replikasi praktik baik sebagai warisan institusional. Memperkuat positioning Kota Bogor sebagai pusat sains kreatif nasional. Kota Bogor menyiapkan kerangka lanjutan untuk

Tahun	Tahap I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	menyiapkan infrastruktur jalan yang berkualitas dalam rangka memperkuat daya saing pariwisata, meningkatkan kesempatan kerja yang inklusif dan melanjutkan pengembangan sarana prasarana perekonomian				memasuki fase penguatan ekosistem dan ekspansi global dalam RPJMD berikutnya.

Sumber data : Dinas PUPR, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor merupakan hasil penjenjangan kinerja (cascading kinerja) dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Berikut Kerangka Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD (Cascading) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.

IV.1 PENJENJANGAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Table 4.1.1.
Penjenjangan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran kegiatan dan sub kegiatan)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					Indeks Pelayanan Publik		
	Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang andal dan berkelanjutan guna mendukung tata ruang kota yang tertib dan pelayanan publik yang berkualitas				Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Dinas PUPR			Predikat SAKIP Perangkat Daerah		
					Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK/ITDA		
					Kepatuhan Pengeloaan Keuangan		
					Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		
					Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang Ditetapkan menjadi Inovasi Daerah Dengan Tingkat Kematangan >100		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Dinas PUPR		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tingkat Kepatuhan Pengeloaan Keuangan		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran kegiatan dan sub kegiatan)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan		NIlai Hasil Survey Kepuasan		
					Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan		
				Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas PUPR secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan di lingkup perangkat daerah	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja Dinas		
					Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Dinas		
					Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja Dinas		
					Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Dinas		
					Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah		
					Persentase realisasi Anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah		
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Dinas PUPR	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas dokumen evaluasi kinerja Dinas PUPR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengadministrasian keuangan perangkat	Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran kegiatan dan sub kegiatan)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				daerah secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		
				Meningkatnya pengelolaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Meningkatnya kualitas laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran/ tahunan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengadministrasian dan pembinaan kepegawaian secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan	Persentase pemenuhan Kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengadaan pakaian dinas beserta atribut yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Meningkatnya pengadministrasian umum pelayanan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran kegiatan dan sub kegiatan)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Meningkatnya kualitas peralatan dan perlengkapan kantor yang sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Meningkatnya kualitas peralatan rumah tangga kantor yang sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Meningkatnya kualitas bahan logistik kantor yang sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Meningkatnya kualitas barang cetakan dan penggandaan yang sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Meningkatnya kualitas penyediaan kebutuhan akomodasi untuk penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Meningkatnya kualitas pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran kegiatan dan sub kegiatan)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Meningkatnya kualitas tenaga jasa pelayanan umum kantor yang sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Meningkatnya kualitas pemenuhan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Meningkatnya kualitas pemenuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional/ lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Meningkatnya kualitas Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya kualitas Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran kegiatan dan sub kegiatan)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
				Meningkatnya kualitas barang milik daerah untuk menunjang urusan pemerintah daerah	tersedianya alat besar	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Meningkatnya kualitas alat besar yang dibutuhkan	Jumlah alat besar yang disediakan	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Besar	
Meningkatnya Akses masyarakat terhadap layanan Utilitas Dasar					Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum jaringan perpipaan		
					Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman		
	Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang andal dan berkelanjutan guna mendukung tata ruang kota yang tertib dan pelayanan publik yang berkualitas				Persentase layanan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman		
					Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman		
		Optimalisasi pemenuhan akses air minum			Cakupan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran kegiatan dan sub kegiatan)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
			Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air minum	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum	
				Meningkatnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang Layak	Jumlah layanan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya jumlah sambungan rumah yang dilayani SPAM jaringan perpipaan perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sub kegiatan : Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
				Meningkatnya jumlah SPAM yang optimal	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Non PDAM yang dioptimalisasi	Sub Kegiatan : Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
				Meningkatnya kompetensi lembaga pelaksana penyelenggara SPAM	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran kegiatan dan sub kegiatan)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Optimalisasi pemenuhan akses air limbah			Cakupan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak		
			Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik		Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah domestik	Program PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Meningkatnya jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak	Jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya jumlah SPALD terpusat skala pemukiman yang optimal	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	Sub Kegiatan : Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
				Meningkatnya kualitas jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
				Meningkatnya jumlah sarana angkutan lumpur tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
				Meningkatnya kualitas SPALD yang beroperasi	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
				Meningkatnya jumlah pembangunan SPALD terpusat skala permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) yang terbangun	Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran kegiatan dan sub kegiatan)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
						Terpusat Skala Permukiman	
				Meningkatnya jumlah unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob	Sub Kegiatan : Penyediaan Unit pengolahan setempat	
				Meningkatnya kompetensi lembaga pelaksana penyelenggara SPALD	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang ditingkatkan kapasitasnya	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
Menurunnya resiko bencana di seluruh wilayah					Indeks Resiko Bencana		
	Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang andal dan berkelanjutan guna mendukung tata ruang kota yang tertib dan pelayanan publik yang berkualitas				Persentase infrastruktur pengelolaan sumber daya air yang berkondisi baik		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran kegiatan dan sub kegiatan)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Menurunnya Resiko Bencana Banjir dan Tanah Longsor Dibantaran Sungai			Persentase lokasi rawan banjir dan tanah longsor dibantaran sungai yang ditangani		
			Meningkatnya Kualitas Sungai		Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Meningkatnya Kualitas Bangunan Pengamanan Wilayah Sungai	Panjang Sungai yang berkondisi baik	Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan teknis pengelolaan sumber daya air	Jumlah dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	
				Meningkatnya kualitas tanggul sungai yang di rehabilitasi	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Tanggul/ Sungai	
				Meningkatnya kualitas bangunan perkuatan tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	Sub Kegiatan : Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	
				Meningkatnya kualitas sungai yang di normalisasi/ restorasi	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	Sub Kegiatan : Normalisasi/Restorasi Sungai	
				Meningkatnya polder/ kolam retensi yang dibangun	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang dibangun	Sub Kegiatan : Pembangunan Polder/Kolam Retensi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran kegiatan dan sub kegiatan)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah					Indeks Ketahanan Pangan		
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Irigasi			Persentase infrastruktur irigasi yang berkondisi baik		
			Meningkatnya Saluran Irigasi Yang Berfungsi Optimal		Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Meningkatnya Panjang Irigasi Yang Tertangani	Panjang Irigasi yang berkondisi baik (%)	Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Meningkatnya jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
Meningkatnya Konektivitas Transportasi					(Volume Capacity Ratio (V/C Ratio)		
	Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang andal dan berkelanjutan guna mendukung tata ruang kota yang tertib dan pelayanan				Persentase jalan berkondisi mantap		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran kegiatan dan sub kegiatan)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	publik yang berkualitas						
		Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan			Persentase Jalan berkondisi mantap		
			Meningkatnya Kualitas pembangunan, Peningkatan dan Perservasi Jalan dan Jembatan		Persentase panjang jalan yang ditangani sesuai dengan SK Jalan	Program : PENYELENGGARAAN JALAN	
				Meningkatnya kualitas panjang jalan yang dibangun, dipelihara dan ditingkatkan	Persentase panjang jalan yang terbangun	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	
					Persentase panjang jalan yang ditingkatkan		
					Persentase jalan yang terpelihara		
					Persentase trotoar yang dibangun dan ditingkatkan		
					Persentase jembatan yang terpelihara		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran kegiatan dan sub kegiatan)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
					Persentase jembatan yang terbangun		
				Meningkatnya kualitas perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
				Meningkatnya kualitas jalan yang terbangun	Jumlah Panjang Jalan yang Dibangun	Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan	
				Meningkatnya kualitas jalan dan trotoar yang direkonstruksi	Jumlah Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Sub Kegiatan: Rekonstruksi Jalan	
				Meningkatnya kualitas jalan yang dipelihara secara berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan	
				Meningkatnya kualitas jalan yang dipelihara secara rutin	Jumlah ruas Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	
				Meningkatnya kualitas jembatan yang dibangun	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan	
				Meningkatnya kualitas jembatan yang direhab	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jembatan	
				Meningkatnya kualitas jembatan yang dipelihara secara rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jembatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran kegiatan dan sub kegiatan)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	Program : PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
					Persentase Pekerjaan Konstruksi yang bernilai baik		
				Meningkatnya tenaga terampil yang memiliki kompetensi	Persentase tenaga terampil yang memiliki kompetensi	Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
				Meningkatnya kualitas pelatihan assesmen tenaga kerja konstruksi	Jumlah Training Need Assesment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Sub Kegiatan : Penyediaan Training Need Assesment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
				Meningkatnya kualitas jabatan operator dan teknis atau operator	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analisis yang Difasilitasi Sertifikasi	Sub Kegiatan : Failitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis	
				Meningkatnya kualitas SOP pelatihan tenaga kerja konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau analis yang Disediakan	Sub Kegiatan : Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau analis	
				Meningkatnya kualitas Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau analis yang terlatih	Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau analis yang Dilatih	Sub Kegiatan : Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau analis	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran kegiatan dan sub kegiatan)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Meningkatnya kualitas drainase			Persentase drainase yang berkondisi baik		
			Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan drainase perkotaan		Persentase panjang drainase yang ditangani sesuai SK Jalan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
				Meningkatnya Jumlah panjang drainase pada jalan arteri/ kolektor/ lokal	panjang drainase yang ditangani pada jalan arteri/ kolektor/ lokal	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan sistem drainase perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
				Meningkatnya kualitas drainase perkotaan yang dibangun	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
				Meningkatnya kualitas drainase perkotaan yang ditingkatkan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sub Kegiatan : Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
				Meningkatnya kualitas drainase perkotaan yang dipelihara	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
Meningkatnya kualitas ruang kota					Persentase ketercapaian rencana struktur ruang		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran kegiatan dan sub kegiatan)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang andal dan berkelanjutan guna mendukung tata ruang kota yang tertib dan pelayanan publik yang berkualitas				Persentase program/kegiatan pada rencana struktur ruang yang terealisasi sesuai dengan rencana		
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang			Persentase kesesuaian antara aktivitas pada RKPD dan indikasi program pada rencana struktur ruang pada RTR		
					Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang		Persentase program/ kegiatan pada rencana struktur ruang yang terealisasi sesuai dengan rencana	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
				Meningkatnya kualitas dokumen Perencanaan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Penataan Ruang	Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	
				Meningkatnya kualitas kebijakan pelaksanaan penataan ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran kegiatan dan sub kegiatan)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Meningkatnya kualitas RTRW	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kualitas RDTR	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kualitas evaluasi RTRW	Jumlah dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kualitas informasi penataan ruang	Jumlah Publikasi Informasi Penataan Ruang	Sub Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sosialisasi peraturan penataan ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Sub Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
				Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang	Persentase Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
				Menigkatnya kualitas penyusunan peta dasar	Jumlah Data SHP Peta Dasar	Sub Kegiatan : Penyusunan Peta Dasar	
				Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penataan ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran kegiatan dan sub kegiatan)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Meningkatnya penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Persentase Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	
				Meningkatnya penyelenggaraan sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
				Meningkatnya kualitas penyusunan RTRW	Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	
				Meningkatnya kualitas informasi penataan ruang	Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Sub Kegiatan : Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	
				Meningkatnya penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Persentase Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan ruang Daerah	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kualitas koordinasi penataan ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
				Meningkatnya kualitas kesesuaian ruang	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Sub Kegiatan : Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	
				Meningkatnya kualitas	Jumlah dokumen hasil Penilaian Kinerja	Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran kegiatan dan sub kegiatan)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				pengawasan standar teknis kawasan	Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	
				Meningkatnya kualitas RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Sub Kegiatan : Penilaian Perwujudan RTR	
				Meningkatnya kualitas penanganan pelanggaran RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Sub Kegiatan : Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	
			Meningkatnya kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan gedung		Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Gedung	Program : PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
					Persentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin		
				Meningkatnya Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai PBG	Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai PBG	Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
					Presentase permohonan sertifikat laik fungsi yang telah terbit		
				Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
				Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran kegiatan dan sub kegiatan)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Meningkatnya kualitas Penerbitan PBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
				Meningkatnya Kualitas Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan : Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	
			Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungannya		Persentase dokumen RTBL yang tersusun sesuai dengan rencana penyusunan RTBL dalam RTR (RTRWK/RDTRK)	PROGRAM : PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan RTBL	Persentase dokumen RTBL yang tersusun sesuai dengan rencana penyusunan RTBL dalam RTR (RTRWK/ RDTRK)	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	
				Meningkatnya kualitas pengawasan RTBL	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Sub Kegiatan : Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran kegiatan dan sub kegiatan)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
				Meningkatnya penyusunan dokumen RTBL	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber: Hasil Perencanaan Dinas PUPR

IV.2 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Menyikapi perubahan regulasi di bidang Perencanaan dan Pengganggaran yang berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perubahan Regulasi tersebut berisi penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, yang salah satu tujuan dari regulasi ini adalah menyamakan kode dan nomenklatur dari program, kegiatan dan sub kegiatan untuk dapat digunakan oleh semua Pemerintah Daerah.

Untuk perwujudan dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor yang mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota 2025-2029, maka masing-masing sasaran strategis disiapkan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum
   a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
   a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
   a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Program Penyelenggaraan Jalan
   a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
    a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Program Pengembangan Jasa Konstruksi
    a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
    a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
    b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
    c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
8. Program Penataan Bangunan Gedung
    a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
9. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
    a. Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
    c. Kegiatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
    g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Table 4.2.1.
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	85,10	85.50	19.250	86,00	19.805	86.50	20.340	87,00	21.375	87.50	22.400	88,00	39.055
	Tingkat Kepatuhan Pengeloaan Keuangan	%	100	100		100		100		100		100		100	
	NIlai Hasil Survey Kepuasan	Angka	85,25	86,75		95,45		95,55		95,65		96,50		96,70,00	
	Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan	Angka	1	1		1		1		1		1		1	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Fisik Kegiatan di lingkup perangkat daerah	%	99,44	100	175	100	205	100	240	100	275	100	300	100	380
	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja Dinas	Angka	27,6	27,6		27,7		27,8		27,9		28,0		28,1	
	Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja Dinas	Angka	25,2	24,0		25,1		25,2		25,30		25,40		25,5	
	Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja Dinas	Angka	13,8	12,5		12,6		12,7		12,80		12,9		13,0	
	Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal Dinas	Angka	18,5	21,75		21,85		21,95		22,05		22,15		22,25	
	Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	%	100	100		100		100		100		100		100	
	Persentase realisasi Anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah	%	96,52	96,65		96,75		96,85		96,95		97,15		97,25	
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	100	8	125	8	150	8	175	8	200	8	225
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	75	8	80	8	90	8	100	8	100	8	155
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	%	100	100	19.075	100	19.600	100	20.100	100	21.100	100	22.100	100	38.675
	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan	%	75	100		100		100		100		100		100	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	tahunan secara tepat waktu														
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	100	110	19.000	115	19.500	115	20.000	115	21.000	115	22.000	115	38.500
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	75	1	100	1	100	1	100	1	100	3	175
Kegiatan : Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	120	100	150	100	170	100	190	100	210	100	270
Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	1	120	2	150	2	170	2	190	2	210	4	270
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	100	4.905	100	5.750	100	6.535	100	7.320	100	8.105.	100	10.655
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	125	1	150	1	175	1	200	1	225	3	275
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1.500	1	1.750	1	2.000	1	2.250	1	2.500	3	3.250
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	1	1.000	1	1.250	1	1.500	1	1.750	1	2.000	4	2.250
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	250	1	300	1	350	1	400	1	450	3	550
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	230	1	300	1	310	1	320	1	330	3	530
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	1.800	12	2.000	12	2.200	12	2.400	12	2.600	36	3.800
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan penyediaan jasa	%	100	100	4.950	100	5.500	100	5.650	100	5.800	100	5.950	100	10.450

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	penunjang urusan pemerintah daerah														
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	950	12	1.000	12	1.050	12	1.100	12	1.150	36	1.950
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	4.000	12	4.500	12	4.600	12	4.700	12	4.800	36	8.500
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	%	94	94	5.326	94	8.200	94	8.915	94	9.630	94	10.345	94	11.216
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	12	12	450	12	500	12	550	12	600	12	650	12	700
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	60	60	4.060	60	5.500	60	6.000	60	6.500	60	7.000	60	7.500
Sub Kegiatan: Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	2	657	2	1.500	2	1.650	2	1.800	2	1.950	2	2.157
Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	5	5	159	5	700	5	715	5	730	5	745	5	859
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya alat besar	Unit	18	15	2.414	1	1.000	1	750	2	1.300	1	650	3	2.250
Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang disediakan	Unit	18	15	2.414	1	1.000	1	750	2	1.300	1	650	3	2.250
Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air minum	%	98,04	98,20	749,6177	98,4	1.050	98,6	1.000	98,8	1.250	99,0	1.200	99.05	1.450

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	SR	260.323	260.743	749,6177	261.237	1.050	261.804	1.000	262.335	1.250	262.866	1.200	262.999	1.450
Sub kegiatan: Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	n/A	100	550	100	600	100	650	100	700	100	750	100	800
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum	dokumen	-	-	-	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
Sub Kegiatan : Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Non PDAM yang dioptimalisasi	Unit	-	1	199,6177	1	200	1	250	1	300	1	350	1	400
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	-	-	-	156	150			156	150			156	150
Program : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah domestik	%	79,43	79,93	11.791,1342	81,00	29.620	81,66	17.292	82,49	18.506,2	83,31	19.766,82	84,00	21.078,502
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak	SR	79,43	79,93	11.791,1342	81,00	29.620	81,66	17.292	82,49	18.506,2	83,31	19.766,82	84,00	21.078,502
Sub Kegiatan : Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	unit	5	8	1.769,44	4	1.200	4	1.200	4	1.200	4	1.200	4	1.200
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	1100	1100	2.150	1105	2.250	1.110	2.300	1.115	2.350	1.120	2.400	1125	2.450
Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	unit	2	0	-	2	15.000	2	1.600	2	1.700	2	1.800	2	1.900
Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang	unit	1	1 (595 SR)	1.650	1 (676 SR)	4.220	1 (757 SR)	4.642	1 (838 SR)	5.106,2	1 (919 SR)	5.616,82	1 (1.000 SR)	6.178,502

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
	Dioperasikan dan Dipelihara														
Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) yang terbangun	Unit	5	1	721,6942	1	800	1	900	1	1.000	1	1.100	1	1.200
Sub Kegiatan : Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob	Rumah Tangga	1232	500	5.500	500	6.000	500	6.500	500	7.000	500	7.500	500	8.000
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	JUmlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang ditingkatkan kapasitasnya	Penyelenggaraan	-	0,00	-	1	150	1	150	1	150	1	150	1	150
PROGRAM : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)	%	85,73	86,10	22.514,0364	86,65	30.334,7792	87,10	31.800	87,65	33.900	88,10	56.110	88,65	69.441
Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sungai yang berkondisi baik	Dokumen	101,16	101,46	22.514,0364	101,76	30.334,772	102,06	31.800	102,36	33.900	102,66	56.110	102,96	69.441
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	99	12	871,8414	16	1.269,7792	16	1.300	16	1.300	16	1.300	16	1.300
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Tanggul/ Sungai	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	km	4,38	4,68	5.142,195	4,98	10.000	5,28	11.000	5,58	12.100	5,88	13.310	6,18	14.641.
Sub Kegiatan : Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	km	2,29	2,79	15.000	3,29	17.700	3,79	18.000	4,29	19.000	4,79	20.000	5,29	22.000

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Sub Kegiatan : Normalisasi/ Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	km	1,18	17,50	1.500	17,50	1.365	17,50	1.500	17,50	1.500	17,50	1.500	17,50	1.500
Sub Kegiatan : Pembangunan Polder/ Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang dibangun	unit	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		1,00	20.000	2,00	30.000
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)	%	54,65	55,65	10.000	56,65	11.000	57,65	12.000	58,65	13.000	59,65	14.000	60,65	15.000
Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang Irigasi yang berkondisi baik (%)	km	50,00	51,00	10.000	52,00	11.000	53,00	12.000	54,00	13.000	55,00	14.000	56,00	15.000
Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	km	50,00	50,00	10.000	50,00	11.000	50,00	12.000	50,00	13.000	50,00	14.000	50,00	15.000
Program : PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan yang ditangani sesuai dengan SK Jalan	%	90,03	90,04	56.426,682723	90,05	244.949,36521	90,06	365.695.897.781	90,07	286.739.315.210	90,08	196.684.540.210	90,09	301.376.047.933
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase panjang jalan yang terbangun	%	61,49	17,65	56.426,682723	35,3	244.949,36521	47,10	365.695,89778091	64,70	286.739,3152104	82,35	196.684,5402104	100,00	301.376,0479334
	Persentase panjang jalan yang ditingkatkan	%	58,21	58,35								60,26			
	Persentase jalan yang terpelihara	%	90,03	90,04								90,08			
	Persentase trotoar yang dibangun dan ditingkatkan	%	11,31	18,18								90,91			
	Persentase jembatan yang terpelihara	%	100,00	100,00								100,00			
	Persentase jembatan yang terbangun	%	13,33	20,00								46,67			
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	102	20	2.900	20	52.200	20	8.600	20	10.100	20	12.500	20	77.450
Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Dibangun	km	0,5878	0,89	12.011,716723	1,19	128.000	1,39	312.500	1,69	178.000	1,99	136.500.	2,29	177.100
Sub Kegiatan: Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Direkonstruksi	km	106,78	112,78	15.000.000	118,78	49.365.210	124,78	45.897.781	130,78	39.315.210	136,78	34.540.210	139,78	32.040.210
Sub Kegiatan :Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	km	187,239	187,239	12.426,280	189,64	10.800	191,84	10.600	193,04	9.600	195,64	10.600	198,24	10.600

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Sub Kegiatan :Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah ruas Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	km	187,24	187,24	25.000	187,24	25.000	187,24	25.000	187,24	25.000	187,24	25.000	187,24	25.000
Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	jembatan	2	1	1.696,798	1	25.000	1	5.000	1	60.000	1	8.000	1	30.000
Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	jembatan	30	2	576,888	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	jembatan	138	139	1.800	139	1.900	139	1.950	139	2.000	139	2.050	139	2.100
Program : PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	%	48,00	48,25	167,9925	48,50	200	48,75	300	49,00	300	49,25	435	49,50	435
	Persentase Pekerjaan Konstruksi yang bernilai baik	%	83,94	83,99		84,04		84,08		84,13		84,18		84,23	
Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil yang memiliki kompetensi	%	8,20	11,01	167,9925	12,20	200	16,20	300	20,20	300	24,20	435	28,20	435
Sub Kegiatan : Penyediaan Training Need Assesment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assesment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Dokumen	n/A	0	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-
Sub Kegiatan : Failitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analisis yang Difasilitasi Sertifikasi	orang	205	68	167,9925	100	200	100	200	100	200	100	200	100	200
Sub Kegiatan : Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau analis yang Disediakan	Dokumen	n/a	0	-	-	-	-		1	100				
Sub Kegiatan : Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau analis	Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau analis yang Dilatih	orang	n/a									50	235	50	235
PROGRAM : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang ditangani sesuai SK Jalan	%	67,86	68,00	12.205,0948	70,00	14.531,686	72,00	16.700	75,00	18.200	78,00	18.700	80,00	19.200

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	panjang drainase yang ditangani pada jalan arteri/ kolektor/ lokal	km	9,084	75	12.205,0948	15,184	14.531,686	21,584	16.700	29,184	18.200	37,084	18.700	45,484	19.200
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	dokumen	20	8	521,6216	13	1.031,6856	13	1.200	13	1.200	13	1.200	13	1.200
Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem drainase perkotaan (Paket)(Km	4,2	15 paket (1,9 km)	3.811,3587	4 paket (2,2 km)	4.500	3 paket (2,5 km)	5.000	12 paket (3 km)	6.000	12 paket (3 km)	6.000	12 paket (3 km)	6.000
Sub Kegiatan : Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem drainase perkotaan (Paket)(K)	3,4	19 paket (2,4 km)	6.835,1534	15 paket (2,5 km)	7.500	10 paket (2,4 km)	8.500	10 paket (2,4 km)	8.500	12 paket (2,4 km)	8.500	12 paket (2,4 km)	8.500
Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan	1,3	7 paket (0,9 km)	1.036,9611	10 paket (1,4 km)	1.500	13 paket (1,8 km)	2.000	15 paket (2,2 km)	2.500	19 paket (2,5 km)	3.000	24 paket (3 km)	3.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	%	58,70	59,00	882,865	60,00	950	61,00	1.600	62,00	800	63,00	900	64,00	700
Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Penataan Ruang	%	20,00%	40,00%	584,179	53,33%	350	73,33%	900	80,00%	500	93,33%	300	100,00 %	100
Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0,00				1	300			1	300		
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1,00	99,323					1	500				
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1,00	385,533	2,00	350								
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	Dokumen	0	0,00				1	500						

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Sub Kegiatan : Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah Publikasi Informasi Penataan Ruang	Publikasi	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1	100	0,00	-
Sub Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Laporan	1	1	99,323			1	100					1	100
Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	%	0,00%	-	-	-	-	66,67%	400	-	-	100,00 %	100	-	-
Sub Kegiatan : Penyusunan Peta Dasar	Jumlah Data SHP Peta Dasar	Peta	0	0,00	-	0,00	-	1	300	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Kegiatan	0	0,00	-	0,00	-	1	100	0,00	-	1	100	0,00	-
Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	%	10,00%	20,00%	199,323	30,00%	100	50,00%	100	70,00%	100	90,00%	300	100,00 %	100
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	1	1,00	199,323	1,00	100	1,00	100	1,00	100	1,00	300	1,00	100
Sub Kegiatan : Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	Jumlah Materi Teknis dan Ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1	500	0,00	-	0,00	-
Sub Kegiatan : Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Sistem Informasi	0	0,00	-	0,00	-	1	100	0,00	-	1	100	0,00	-
Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan ruang Daerah	%	11,76%	17,65%	99,363	35,29%	500	52,94%	200	64,71%	200	82,35%	200	100,00 %	500
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	2	1,00	99,363	1,00	100	1,00	100	1,00	100	1,00	100	1,00	100

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Sub Kegiatan : Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	0			1,00	100			1,00	100			1,00	100
Sub Kegiatan : Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Jumlah dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen	0					1,00	100			1,00	100		
Sub Kegiatan : Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen	0			1,00	300							1,00	300
Sub Kegiatan : Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	0	0,00	-	0,00	-	1	100	0,00	-	1	100	0,00	-
Program : PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Gedung	%	n/A	30	5.047,553	30	20.610,364	30	36.512,546	30	36.512,546	32,5	182.106	35	181.910,364
	Persentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin	%	n/A	40		45		50		55		60,0		65	
Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai PBG	%	95,79	95,90	5.047,553	96	20.610,364	96,10	36.512,546	96,20	36.512,546	96,30	182.106	96,40	181.910,364
	Presentase permohonan sertifikat laik fungsi yang telah terbit	%	71,43	72		72		72		73		73		75	
Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dokumen	n/a	1	150	3	200	2	200	2	200	2	200	2	200
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	orang	n/a	-	-	35	150	35	150	35	150	35	150	35	150

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2025		2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	n/a	1	756	1	756	1	756	1	756	1	756	1	756
Sub Kegiatan : Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	n/a	14	4.191,555 3	6	19.504,364	6	35.406,546	5	37.304,364	5	Rp 181.000	5	Rp 180.804,364
Program : PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase dokumen RTBL yang tersusun sesuai dengan rencana penyusunan RTBL dalam RTR (RTRWK/RDTRK)	%	n/A	22,22	429,858	33,33	Rp 500	55,56	Rp 850	66,67	Rp 500	88,89	Rp 850	100	Rp 500
Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase dokumen RTBL yang tersusun sesuai dengan rencana penyusunan RTBL dalam RTR (RTRWK/ RDTRK)	dokumen	n/A	2	429,858	1	500	2	850	1	500	2	850	1	500
Sub Kegiatan : Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	dokumen	n/a	-	-	-	-	1	350	-	-	1	350	-	-
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	n/a	2	429,858	1	500	1	500	1	500	1	500	1	500

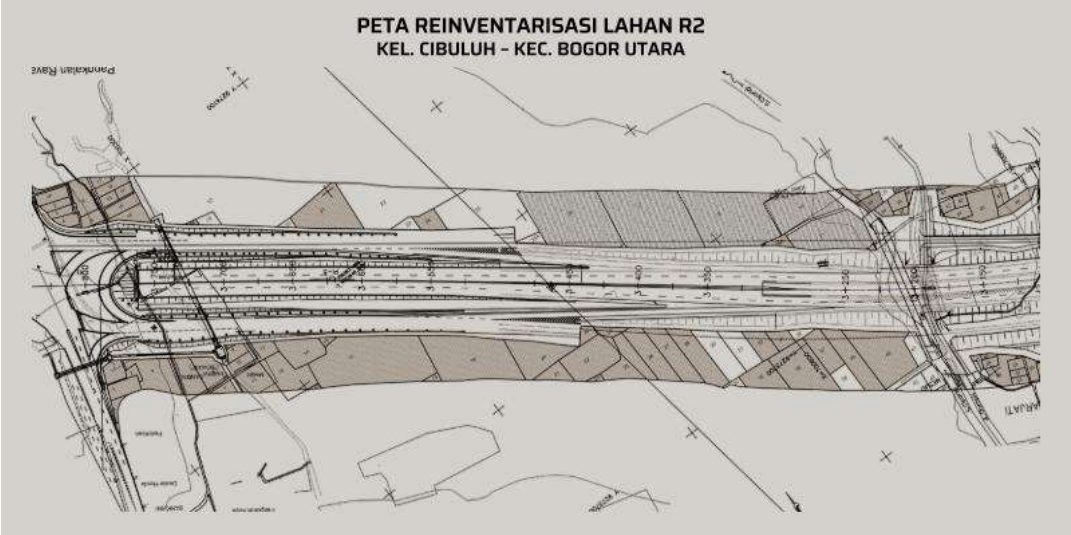
Sumber : Hasil Analisa dan Perencanaan Dinas PUPR

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor telah menentukan kegiatan kegiatan yang mendukung pembagunan Daerah untuk periode Renstra 2025-2029, kegiatan tersebut yaitu:

1) Pembangunan Jalan Frontage R2

Gambar 4.2-1.
Tahap Pembangunan Jalan Frontage R2





Potensi pembangunan Jalan Frontage R2 pada sisi selatan (Segmen Tanah Baru - Batas Kota) Terdapat beberapa titik lahan kosong di sepanjang rencana trase jalan, dimana terdapat peluang kerjasama dengan pengembang untuk pembangunan fisik Jalan Frontage R2.

Tantangan pembangunan Jalan Frontage R2 adalah dari total luas lahan yang harus dibebaskan sesuai dengan PBT Tahun 2007 adalah 151.465 m2, baru 57.412 m2 yang sudah dibebaskan atau sekitar ±38%.

2) Pembangunan Jalan R3

Pembangunan Jalan R3 merupakan solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan di kawasan Tajur dan sekitarnya. keberadaan Jalan R3 sangat penting untuk menunjang mobilitas warga dan konektivitas antar wilayah di Bogor dan menjadi alternatif bagi kendaraan dari arah Puncak dan Sukabumi agar tidak perlu lagi menembus kawasan Tajur dan Pajajaran.

Gambar 4.2-2.
Rencana Pembangunan Jalan R3



Tantangan Pembangunan Jalan R3 antara lain dibutuhkan konstruksi jembatan di Sungai Katulampa sebagai penghubung antara R3 Section 2 (Parung Banteng - Katulampa) dengan R3 Section 3 (Katulampa - Tajur), perlunya kepastian tipe simpang pada akhir segmen (pertemuan antara Jalan R3 dan Jalan BIRR) apakah simpang sebidang atau tidak sebidang dan pada R3 Section 2 (Parung Banteng - Katulampa) masih ada 1 bidang yang belum dibebaskan, dan 4 bidang terkonsinyasi yang belum dilakukan eksekusi pengosongan lahan sejak tahun 2015, yang saat ini terkendala karena adanya penolakan dari Pemilik lahan yang merasa harga sudah tidak sesuai.

3) Pembangunan Jalan Bogor Inner Ring Road (BIRR)

Jalan Bogor Inner Ring Road (BIRR) (Lanjutan) meruapakan salah satu alternatif mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di Bogoe Selatan, mendorong pertumbuhan ekonomi dimana dengan adanya akses ini akan membuka akses ekonomi baru, menarik investasi, dan mendukung pertumbuhan bisnis seperti hotel, restoran, dan usaha lainnya, yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan dengan akses yang lebih baik, masyarakat dapat menjalankan

kegiatan usaha dengan lebih mudah, yang berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut.

Gambar 4.2-3.
Rencana Pembangunan Jalan Bogor Inner Ring Road (BIRR)



Kawasan disekitar Trase Jalan BIRR didominasi lahan kosong dan pengembang perumahan yang kedepannya dapat menarik minat investasi di sepanjang rencana jalan tersebut. Beberapa Pengembang perumahan yang berada di trase jalan BIRR, antara lain: Pakuan Hills, Rancamaya, GNA & GAP yang dapat dimungkinkan adanya kerjasama dalam penyediaan lahan dan pembangunan fisik konstruksinya, dimana yang lebih memungkinkan untuk ditindaklanjuti adalah di segmen 3 (Pamoyanan - Mulyaharja) yang melewati lahan PT. GNA.

Tantangan pembangunan Jalan BIRR antara lain trase melewati pemakaman Tionghoa yang pembebasan lahan dan makam diperkiraan membutuhkan biaya yang mahal, selain itu diakhir segmen juga diperlukan Jembatan dengan panjang bentang mencapai ±200 m (melewati Sungai Cisadane & Double Track Kereta Bogor - Sukabumi).

4) Pembangunan Jalan Tembus Dadali – Sholeh Iskandar
   Proyek pembangunan Jalan Dadali tembus Sholeh Iskandar juga diklaim dapat menjadi solusi pengurai kemacetan, yang kerap terjadi di Kawasan Pasar Jambu Dua yang kemungkinan akan bertambah dengan mulai beroperasinya Pasar Jambu Dua (Jalan Akses Pasar Jambu Dua). Selain itu akan menjadi salah satu akses utama menuju kawasan TOD Stasiun/Stoplate Sukaresmi.
   Rencana Pembangunan Jalan Tembus Dadali – Sholeh Iskandar sepanjang ± 525 m.

Gambar 4.2-4.
Pembangunan Jalan Tembus Dadali – Sholeh Iskandar



Tantangan Pembangunan Jalan Tembus Dadali – Sholeh Iskandar adalah hampir seluruh trase yang direncanakan berada di kawasan permukiman padat, sehingga memerlukan biaya pengadaan lahan yang mahal dan perlu penanganan khusus pertemuan dengan Jalan Kol. Enjo.

5) Pembangunan Simpang Tidak Sebidang Jl. Kebon Pedes
   Pembangunan Simpang Tidak Sebidang Jl. Kebon Pedes bertujuan mengatasi kemacetan dan angka kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api, dengan Pemprov Jabar membangun konstruksi dan Pemkot Bogor menyiapkan lahan. Dampak proyek ini termasuk pembebasan lahan untuk rumah warga dan relokasi Kantor Kecamatan Tanah Sareal.
   Jalan Kebon Pedes merupakan milik Provinsi Jabar, sehingga Pemkot Bogor mengajukan usulan dan akan berkolaborasi dengan Pemprov Jabar untuk penanganan.

Gambar 4.2-5.
Rencana Pembangunan Simpang Tidak Sebidang Jl. Kebon Pedes



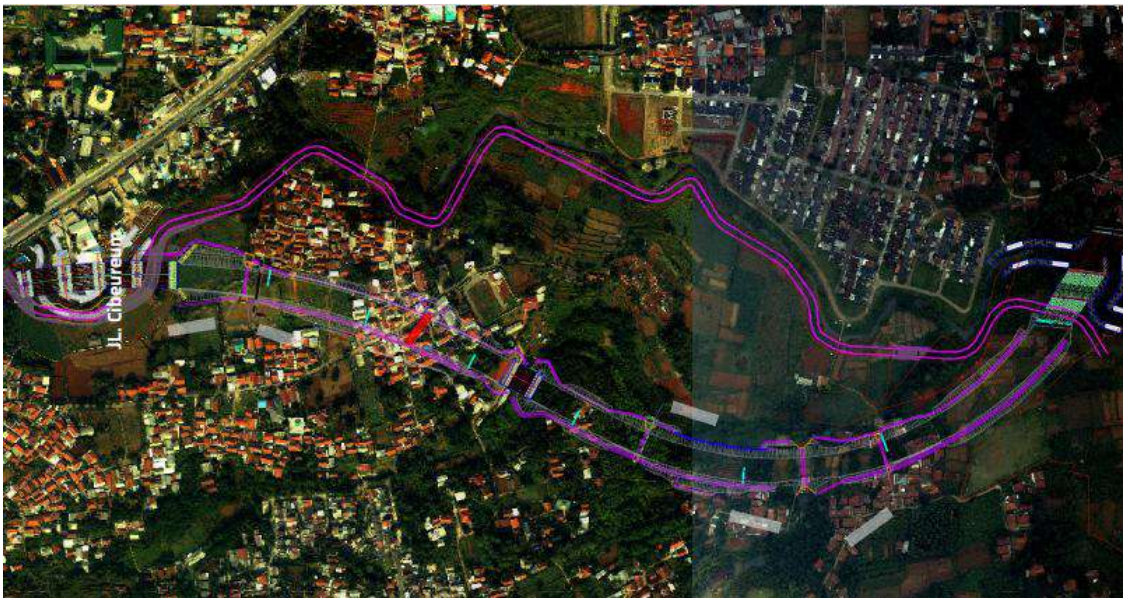
Tantangan Pembangunan Simpang Tidak Sebidang Jl. Kebon Pedes adalah Kebutuhan lahan ± 4.400 m2 dimana salah satu bidang yang terkena pembebasan lahan adalah area parkir Kantor Kecamatan Tanah Sarea, Konstruksi yang dipergunakan adalah Underpass, sehingga memerlukan pompa yang terpelihara pada sistem drainasenya.

6) Pembangunan Jalan Akses Ipal Kayu Manis
   Rencana Panjang Jalan Akses IPAL Kayu Manis ± 1,7 km. Lahan untuk Pembangunan Jalan Akses Ipal Kayu Manis sudah dibebaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2010. Jalan ini akan menjadi akses utama menuju Kawasan IPAL Kayu Manis nantinya dan rencana Kampung Atlit/GOR Kayu Manis. Pada Tahun Anggaran 2025 akan dilaksanakan pekerjaan konstruksi jalan sepanjang 75 m dengan anggaran 3 Miliar.

   Pada lokasi ini terdapat lahan yang terkena trase Tol BORR seksi IIIb, yang masih dalam proses penggantian oleh PPK Pengadaan Tanah Tol BORR – Kementerian Pekerjaan Umum.

   Jalan Akses IPAL Kayu Manis juga merupakan jalur utama dari Jaringan Pipa IPAL Skala Kota yang kemungkinan dibangun pada Tahun 2029-2030

Gambar 4.2-6.
Rencana Pembangunan Jalan Akses Ipal Kayu Manis



7) Pembangunan Jalan Akses Kantor Pemerintahan terpadu

Pembangunan Jalan Akses Kantor Pemerintahan terpadu direncanakan dengan total Panjang penanganan 400 m. Kantor pusat pemerintahan terpadu dibangun untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik, karena semua instansi terkait berada di satu tempat. Pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan Baru Kota Bogor ini, salah satu tujuan utama adalah untuk mendistribusi pergerakan agar tidak

menumpuk di pusat Kota Bogor. Selain itu juga upaya untuk mengembangkan wilayah Bogor Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor.

Gambar 4.2-7.
Rencana Pembangunan Jalan Akses
Kantor Pemerintahan Terpadu



8) Pelebaran Jalan Akses Pasar Warung jambu

Pelebaran Jalan Akses Pasar Warung jambu Total Panjang penanganan 150 m yang berlokasi di sisi Sungai Ciliwung, menghubungkan Jalan Ciremai Ujung dan Jalan Ahmad Yani. Pelebaran Jalan dari ±5 meter menjadi 7 meter, sehingga dapat dilalui kendaraan 2 arah (konfigurasi lajur menjadi 2/2 UD).

Gambar 4.2-8.
Rencana Pelabaran Jalan Akses Pasar jambu Dua

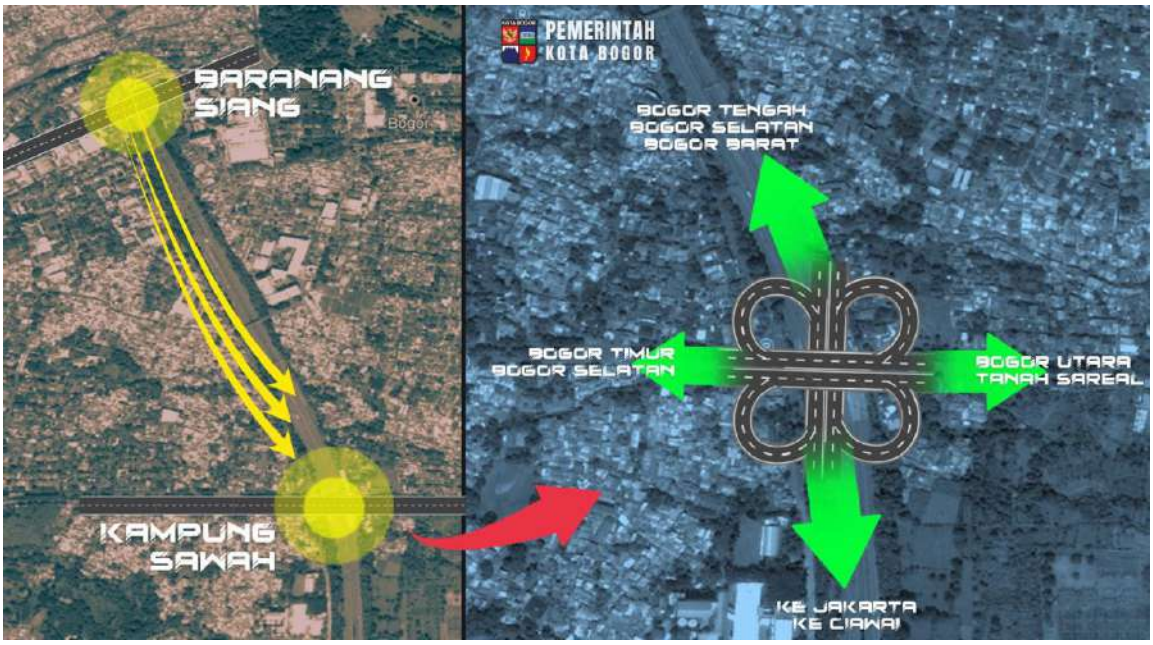


9) Bogor Interchange

Rencana Pembangunan Bogor Interchange yang didesain menyerupai daun semanggi empat diharapkan dapat mengurai penumpukan kendaraan di pintu masuk kota. Bogor Interchange akan menjadi Icon Gerbang Masuk Utama Kota Bogor. selain itu dampak dari pembangunan ini doharapkan dapat mengurangi beban arus lalu lintas ke Pusat Kota, Alternatif menuju Tol Jagorawi dari Wilayah Utara dan Timur.

Tantangan dalam rencana ini antara lain pada Off Ramp Jagorawi ke R3 atau Pandu melintasi banyak area permukiman sehingga biaya pembebasan lahan menjadi lebih besar.

Gambar 4.2-9.
Rencana Pembangunan Bogor Interchange



10) Jalan Tembus R3 menuju Kampung Pasir

Pembangunan Jalan Tembus R3 menuju Kampung Pasir Panjang direncanakan dengan panjang penanganan 285m. Fungsi Jalan rencana Lokal Sekunder dengan rencana ROW Ideal 15m dan ROW Minimal 11 m.

Tantangan dalam rencana ini adalah perkiraan luasan lahan yang harus dibebaskan mencapai 4.275m2.

Gambar 4.2-10.
Rencana Pembangunan Jalan R3 - Kampung Pasir



11) Jalan tembus Pakuan Indah menuju Permata

Pembangunan Jalan tembus Pakuan Indah menuju Permata direncanakan panjang penanganan 250 m. Fungsi Jalan rencana Lokal Sekunder dengan ROW Ideal 15m dan ROW Minimal 11 m.

Tantangan dalam rencana ini perkiraan luasan lahan yang harus dibebaskan 810 m2.

Gambar 4.2-11.
Rencana Pembangunan Jalan tembus Pakuan Indah menuju Permata



12) Pelebaran Jalan Cifor sampai dengan batas Kota Bogor

Pelebaran Jalan Cifor sampai dengan batas Kota Bogor direncanakan Panjang penanganan 1.900 m. Fungsi Jalan rencana Lokal Sekunder dengan lebar jalan eksisting rata-rata 5m dan ROW Ideal 15m. Pelebaran ini sangat penting untuk memperlancar akses menuju kawasan Situgede sekaligus memperkuat jalur konektivitas Kota Bogor–Kabupaten Bogor.

Tantangan dalam rencana ini Perkiraan luasan lahan yang harus dibebaskan 19.000 m2.

Gambar 4.2-12.
Rencana Pembangunan Pelabaran Jl. Cifor – Batas Kota

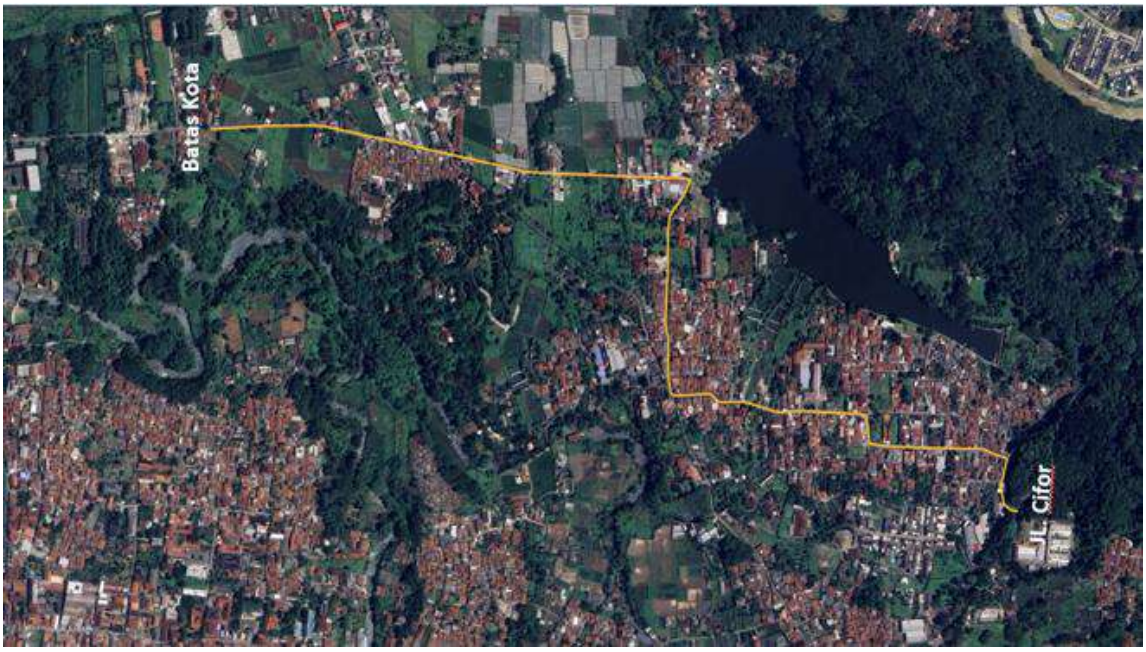


Table 4.2.2.
Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PRIORITAS	PENJELASAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										SUB KEGIATAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
A	Prioritas Kepala Daerah												
1	Bogor Cerdas												
1.1	Pembangunan Gedung Pemerintahan Terpadu	Pekerjaan Pematangan Lahan Zona Selatan (Lapangan dan Masjid) - Cut & Fill - Pekerjaan saluran sungai	1	16.804.364.000									Sub Kegiatan: Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota
		Pekerjaan Lapangan Sepak Bola (Kelas FIFA)Kawasan Kantor Pemerintahan			1	18.000.000000							
		Penyusunan DED Kawasan Kantor Pemerintahan Zona Selatan	1	2.200.000.000									
		Pekerjaan Konstruksi Masjid Kawasan Kantor Pemerintahan			1	15.206.546.000							

NO	PRIORITAS	PENJELASAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										SUB KEGIATAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		Review DED Kawasan Kantor Pemerintahan Zona UtaraReview DED Kawasan Kantor Pemerintahan Zona Utara - Pekerjaan Review Struktur dan Infrastruktur (karena sdh ada pemb Jalan) - Design Interior dan ekterior - RAN Harga Terupdate			1	1.700.000.000							
		Pekerjaan Pematangan Lahan Kawasan Kantor Pemerintahan Zona Utara (Plaza dan Main Building). - Pekerjaan Cut & Fill, Pek Saluran untuk Sungai, Secant Pile Basemant					1	36 504.364.000					

NO	PRIORITAS	PENJELASAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										SUB KEGIATAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		Perpanjangan dokumen AMDAL Kawasan Kantor Pemerintahan					1	300.000.000					
		Konsultan Manajemen Konstruksi Kantor Pemerintahan Terpadu Kota Bogor							1	5.430.000.000	1	5.430.000.000	
		Pekerjaan Struktur Kantor Pemerintahan Terpadu Kota Bogor.							1	174.776.546.000	1	174.874.364.000	
2	Bogor Sehat												
2.1	Perencanaan Tata Ruang Yang Mempertimbangan Ekses Perubahan Iklim Dan Resiko Bencana	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	1	350.000.000	1	900.000.000	1	500.000.000	1	300.000.000	1	100.000.000	1. Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang; 2. Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/ Kota; 3. Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR

NO	PRIORITAS	PENJELASAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										SUB KEGIATAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
													Kabupaten/ Kota; 4. Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/ Kota; 5. Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang; 6. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang.
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1	400.000.000			1	100.000.000			1. Penyusunan Peta Dasar; 2. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

NO	PRIORITAS	PENJELASAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										SUB KEGIATAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	1	100.000.000	1. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; 2. Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota; 3. Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang.

NO	PRIORITAS	PENJELASAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										SUB KEGIATAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0	500.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	500.000.000	1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang' 2. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan Mandiri Pelaku UMK; 3. Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan; 4. Penilaian Perwujudan RTR; 5. Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR.

NO	PRIORITAS	PENJELASAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										SUB KEGIATAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
2.2	Peningkatan kualitas sanitasi (air limbah domestik aman	Meningkatkan Kesehatan keluarga dengan peningkatan pengelolaan air limbah aman	7.77%	2.252.000.000	9.27%	2.300.000.000	10.77 %	2.350.000.000	10.84 %	2.400.000.000	11.02%	2.450.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
2.3	Peningkatan kualitas air minum	Meningkatkan Kesehatan keluarga dengan peningkatan penyediaan air minum	72.90%	1.050.000.000	73.20	1.000.000.000	73.50	1.250.000.000	73.90	1.200.000.000	74.20	1.450.000.000	1. Sub kegiatan . Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
3.	Bogor Lancar												
3.1	Pembangunan Jalan Frontage R2	Total Panjang Jalan ± 5 KM Sebagian Lahan sudah dibebaskan pada tahun 2005 oleh Pemerintah Kota Bogor											✓ Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelengga
		Segmen KS Tubun – Kaum Sari		17.635.000.000		15.375.000.000							

NO	PRIORITAS	PENJELASAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										SUB KEGIATAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		Segmen Kaum Sari – Tn Baru								108.710.000.000		20.000.000.000	raan Jalan dan Jembatan ✓ Pembangunan Jalan
		Segmen Tn Baru – Kp Rambay				162.550.000.000		21.250.000.000					
		Segmen Kp Rambay - Sukaraja						138.645.000.000		11.250.000.000			
3.2	Pembangunan Jalan R3 (Inc 100 M Jembatan)	Total Panjang Jalan ± 3,2 KM											
		Parung Banteng - Katulampa p: 550 m		1.449.000.000		16.500.000.000							
		Jembatan Bendung Katulampa, p: 60 m						100.000.000.000					
		Katulampa - Tajur, p: 800 m						150.220.000.000		25.000.000.000			
		Katulampa - Tajur, p: 800 m								150.220.000.000		30.000.000.000	
3.3	Pembangunan Jalan Bogor Inner Ring Road (BIRR) (Inc 100 M Jembatan)	Total Panjang Jalan ± 7 KM											
		Segmen 1 (Wangun - Detour) p: 1,7 km				180.000.000.000		59.500.000.000					
		Segmen 2 (Detour - Pamoyanan) p: 2,8 km						296.000.000.000		98.000.000.000			

NO	PRIORITAS	PENJELASAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										SUB KEGIATAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		Segmen 3 (Pamoyanan-Mulyaharja) p: 2,6 km		274.000.000.000		91.000.000.000							
		Jembatan Cisadane / Double Track, p: 200m								200.000.000.000			
3.4	Pembangunan Simpang Tidak Sebidang Jalan Kebon Pedes (Perlintasan Rel Kereta Api)	Kebutuhan lahan ± 4.400 m2											
		DPPT, Appraisal & peng Tanah		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000	
		Konstruksi Fisik		50.000.000.000		50.000.000.000		50.000.000.000		50.000.000.000		40.000.000.000	
3.5	Pembangunan Jalan Tembus Dadali - Sukaresmi/Jl. Sholeh Iskandar	Total Panjang Jalan ± 525 m,											
		Dokumen Lingkungan		100.000.000									
		Dokumen Lalu Lintas		100.000.000									
		DED/Review DED/Perencanaan Teknis		100.000.000									
		DPPT, Appraisal & peng Tanah				30.000.000.000		40.000.000.000		34.000.000.000		30.000.000.000	
		Konstruksi Fisik								6.000.000.000		5.000.000.000	
3.6	Jl. Akses IPAL Kayu Manis												

NO	PRIORITAS	PENJELASAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										SUB KEGIATAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		Konstruksi Fisik		20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000	
3.7	Pelebaran Jalan akses Pasar Jambu Dua	Total Panjang 150 m, pelebaran jalan dari 5 m menjadi 7 meter, relokasi drainase											
		Konstruksi Fisik		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
3.8.	Pembangunan Bogor Interchange	Dapat menjadi Icon Gerbang Masuk Utama Kota Bogor, Mengurangi beban arus lalu lintas ke Pusat Kota, Alternatif menuju Tol Jagorawi dari Wilayah Utara dan Timur, Off Ramp Jagorawi ke R3 atau Pandu melintasi banyak area permukiman, biaya pembebasan lahan menjadi lebih besar.											

NO	PRIORITAS	PENJELASAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										SUB KEGIATAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		Tahap 1 (On Ramp Pandu - Jagorawi, p: 650 m				39.000.000.000		39.000.000.000					
		Tahap 2 (Off Ramp Jagorawi - R3, p: 450 m						37.800.000.000		90.000.000.000			
		Tahap 3 (On Ramp R3 - Jagorawi), p: 550 m								66.000.000.000		110.000.000.000	
		Tahap 4 (Off Ramp Jagorawi - Pandu), p: 480 m								57.600.000.000		96.000.000.000	
3.9	Pembangaunan Jalan Akses Pusat Pemerintahan Terpadu	Total Panjang 400 m											
		Dok Lalu Lintas		100.000.000									
		DED/Review DED/Perencanaan Teknis		100.000.000									
		Konstruksi Fisik		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000					
3.10	Jalan Tembus R3 - Kampung pasir	Total Panjang 285 m											
		Studi Kelayakan		100.000.000									
		Dok Lingkungan				100.000.000							
		Dok Lalu Lintas				100.000.000							

NO	PRIORITAS	PENJELASAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										SUB KEGIATAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
		DED/Review DED/Perencanaan Teknis		100.000.000									
		DPPT, Apraisal & Peng tanah				5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000	
		Konstruksi								3.000.000.000		2.000.000.000	
3.11	Jalan Tembus Pakuan Indah - Permata	Total Panjang 250 m											
		DPPT, Apraisal & Peng tanah				2.000.000.000		2.000.000.000					
		Konstruksi						1.000.000.000		1.000.000.000			
3.12	Pelebaran Jalan Cifor – Batas Kota	Tota 1.900 m											
		Studi Kelayakan		100.000.000									
		Dok Lingkungan				100.000.000							
		Dok Lalu Lintas				100.000.000							
		DED/Review DED/Perencanaan Teknis		100.000.000									
		DPPT, Apraisal & Peng tanah				20.000.000.000		20.000.000.000		30.000.000.000		25.000.000.000	
		Konstruksi						10.000.000.000		10.000.000.000		10.000.000.000	

Sumber : Dinas PUPR 2025

Table 4.2.3.
Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Asta Cita

Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Bidang Pekerjaan Umum	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru (PN 02)	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum	Cakupan layanan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	
					Cakupan layanan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	
			Meningkatnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman	Kegiatan. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman	
					Persentase layanan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	
			Meningkatnya Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sub kegiatan . Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	

Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Kota Bogor		Program . PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak	
					Cakupan layanan rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang aman	
			Meningkatnya jumlah rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak	Kegiatan .Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang layak	
					Persentase rumah tangga yang dilayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang aman	
			Terlaksananya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	
			Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	

Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	
			Tersedianya Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara	
			Meningkatnya Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) yang terbangun	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) yang terbangun	
			Meningkatnya Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob	Sub Kegiatan Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob	

Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Sungai yang berkondisi baik (%)	
					Persentase Irigasi yang berkondisi baik (%)	
					Persentase rawan banjir yang ditangani	
				Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Irigasi yang berkondisi baik	
				Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	
	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui	Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan berkondisi mantap	
			Bertambahnya panjang jalan yang terbangun	Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan yang terbangun	
					Persentase panjang jalan yang terbangun	
					Persentase panjang jalan yang ditingkatkan	
					Persentase jalan yang terpelihara	

Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Peran Aktif Koperasi (PN. 03)				Persentase trotoar yang dibangun dan ditingkatkan	
					Persentase jembatan yang terpelihara	
					Persentase jembatan yang terbangun	
				Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	
			Terlaksananya Pembangunan Jalan	Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Dibangun	
			Terlaksananya pemeliharaan jalan secara berkala	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	
			Terlaksananya pemeliharaan jalan secara rutin	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah ruas Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	
			Terlaksananya pembangunan jembatan	Sub Kegiatan : Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	
			Terlaksananya pemeliharaan jembatan secara rutin	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Persentase drainase yang berkondisi baik	

Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	persentase penurunan lokasi genangan	
				Kegiatan :Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah panjang drainase pada jalan arteri/kolektor/lokal	
			Terlaksananya pembangunan drainase perkotaan	Sub Kegiatan : Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	
			Terlaksananya pemeliharaan drainase perkotaan	Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	
				Program : PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Kota Bogor yang berkondite baik	
					Persentase Pekerjaan Konstruksi yang bernilai baik	
				Kegiatan: Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase tenaga terampil yang memiliki kompetensi	
			Terlaksananya fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analisis yang Difasilitasi Sertifikasi	

Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap Indikasi Program Rencana Tata Ruang	
			Tersedianya Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan: Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	
			Tersedianya dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	
			Tersedianya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	
				Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Tercapainya Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Sub Kegiatan: Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	

Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Bidang Penataan Ruang	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi (PN. 03)	Terwujudnya penataan bangunan gedung yang berwawasan lingkungan		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Cakupan Penataan Bangunan dan Gedung	
					Persentase pencegahan jumlah bangunan baru tidak berizin	
			Terwujudnya penataan bangunan gedung yang berwawasan lingkungan	Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang dibangun sesuai PBG	
					Persentase permohonan sertifikat laik fungsi yang telah terbit	

Bidang Urusan	Asta Cita	Outcome (Sasaran Program)	Output (Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Ket
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
			Tersedianya Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan: Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber : Dinas PUPR 2025

IV.3 TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

Table 4.3.1.
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 – 2029

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja						Target Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Dinas PUPR	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A (85,1)	A (85,5)	A (86,5)	A (87,0)	A (87,50)	A (88,00)	A (88,50)	A (88,50)
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK/ITDA	%	87.69	100	100	100	100	100	100	100
	Kepatuhan Pengeloaan Keuangan	%	99,3	99,50	99,55	99,60	99,65	99,70	99,75	99,75
	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	3.4	3.5	3.55	3.6	3.65	3.7	3.75	3.75
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang Ditetapkan menjadi Inovasi Daerah Dengan Tingkat Kematangan >100	Angka	1	1	1	1	1	1	1	1
Optimalisasi pemenuhan akses air minum	Cakupan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%	98,04	98,20	98,40	98,60	98,80	99,0	99,05	99,05
Optimalisasi pemenuhan akses air limbah	Cakupan Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak	%	79,43	79,93	81,0	81,66	82,49	83,31	84,0	84,0
Menurunnya Resiko Bencana Banjir dan Tanah Longsor Dibantaran Sungai	Persentase lokasi rawan banjir dan tanah longsor dibantaran sungai yang ditangani	%	22.86	24.29	25.71	27.14	28.57	30.00	31.43	31.43
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Irigasi	Persentase infrastruktur irigasi yang berkondisi baik	%	54.65	55,65	56,65	57,65	58,65	59,65	60,65	60,65
Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan	Persentase Jalan berkondisi mantap	%	90.03	90.04	90.05	90.06	90.07	90.08	90.09	90.09
Meningkatnya kualitas drainase	Persentase drainase yang berkondisi baik	%	67.86	68.00	70.00	72.00	75.00	78.00	80.00	80.00

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja						Target Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang	Persentase kesesuaian antara aktivitas pada RKPD dan indikasi program pada rencana struktur ruang pada RTR	%	58.7	59.00	60.00	61.00	62.00	63.00	64.00	64
	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Angka	0.0055	0.0065	0.01	0.0135	0.0165	0.02	0.0235	0.0235

Table 4.3.2.
Tabel Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Definisi	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	angka	Mengukur rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/ Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) dibagi Luas kawasan permukiman	64,21	64,56	64,78	65,10	65,25	65,65	65,75	

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Definisi	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) dikali 100								
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	angka	Mengukur rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting dibag lluas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota dikali 100	61,62	61,85	62,05	62,35	62,65	62,85	63,0	

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Definisi	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	Mengukur persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/ kota dibagi Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kot a tersebut dikali 100%	98,04	98,20	98,40	98,60	98,80	99,00	99,05	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses pada pelayanan pengolahan air limbah domestik yang	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah	79,43	79,93	81,00	81,66	82,49	83,31	84,0	

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Definisi	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			memenuhi standar teknis dan lingkungan (melalui sistem perpipaan terpusat, sistem lokal, atau sambungan rumah)dibandingkan dengan total rumah tangga di wilayah tersebut	rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah rumah di Kota dikali 100%								
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	angka	perbandingan antara jumlah pemanfaatan izin mendirikan bangunan yang sesuai peruntukannya dengan jumlah izin mendirikan bangunan (IMB) yang berlaku di suatu kabupaten/kota, dikali 100%	Jumlah pemanfaatan PBG yang sesuai peruntukannya dibagi Jumlah PBG yang berlaku dikali 100%	95,77	95.90	96.10	96.30	96.65	96.80	97,0	
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	persentase panjang ruas jalan yang termasuk kategori baik dan sedang dibandingkan total panjang ruas jalan di kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi Jumlah total panjang jalan	90,03	90,04	90,05	90,06	90,07	90,08	90,09	

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Definisi	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				kabupaten/ kota dikali 100%								
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	Perbandingan dari tenaga kerja (operator, teknisi, dan analis) yang sudah memiliki sertifikat kompetensi dibandingkan dengan total jumlah tenaga kerja (operator, teknisi, analis) yang dibutuhkan atau ada dalam suatu wilayah atau instansi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/ analis dibagi Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/ analis di wilayah Kabupaten/ Kota dikali 100%	83,94	83,99	84,04	84,08	84,13	84,18	84,25	
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	Perbandingan antara jumlah proyek konstruksi (dalam lingkup kewenangan pengawasan suatu instansi/daerah) yang telah diselesaikan	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi	0	0	0	0	0	0	0	

No.	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Definisi	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			tanpa insiden kecelakaan konstruksi dengan total jumlah proyek konstruksi yang diawasi, dinyatakan dalam persentase.	kecelakaan konstruksi dibagi Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya dikali 100%								

IV.4 RENCANA PEMENUHAN SPM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum di Tingkat Kota Bogor ada 2 pelayanan dasar yaitu sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Table 4.4.1.
Rencana Pemenuhan SPM Perangkat Daerah

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU	SATUAN	CAPAIAN					
								2025	2026	2027	2028	2029	2030
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Sesuai dengan standar air minum	Setiap warga negara	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	100%	Setiap tahun	%	98,20	98,40	98,60	98,80	99,0	99,05
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Sesuai dengan standar air limbah domestic	Setiap warga negara	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	%	79,93	81,0	81,66	82,49	83,31	84,0

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasion 2025-2029, Raperda Kota Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2025-2029, khususnya yang terkait dengan roadmaptahun 2025-2029 dan diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor.

Dalam rencana strategis tahun 2025-2029 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor pada tahun 2020-2024.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor Tahun 2025-2029 ini merupakan panduan dalam melakukan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja kedepan. Untuk itu diperlukan komitmen, kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggungjawab yang tinggi demi mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Dengan telah tersusunnya rencana strategis ini pula, diharapkan bidang bidang kerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Kota Bogor dapat terwujud dengan baik.